



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA
BARAT DAPIL BEKASI 2
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA
BARAT
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI, MEMERIKSA DAN
MENGESAHKAN ALAT BUKTI TAMBAHAN**

J A K A R T A

SENIN, 27 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Dapil Bekasi 2 Tahun 2024
- Pemohon: Lydia Fransisca

90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Nasdem

183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrat

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan

**Senin, 27 Mei 2024, Pukul 14.04 – 18.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Fransisca Farouk
2. Alifah Rahmawati
3. Indah Karmadaniah
4. Ananthia Ayu Devitasari
5. Haifa Arief Lubis

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Bambang Wahyu Ganindra
2. Muallim Bahar

B. Saksi Pemohon Perkara Nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Aat Hidayat
2. Sudirman
3. Muhaimin Royani

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rizal Khoirur Roziqin
2. Rudy Adianto

D. Ahli Pemohon Perkara Nomor 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Jamin Ginting

E. Saksi Pemohon Perkara Nomor 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Erwin Maradona Harahap
2. Rahmat Zeri Dusti
3. Riyan Ramadani
4. Iden
5. Nur Yusuf

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Husni Thamrin
2. Ridwan Syaidi Tarigan

G. Ahli Pemohon Perkara Nomor 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yulianto

H. Saksi Pemohon Perkara Nomor 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rizky Mediantoro
2. Hendi Sutresna
3. Willihardy Ummaya

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Mehbob
2. Andi Syafrani

J. Saksi Pemohon Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ade Sugiri
2. Hafid Amrullah
3. Syamsudin

K. Termohon:

1. Aneu Nursifah

L. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ali Nurdin
2. Asep Andrianto
3. Sigit Nurhadi Nugraha
4. Imam Munandar
5. Stefanus Budiman

M. Saksi Termohon:

1. Cepi Adi Setiadi
2. Muchammad Riza
3. Kamal Hendraya
4. Arif Firman Suntara
5. Didin Saepudin
6. Pendi
7. Tauhid
8. Nanas Nasihudin
9. Dede Abdurosyid
10. Yulianto Sudrajat
11. Ahmad Nurhidayat

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Golkar):

1. Muh. Sattu Pali
2. Daniel Tonapa Masiku

O. Ahli Pihak Terkait Perkara Nomor 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Fritz Edward Siregar

P. Saksi Pihak Terkait Perkara Nomor 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Golkar):

1. Cucu Sukmana
2. Dani Nurjaman
3. Riky
4. Nabhan Rizqullah
5. Olih Arpan

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Roy Jansen Siagian
2. Aries Surya

R. Ahli Pihak Terkait Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Maruarar Siahaan

S. Saksi Pihak Terkait Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Mansyur
2. Agiel Saputra
3. Supriyadi
4. Mufrod
5. Dipo Heru Prayitno

T. Bawaslu:

1. Herwyn J. H. Malonda
2. Ali Faisal
3. Muhamad Sopian
4. Khoirudin

5. Nuryamah
6. Ade Wahyu Hidayat
7. Isti Pratiwi
8. Masykuridho

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.04 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 90, 59, 46, dan 183 untuk PHPU, DPR, DPRD Tahun 2024 untuk Provinsi Jawa Barat dan Banten dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore atau selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Persidangan siang hari ini untuk Perkara 4 tadi, 4 Nomor, agendanya adalah untuk mendengar keterangan saksi dan ahli ... dan/atau ahli dan juga pengesahan alat bukti jika masih ada yang disahkan. Untuk itu Nomor 90 diperkenalkan, Pemohon yang hadir. Silakan, tidak ada yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:08]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:11]

Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:13]

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:14]

Walaikumsalam.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:15]

Yang hadir pada kesempatan ini, saya bersama ... saya Husni Thamrin dan Ridwan Saragih[sic!] sebagai Kuasa Hukum. Pada kesempatan ini kami menghadirkan Ahli satu orang, kemudian Saksi tiga orang, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:42]

Baik, 90 ya. Kemudian, 59.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:44]

Assalamualaikum wr. wb. Kami Dari Kuasa Hukum Perkara 59, saya Rizal Khoirur Roziqin dan rekan saya, Rudy Adianto. Kami hari ini mengajukan 5 orang Saksi fakta dan 1 orang saksi Ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:06]

Baik, 46.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [02:08]

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Saya Kuasa Hukum Dari Perkara 46, nama Bambang Wahyu Ganindra bersama rekan saya Muallim Bahar. Pada persidangan ini akan membawa 3 orang Saksi fakta. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

Baik, dari 183.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [02:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir saya Andi Syafrani bersama rekan saya, Dr. Mehbob. Kami membawa 3 orang Saksi, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:36]

Baik, dari Termohon, 55, eh sori ... 90.

14. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [02:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Aneu Nursifah, saya dari KPU Provinsi Jawa Barat. Untuk Kuasa Hukum (...)

15. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:00]

Terima kasih, Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb.

16. KETUA: SUHARTOYO[03:02]

Walaikumsalam.

17. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:05]

Saya Ali Nurdin dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners. Jika mengizinkan, Yang Mulia, karena duduk ... kursi kosong, ini berkaitan DPR RI, kami mohon izin satu orang lagi Kuasa Hukum bisa hadir, atas nama Asep Andrianto, supaya bisa mendampingi dalam Perkara ini.

18. KETUA: SUHARTOYO

Dimana sekarang?

19. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:05]

Ada di ruang sebelah, Yang Mulia. Di ruang tunggu.

20. KETUA: SUHARTOYO [03:24]

Baik Bapak, Kuasa Hukum Nomor berapa ini?

21. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:28]

Untuk Perkara 90, DPR RI.

22. KETUA: SUHARTOYO [03:32]

Silakan.

23. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:33]

Terima kasih.

24. KETUA: SUHARTOYO [03:34]

59. Silakan kenalkan.

25. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [03:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir untuk Perkara 59, dari Kuasa Termohon, nama Sigit Nurhadi Nugraha.

26. KETUA: SUHARTOYO[03:45]

Baik, 46.

27. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Imam Munandar dari Firma Hukum Hicon, Kuasa Hukum Termohon untuk Perkara Nomor 46.

Mohon izin, Yang Mulia. Pada kesempatan sidang pada siang hari ini, kami mengajukan 4 Saksi, Yang Mulia. Terima kasih.

28. KETUA: SUHARTOYO [04:09]

Baik, 183.

29. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [04:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Stefanus Budiman dari Kantor Hukum Pieter Ell dan Rekan, menjadi Kuasa Hukum dalam Perkara Nomor 183. Pada kesempatan ini kami menghadirkan 5 orang Saksi dan 1 Ahli. Kami juga didampingi oleh KPU dari kabupa ... Provinsi Banten. Terima kasih, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [04:39]

Pihak Terkait dari Partai Golkar, silakan.

31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [04:43]

Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait dari Partai Golkar Nomor 90 hadir Muhammad Sattu Pali dan Daniel Tonapa Masiku. Kemudian kami menghadirkan 1 Ahli dan 5 orang Saksi. Terima kasih, Yang Mulia.

32. KETUA: SUHARTOYO [04:58]

Dari Pihak Terkait 183, PDIP.

33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [05:05]

Baik, Yang Mulia. Kami dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan. Saat ini diwakili oleh saya Roy Jansen Siagian dan satu lagi teman saya, Aries Surya. Kami akan membawakan 5 Saksi fakta dan 1 saksi ahli ... dan 1 Ahli, Yang Mulia. Terima kasih.

34. KETUA: SUHARTOYO [05:22]

Baik, dari Bawaslu silakan.

35. BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [05:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Bawaslu, saya Herwyn Malonda, Bawaslu RI. Dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Nuryamah. Kemudian Bawaslu Kota Bandung, Muhamad Sopian. Bawaslu Kabupaten Bekasi, Khoirudin. Dari Bawaslu Provinsi Banten dua orang, ketuanya Pak Ali Faisal dan Ade Wahyu Hidayat. Dari Bawaslu Kota Serang, Masykuridho dan Isti Pratiwi serta Bawaslu Provinsi Banten. Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: SUHARTOYO [06:00]

Baik. Terima kasih. Baik, untuk perkara yang pertama, Nomor 90 Saksi Pemohon, Willihardy Ummaya, maju ke depan. Rizky Mediantoro, betul ya? Dan Hendi Sutrisno, ya ... Sutrisna. Kemudian Ahlinya, Yulianto, maju sekalian.

Kemudian Termohonnya, maju juga, Saksinya Kamal Hendraya. Arif Irman Suntara, Cepi Adi Setiadi, ya? Siapa yang dua ini, tambahan ini?

37. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [06:47]

Yang Mulia, dari kami ada tiga PPD dan KPU Kabupaten/Kota, Pak Cepi, kayaknya dari penyelenggara mungkin tidak perlu menjadi Saksi, Yang Mulia. Sama dari KPU Provinsi.

38. KETUA: SUHARTOYO [06:57]

Ya, tapi ini ada tambahan dua nih, Pak?

39. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [06:59]

Ya, ada tambahan dua karena ada pergeseran, Yang Mulia. Untuk KPU Provinsi ada Ibu Aneu jadi pembagian tugas, ada Pak Ahmad. Keduanya anggota KPU Provinsi.

40. KETUA: SUHARTOYO [07:09]

Bukan, masalahnya namanya belum disodorkan sebelumnya.

41. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [07:12]

Ya, jadi ada.

42. KETUA: SUHARTOYO [07:12]

Kan satu hari sebelumnya harus diserahkan.

43. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [07:16]

Pak Ahmad sudah tadi pagi kami sodorkan, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO [07:18]

Jadi Perkara ini tidak ada. Ada, ya?

45. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [07:22]

Ada, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO [07:24]

Enggak ada ini, baru lagi, Ahmad Nurhidayat dan Hadianto. Baik nanti yang sudah lewat kami tidak (...)

47. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [07:30]

Kalau begitu, kami kembali ke yang awal, Yang Mulia. Untuk Ibu Aneu.

48. KETUA: SUHARTOYO [07:33]

Ya.

49. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [07:33]

Ada hadir di sini.

50. KETUA: SUHARTOYO [07:34]

Baik.

51. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [07:34]

Jadi nanti dari Provinsi, Ibu Aneu yang memberikan keterangan, Yang Mulia.

52. KETUA: SUHARTOYO [07:38]

Ibu itu sudah anu ... sebelumnya sudah diserahkan namanya?

53. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [07:42]

Sudah diserahkan, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO [07:43]

Untuk nomor ini?

55. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [07:45]

Ya, untuk nomor ini. Dari Provinsi. Jadi sama-sama dari Provinsi Jawa Barat. Karena Ibu Aneu mewakili (...)

56. KETUA: SUHARTOYO [07:51]

Diputar saja, Pak. Nanti kami tidak pertimbangkan karena kalau nama baru diajukan hari ini.

57. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [07:58]

Ditukar (...)

58. KETUA: SUHARTOYO [07:58]

Meskipun kami dengar, kami enggak ... bisa enggak kami pertimbangkan karena kami samakan Panel lain, nanti sikapnya akan sama.

59. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [08:04]

Baik. Kami tukar, Yang Mulia. Terima kasih.

60. KETUA: SUHARTOYO [08:05]

Silakan.

61. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [08:08]

Untuk Pak Cepi, jadi disumpah atau?

62. KETUA: SUHARTOYO [08:11]

Pak Cepi masih aktif?

63. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [08:12]

Masih aktif, sebagai KPU Kota Bandung.

64. KETUA: SUHARTOYO [08:14]

Masih ya? Oke, Pak Cepi bisa tidak disumpah.

Terus, yang lain bisa, ya? Si Pak Kamal, masih ... anu ... sudah enggak Ketua PPK lagi, kan? Pak Arif juga? Baik. Ini yang diganti siapa, Pak? Bapak mau ganti siapa ini? Hadianto dan Ahmad Nurhidayat.

65. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [08:46]

(Ucapan tidak terdengar jelas) Kiaracandong.

66. KETUA: SUHARTOYO [08:47]

Arin ... Aneu Nurfisah, Nursifah, ya?

67. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [08:50]

Ya, Pak. Betul.

68. KETUA: SUHARTOYO [08:53]

Terus, yang Hadianto?

69. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [08:55]

Ini yang hadir sekarang, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO [08:57]

Nah itu, enggak kami ... silakan kalau mau Bapak ajukan.

71. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [09:00]

Kami ajukan ... untuk memberikan penjelasan kepada Yang Mulia.

72. KETUA: SUHARTOYO [09:03]

Ya, tapi nanti kami bisa tidak pertimbangkan, ya. Karena nama baru itu.

73. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [09:07]

Baik, Yang Mulia.

74. KETUA: SUHARTOYO [09:08]

Silakan. Pak Cepi jadi ditukar itu enggak? Pak Ahmad dengan Ibu?

75. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [09:23]

Karena ini dari KPU Provinsi, dua-duanya enggak disumpah, Yang Mulia. Tapi dua-duanya hadir. Jadi yang (...)

76. KETUA: SUHARTOYO [09:28]

Bukan, maksudnya dari (...)

77. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [09:28]

Semula kami ajukan, Ibu Aneu.

78. KETUA: SUHARTOYO [09:29]

Yang jadi Saksi?

79. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [09:31]

Yang jadi Saksi, Ibu Aneu, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO [09:32]

Ya, Silakan. Untuk nomor ini kan?

81. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [09:34]

Betul. Kan masih menjabat, Yang Mulia. Posisinya di sini, dari KPU Provinsi.

82. KETUA: SUHARTOYO [09:39]

Oh, untuk ... baik. Terus berarti yang Pak Ahmadnya?

83. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [09:43]

Pak Ahmad juga dari KPU Provinsi Jawa Barat. Ada di sini, Yang Mulia. Masih menjabat.

84. KETUA: SUHARTOYO [09:48]

Baik.

Oke, kemudian dari Pihak Terkait, Partai Golkar. Cucu Sukmana mana? Mana Saksinya? Maju, Pak. Dani Nurjaman, Riky, Nabhan Rizqullah, dan Olih Arpan. Maju semua, Pak. Jadi Pak Ali ini yang ditukar yang mana jadinya? Masih agak (...)

85. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [10:19]

Jadi yang pertama untuk (...)

86. KETUA: SUHARTOYO [10:20]

Kan tadi, Bapak sebelumnya ... Pak Hadianto tidak ada, kan? Untuk ini.

87. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [10:26]

Ya, betul.

88. KETUA: SUHARTOYO [10:26]

Udah ditarik.

89. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [10:27]

Betul, ditarik. Ditukar.

90. KETUA: SUHARTOYO [10:28]

Terus, Ahmad Nurhidayat juga ditarik, kan?

91. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [10:31]

Ditukar ke Bu Aneu kembali, Yang Mulia.

92. KETUA: SUHARTOYO [10:32]

Ya.

93. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [10:32]

Ya, betul.

94. KETUA: SUHARTOYO [10:33]

Pak Hadianto ditukar?

95. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [10:35]

Ditukar dengan dari PPD Andir, Yang Mulia. Ya, jadi yang semula kami ajukan untuk PPK Sukasari (...)

96. KETUA: SUHARTOYO [10:45]

Sudah diajukan sebelumnya, ya?

97. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [10:46]

Betul, itu yang kami ganti posisinya.

98. KETUA: SUHARTOYO [10:49]

Geser sini, Pak. Geser semua.

99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [10:51]

Izin, Yang Mulia.
Ahli Pihak Terkait (...)

100. KETUA: SUHARTOYO [10:53]

Ya, sebentar.

101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [10:54]

Apakah disumpah?

102. KETUA: SUHARTOYO [10:55]

Sebentar. Ahlinya Pak Yulianto, yang mana? Oke, terus. Pak Fritz.

103. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [11:03]

Pak Fritz ada.

104. KETUA: SUHARTOYO [11:05]

Pak Fritz ada? Sini Pak Fritz. Berdua untuk Ahli. Pak Fritz, oke.
Oke, Pak, Yang Mulia.

105. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [11:29]

Izin, Yang Mulia.
Dari Termohon 90. Bila berkenan kami mohon info apakah dari Saksi untuk 90 Pemohon ada dari penyelenggara atau tidak? Jika ada dari penyelenggara, kami keberatan.
Terima kasih, Yang Mulia.

106. KETUA: SUHARTOYO [11:42]

Ya. Seandainya pun ada, kami catat keberatan Bapak. Tapi ini sepertinya Saksi semua ini. Nanti yang Pak Fritz, Yang Mulia Pak Daniel, mohon perkenannya nanti.
Silakan, Prof. Guntur yang agama Islam dulu.

107. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:00]

Yang saksi beragama Islam, ya, ini seluruh Saksi, ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

108. SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [12:00]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

109. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:29]

Terima kasih.

110. KETUA: SUHARTOYO [13:31]

Ahli, Ahli yang, Pak.

111. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:34]

Satu Ahli, ya. Oke, yang agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya ... tidak lain ... sesuai dengan keahlian saya."

112. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [12:34]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

113. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:02]

Ya, terima kasih.

114. KETUA: SUHARTOYO [13:04]

Baik, terima kasih untuk yang Kristen, Yang Mulia.

115. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:08]

Baik, untuk yang Kristen, Pak Fritz Edward Siregar, ikutin lafal janji yang akan saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

116. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: FRITZ EDWARD SIREGAR [13:17]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

117. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:33]

Baik, terima kasih.

118. KETUA: SUHARTOYO [13:37]

Baik, silakan kembali ke tempat semula. Untuk Saksinya Pemohon, ya, silakan. Pak Willihardy Ummaya, apa yang diketahui, Pak? Saksi mandat tingkat kota, ya.

119. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [14:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa setelah ditetapkan rekapitulasi hasil penghitungan tingkat kota Bandung pada hari Senin, tepatnya tanggal 4 Maret 2024, kami mengajukan nota keberatan, serta tidak menandatangani hasil rekapitulasi Pleno KPU Kota Bandung.

120. KETUA: SUHARTOYO [14:46]

Bapak saksi mandat partai apa ini? Atau Caleg (...)

121. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [14:48]

Nasdem.

122. KETUA: SUHARTOYO [14:45]

Nasdem, ya?

123. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [14:50]

Nasdem.

124. KETUA: SUHARTOYO [14:51]

Kota Bandung, ya?

125. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [14:53]

Ya, Kota Bandung, Yang Mulia.

126. KETUA: SUHARTOYO [14:54]

Kenapa tidak tanda tangan?

127. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [14:56]

Dikarenakan kami menemukan laporan dengan adanya ketidaksetaraan antara C.Hasil dan D.Hasil. Untuk penghitungan suara ... DPR RI.

128. KETUA: SUHARTOYO [15:09]

Di Tingkat? Di tingkat mana ini?

129. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [15:10]

Di tingkat kota.

130. KETUA: SUHARTOYO [15:12]

Oke. Yang tidak sama suara partai apa?

131. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [15:15]

Berkurangnya suara Partai Nasdem.

132. KETUA: SUHARTOYO [15:19]

Oke, berapa banyak?

133. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [15:22]

Ada di 460 sekian.

134. KETUA: SUHARTOYO [15:25]

Dari PPK? (...)

135. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [15:27]

60 TPS.

136. KETUA: SUHARTOYO [15:30]

Di satu PPK atau beda PPK itu?

137. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [15:34]

Di berbeda, di berbagai macam di banyak PPK.

138. KETUA: SUHARTOYO [15:40]

Berapa TPS, Pak?

139. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [15:41]

Di 60 TPS dari 24 kecamatan yang kami cermati.

140. KETUA: SUHARTOYO [15:48]

Berapa suara tadi?

141. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [15:50]

463 kurang-lebih.

142. KETUA: SUHARTOYO [15:53]

Apa yang dilakukan ketika itu, selain tidak (...)

143. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [15:58]

Kami melakukan percematan dan penyesuaian dengan data yang kami miliki. Kemudian, kami pun mencoba untuk melihat kembali bahwa bukan hanya pengurangan di 60 TPS, tapi ada juga penambahan dari salah satu partai.

144. KETUA: SUHARTOYO [16:15]

Partai apa itu?

145. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [16:16]

Partai Golkar. Di ... hampir di 105 TPS.

146. KETUA: SUHARTOYO [16:24]

Di 105 TPS?

147. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [16:26]

Ya, Yang Mulia.

148. KETUA: SUHARTOYO [16:27]

Dari mana Saudara tahu itu?

149. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [16:29]

Dari hasil pencermatan yang kami lakukan.

150. KETUA: SUHARTOYO [16:32]

Dengan cara bagaimana?

151. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [16:34]

D-1 dan C-1 Hasil.

152. KETUA: SUHARTOYO [16:36]

Di mana dilakukan itu?

153. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [16:39]

Di internal kami, Pak ... Yang Mulia.

154. KETUA: SUHARTOYO [16:43]

Ya. Apa yang sudah dilakukan? Kan ada temuan menurut Saudara seperti itu.

155. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [16:47]

Setelah kami temukan dan kami meyakinkan ada dugaan pengurangan dari partai kami dan juga penambahan salah satu partai. Kami pada hari Jumat, tepatnya tanggal 8 Maret, kami melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

156. KETUA: SUHARTOYO [17:12]

Ketika penghitungan di tingkat mana itu?

157. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [17:16]

Selesai di tingkat kota.

158. KETUA: SUHARTOYO [17:18]

Kota itu?

159. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [17:18]

Ya.

160. KETUA: SUHARTOYO [17:19]

Apa respons dari Bawaslu?

161. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [17:23]

Dalam ... Kami diterima pada tanggal 8 Maret. Kemudian pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat provinsi, kami diterima dan diserahkan kembali kepada Bawaslu Jabar untuk ditindaklanjuti laporan tersebut, Yang Mulia.

162. KETUA: SUHARTOYO [17:39]

Sudah ditindaklanjuti?

163. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [17:40]

Sudah.

164. KETUA: SUHARTOYO [17:42]

Bentuknya apa, Pak?

165. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [17:44]

Penyandingan data.

166. KETUA: SUHARTOYO [17:48]

Sudah dilakukan?

167. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [17:50]

Sudah dilakukan pada tanggal 11 Maret 2024.

168. KETUA: SUHARTOYO [17:53]

Terus apa yang ... masalah yang tersisa apa?

169. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [17:58]

Dari hasil itu dilampirkan sebuah putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Yang Mulia.

170. KETUA: SUHARTOYO [18:04]

Ya, itu sudah dilakukan?

171. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [18:06]

Sudah.

172. KETUA: SUHARTOYO [18:06]

Penyandingan data itu sudah?

173. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [18:08]

Sudah, Yang Mulia.

174. KETUA: SUHARTOYO [18:10]

Terus hasilnya seperti apa, Pak?

175. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [18:11]

Hasilnya ada beberapa hasil yang disampaikan dalam administrasi cepat. Satu, menyatakan terlapor terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu.

Yang kedua, memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pencermatan data yang termuat dalam C.Hasil dan D.Hasil yang ada dalam sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan pelanggaran administratif melalui acara cepat yang dilaporkan pelapor.

Yang ketiganya adalah memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat pada hari rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara pemilu pada Tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung. Hasil putusan ini tertuang dalam putusan pemeriksaan cepat dengan Nomor:001/LP.AC-ADM.PL-BAWASLU-PROVINSI/13.00/III/2024.

176. KETUA: SUHARTOYO [19:18]

Sudah dilakukan itu? Sudah ditindaklanjuti?

177. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [19:22]

Ditindaklanjuti di provinsi, Ketua.

178. KETUA: SUHARTOYO [19:24]

Putusan Bawaslu itu sudah di (...)

179. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLHARDY UMMAYA [19:27]

Tidak dilanjutkan, belum ditindaklanjuti.

180. KETUA: SUHARTOYO [19:39]

Pak Rizky, apa yang mau dijelaskan?

181. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZKY MEDIANTORO [19:46]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, hari ini saya bersaksi dengan penuh rasa hormat di sini untuk bagaimana menyampaikan kesaksian secara langsung terkait dengan peristiwa yang dialami, dilihat, dan didengar berkait dengan proses rekapitulasi suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 di tingkat nasional atau KPU RI.

182. KETUA: SUHARTOYO [20:22]

Apa yang ditemukan ketika Bapak, Bapak saksi mandat, ya?

183. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZKY MEDIANTORO [20:27]

Saksi mandat.

184. KETUA: SUHARTOYO [20:29]

Rekapitulasi tingkat pusat?

185. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZKY MEDIANTORO [20:31]

Pusat.

186. KETUA: SUHARTOYO [20:30]

Apa yang Bapak temukan ketika Bapak jadi saksi mandat di sana?

187. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZKY MEDIANTORO [20:36]

Pada saat rekapitulasi di tingkat nasional, saya pribadi dimandatkan pada tanggal 19 Maret 2024, di kantor KPU RI, Majelis. Nah, di rekapitulasi tersebut, kami pun menyampaikan kembali bahwa ada tindak lanjut yang belum tuntas, yang seharusnya ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Jawa Barat di tingkat rekapitulasi provinsi.

188. KETUA: SUHARTOYO [21:10]

Yang dimaksud dengan rekomendasi tadi itu?

189. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZKY MEDIANTORO [21:13]

Benar, Pimpinan.

190. KETUA: SUHARTOYO [21:17]

Terus apa keberatan itu diakomodir oleh?

191. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZKY MEDIANTORO [21:20]

Sejak dimulainya rekapitulasi, kami menyampaikan beberapa keberatan, termasuk permohonan terkait koreksi, Pimpinan. Dan pada

saat itu, kami melakukan proses rekapitulasi hingga pukul setengah 2 pagi, dan saat itu pimpinan KPU RI, Bapak Hasyim Asyari menyampaikan setelah melakukan skors bahwa ... seperti demikian, Pimpinan.

"Kami memutuskan yang bisa diakomodir adalah hasil pencermatan C. Hasil DPR dengan D. Hasil Kecamatan yang terdapat pada 60 TPS, berdasarkan perhitungan yang ada selisih 463 suara yang berbasis pada form C. Hasil yang ada di TPS."

Nah, pada saat itu pun ketua KPU RI melanjutkan pernyataannya, Pimpinan, yaitu bahwa untuk 60 TPS hasil sandingnya sudah ada angka tentang ketidaksesuaian hasil di TPS dan di kecamatan. Sedangkan, untuk 105 TPS tidak bisa disandingkan karena belum ada pembandingnya, sehingga, tidak terklarifikasi. Yang bisa terklarifikasi kita akomodir untuk dikoreksi, Pimpinan.

192. KETUA: SUHARTOYO [22:37]

Itu yang kaitan dengan rekomendasi tadi?

193. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZKY MEDIANTORO [22:41]

Betul, Pimpinan.

194. KETUA: SUHARTOYO [22:39]

Hendi Sutresna, apa yang dijelaskan?

195. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDI SUTRESNA [22:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebetulnya tadi oleh Saksi yang pertama dengan yang kedua sudah dijelaskan.

196. KETUA: SUHARTOYO [22:56]

Ya. Ada tambahannya, Pak?

197. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDI SUTRESNA [23:00]

Saya sebagai saksi di tingkat provinsi pada saat rekapitulasi perhitungan suara di KPU Jawa Barat. Dan waktu itu saya melanjutkan atau tindak lanjut dari yang sebelumnya dilayangkan oleh partai kami, di tingkat kota.

198. KETUA: SUHARTOYO [23:21]

Ada yang ditambahkan tidak? Bapak kan mau menegaskan yang dua saksi sebelumnya sampaikan tadi, kan?

199. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDI SUTRESNA [23:27]

Betul, Pak, Yang Mulia.

200. KETUA: SUHARTOYO [23:27]

Ada yang ditambahkan, Bapak?

201. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDI SUTRESNA [23:28]

Tidak ada, sudah cukup.

202. KETUA: SUHARTOYO [23:32]

Kami ke saksi dulu, ya, nanti Ahli terakhir saja.
Saksi Termohon Pak Kamal Hendraya ya, mau menjelaskan apa?

203. SAKSI DARI TERMOHON: KAMAL HENDRAYA [23:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya saksi kebetulan juga Ketua PPK Kecamatan Regol. Apa yang tadi disampaikan dari Pemohon, untuk di wilayah Regol, kami sudah menyelenggarakan dari mulai tahapan rekapitulasi dari mulai tanggal 18 sampai tanggal 25 dan dalam penyelenggaraan rekapitulasi tingkat kecamatan, dihadiri dari seluruh saksi partai politik juga dari panwascam (...)

204. KETUA: SUHARTOYO [24:13]

Ada persoalan apa di sana, Pak?

205. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD NURHIDAYAT [24:17]

Untuk persoalan tidak ada.

206. KETUA: SUHARTOYO [24:17]

Tidak ada, ya (...)

207. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD NURHIDAYAT [24:17]

Yang Mulia.

208. KETUA: SUHARTOYO [24:18]

Semua tanda tangan?

209. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD NURHIDAYAT [24:19]

Semua tanda tangan, Yang Mulia.

210. KETUA: SUHARTOYO [24:20]

Tidak ada yang keberatan?

211. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD NURHIDAYAT [24:21]

Tidak ada yang keberatan, Yang Mulia.

212. KETUA: SUHARTOYO [24:24]

Arif Firman Suntara, apa, Pak, yang mau dijelaskan, Pak? Pak Arif, Pak Arif, itu kan kursinya tengah kosong, itu kenapa enggak ke depan dari tadi? Silakan, Pak.

213. SAKSI DARI TERMOHON: ARIF FIRMAN SUNTARA [24:50]

Terima kasih, Yang Mulia, Perkenalkan saya Arif Firman Suntara, dari PPK Kecamatan Kiaracondong. Saya menyampaikan sesuai dengan Saksi Pemohon yang sampaikan ke Kecamatan Kiaracondong itu ada 7 TPS dari 392 TPS yang ada di Kecamatan Kiaracondong, sehingga yang 7 TPS ini masuk ke dalam gugatan mereka, sehingga kami perlu klarifikasi bahwa dalam 7 TPS ini dua TPS di kami C.Hasil dengan D.Hasil itu sesuai, dan 5 TPS yang ada di kami itu telah terjadi koreksi dikarenakan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah dengan data pemilih yang ada di TPS tersebut itu melebihi, sehingga kami sepakati sesuai dengan panwascam, para saksi, serta saksi Pemohon, dan juga saksi terkait, semua menyetujui untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang untuk 5 TPS tersebut, sehingga terjadi perubahan di beberapa (...)

214. KETUA: SUHARTOYO [26:05]

Sudah dilakukan?

215. SAKSI DARI TERMOHON: ARIF FIRMAN SUNTARA [26:08]

Sudah dilakukan dan sesuai dengan dan hasilnya itu disepakati.

216. KETUA: SUHARTOYO [26:12]

Hasilnya ada yang keberatan, Pak?

217. SAKSI DARI TERMOHON: ARIF FIRMAN SUNTARA [26:14]

Tidak ada.

218. KETUA: SUHARTOYO [26:16]

Tanda tangan semua?

219. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD NURHIDAYAT [26:17]

Kecuali saksi dari Pemohon, dikarenakan atas perintah dari partai.

220. KETUA: SUHARTOYO [26:23]

Tidak tanda tangan, tapi hadir?

221. SAKSI DARI TERMOHON: ARIF FIRMAN SUNTARA [26:26]

Hadir, Pak.

222. KETUA: SUHARTOYO [26:27]

Pak, ini diganti Ibu, ya? Pak Hadianto, diganti siapa, Pak?

223. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [26:37]

Untuk dari hadir, silakan, Pak kalau Ibu Aneu, untuk KPU Provinsi Jawa Barat Pak.

224. KETUA: SUHARTOYO [26:44]

Ganti siapa? Ganti Pak Ahmad? Ganti siapa tadi?

225. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [26:49]

Namanya Pak Hadianto.

226. KETUA: SUHARTOYO [26:51]

Yang diganti siapa?

227. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [26:53]

Yang diganti Rizal, yang sebelumnya dari PPK Sukasari.

228. KETUA: SUHARTOYO [26:59]

Sekarang siapa yang didengar?

229. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [27:01]

Pak Hadianto untuk PPK Kecamatan Andir.

230. KETUA: SUHARTOYO [27:06]

Silakan, baik.

231. SAKSI DARI TERMOHON: HADIANTO

Baik, Yang Mulia. Izin, nama saya Hadianto, Jabatan Ketua PPK Andir. Saya menyampaikan selama proses rekapitulasi tingkat kecamatan saksi Pemohon hadir dan menyetujui, serta menandatangani berita acara. Setiap proses yang kami laksanakan di Pleno Kecamatan Andir dari mulai pembacaan C.Hasil di tiap TPS, itu setiap ada koreksi dan keberatan dari saksi langsung diperbaiki di sirekap dan itu semua sudah dilaksanakan oleh semua saksi dan dari kami sebagai penyelenggara. Dari tahap awal sampai dengan tahap akhir penetapan pleno tingkat kecamatan, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan, dan itu saksi Pemohon menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat kecamatan.

Demikian, Yang Mulia.

232. KETUA: SUHARTOYO [28:16]

Oke, terus lanjut, Pak Cepi, ya? Pak?

233. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [28:16]

Betul, Yang Mulia, dari KPU Kota Bandung.

234. KETUA: SUHARTOYO [28:21]

Silakan, apa yang mau dijelaskan, Pak Cepi ini?

235. SAKSI DARI TERMOHON: CEPI ADI SETIADI [28:21]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan tentang fakta rekap pleno di tingkat kota, itu mekanismenya semua kecamatan membacakan D.Hasil yang sudah ditetapkan di kecamatan. Setelah dibacakan, maka kami sebagai pimpinan pleno memberikan kesempatan kepada semua saksi yang hadir dan panwas yang hadir untuk melakukan koreksi atau ada kebaratan. Itu semuanya 30 kecamatan diberikan kesempatan untuk dikoreksi dan diperbaiki. Nah, pada hari terakhir, tanggal 4 Maret itu, saksi Pemohon memberikan keberatan hanya di 3 TPS. Bukan di 60 TPS, tapi hanya 3 TPS. Itu di TPS 2 Cibangkong, TPS 23 Maleer, TPS 48 Binong, di 1 Kecamatan Batununggal. Itu pun saya sebagai pimpinan pleno menawarkan, untuk dilakukan sanding data agar bisa dikoreksi. Tapi saksi Pemohon tidak bersedia, itu pun ditegaskan oleh Bawaslu Kota Bandung agar semua kekeliruan dikoreksi, diperbaiki pada saat pleno Kota Bandung, tapi lagi-lagi saksi Pemohon tidak bersedia, terima kasih.

236. KETUA: SUHARTOYO [29:44]

Yang terkait dengan rekomendasi itu, Pak?

237. SAKSI DARI TERMOHON: CEPI ADI SETIADI [29:48]

Itu rekomendasi dari Bawaslu Provinsi ke KPU Provinsi, saat Pleno Kota Bandung tidak ada.

238. KETUA: SUHARTOYO [29:55]

Tidak ada, ya?

239. SAKSI DARI TERMOHON: CEPI ADI SETIADI [29:56]

Enggak ada.

240. KETUA: SUHARTOYO [29:57]

Terakhir Ibu, ya. Apa yang mau dijelaskan?

241. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [30:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin menjelaskan bagaimana rekap di KPU Provinsi. Jadi, saat rekap di KPU Provinsi, saksi dari Nasdem mengajukan keberatan. Waktu itu diterima oleh KPU Provinsi, tapi setelah kita dirundingkan, keberatan, dan dilihat isi keberatannya

adalah penyandingan C.Hasil dan D.Hasil. Sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2024, dan Undang-Undang 7/2017, kalau penyandingan di rekap KPU Provinsi itu hanya bisa sampai satu tingkat di bawahnya, artinya hanya sampai di D.Kabupaten/Kota. Akhirnya, kami Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, mengembalikan keberatan ke Saksi Nasdem. Setelah itu Saksi Nasdem membuat laporan ke Bawaslu Jabar, lalu dilakukanlah sidang pemeriksaan acara cepat oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Setelah itu, dalam rekap yang kita laksanakan, jadi KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan rekap dari tanggal 6 sampai tanggal 18 Maret. Waktu itu, kita, KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, KPU Kota Bandung, Bawaslu Kota Bandung, dan saksi dari Partai Nasdem bersama-sama melaksanakan pemeriksaan acara cepat. Yang diperkarakan adalah ada di 60 TPS, untuk 59 Kota Bandung, dan 1 Kota Cimahi, dan 105 di ... untuk perkara permohonan untuk Partai Golkar, begitu.

Lalu setelah dilakukan pencermatan apa ... setelah dilaksanakan sidang acara cepat, waktu itu putusannya tadi sudah dibacakan adalah kewajiban kami untuk melakukan pencermatan dari C-Hasil ke D-Hasil melalui Sirekap.

242. KETUA: SUHARTOYO [32:05]

Sudah dilakukan, Ibu?

243. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [32:05]

Sudah dilakukan, Pak.

244. KETUA: SUHARTOYO [32:07]

Sampai selesai?

245. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [32:08]

Sampai selesai.

246. KETUA: SUHARTOYO [32:09]

Sesuai dengan perintah Bawaslu ini?

247. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [32:11]

Ya, dilakukan pencermatan untuk 60 TPS, tepatnya 59 karena kota Cimahi tidak (...)

248. KETUA: SUHARTOYO [32:18]

Sudah dilakukan?

249. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [32:19]

Sudah, Pak.

250. KETUA: SUHARTOYO [32:20]

Kemudian hasilnya seperti apa?

251. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [32:22]

Hasilnya, karena awal putusan Bawaslu itu, ketika Bawaslu melaksanakan pemeriksaan arah cara cepat, itu hanya berhasil di 32 TPS yang sudah dilakukan pencermatan oleh Bawaslu. Dari 32 TPS, itu 26 terdapat penghitungan suara ulang, itu dibuktikan oleh LHP Panwascam, yang waktu itu dibawa oleh Bawaslu Kota Bandung, dan 6 terbukti salah hitung, dan ada yang 1 TPS, yaitu Bandung Kulon, itu sudah terkonfirmasi di LHP Panwascam. Nah, dari 59, yang terkonfirmasi 32, artinya masih ada sisa 27 yang kemudian kita lakukan pencermatan setelah Putusan Bawaslu itu. Dari 27 sudah terkonfirmasi, jadi yang terkonfirmasi itu 21, itu terkonfirmasi oleh D.Kejadian khusus yang diserahkan oleh KPU Kota Bandung, yang 6 itu belum terkonfirmasi karena rata-rata kebanyakan tidak ada C.Hasil di sirekap.

252. KETUA: SUHARTOYO [33:26]

Yang belum terkonfirmasi berapa?

253. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [33:38]

6.

254. KETUA: SUHARTOYO [33:40]

6 apa?

255. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [33:39]

6 TPS.

256. KETUA: SUHARTOYO [33:44]

Sampai sekarang belum?

257. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [33:47]

Sampai sekarang sudah, sepertinya Kota Bandung sudah melakukan pembukaan kotak.

258. KETUA: SUHARTOYO [33:51]

Yang 6 TPS itu sudah?

259. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [33:51]

Ya, sudah.

260. KETUA: SUHARTOYO [33:53]

Sudah?

261. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [33:53]

Sudah.

262. KETUA: SUHARTOYO [33:55]

Yang katanya tidak ada data pembanding tadi?

263. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [33:56]

Itu pas waktu pencermatan di KPU di Bawaslu.

264. KETUA: SUHARTOYO [33:59]

Terus sekarang sudah menggunakan data pembanding?

265. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [34:02]

Ya, KPU Kota Bandung setelah ini masuk perkara MK, KPU RI mengeluarkan surat untuk pembukaan kotak, sepertinya KPU Kota Bandung sudah melakukan pencermatan.

266. KETUA: SUHARTOYO [34:13]

Sepertinya, ini harus pasti Ibu di sini.

267. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [34:15]

Karena yang melakukan pencermatan KPU Kota Bandung, Pak.

268. KETUA: SUHARTOYO [34:23]

Jadi apa yang masih tersisa dengan rekomendasi Bawaslu itu?

269. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [34:22]

Tidak ada karena rekomendasi Bawaslu di poin 2 itu adalah memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pencermatan data yang terbuat dalam C.Hasil dan D.Hasil yang ada dalam sistem informasi rekapitulasi KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan pelanggaran administrasi melalui acara cepat yang dilaporkan pelapor. Artinya kita sudah melakukan pencermatan itu dan surat tindak lanjut pencermatan yang kita lakukan itu tertuang dalam surat Nomor 214/PL.01.8.

270. KETUA: SUHARTOYO [35:02]

Bukti berapa itu? Bukti T-nya berapa?

271. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [35:10]

Untuk bukti T-10 hasil pencermatan, T-24 untuk surat keterangan dari KPU Kota Bandung. Jadi kami juga menyodorkan surat keterangan dari KPU Kota Bandung pada bukti T-024 terkait pencermatan dan penyandingan data C.Hasil dan C.Hasil pascapembukaan kotak suara.

272. KETUA: SUHARTOYO [35:34]

Jadi sudah tidak ada lagi, ya? yang tersisa Ibu untuk rekomendasi ini?

273. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [35:38]

Ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada kita sudah menindak lanjut.

274. KETUA: SUHARTOYO [35:48]

Oke dari (...)

275. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [35:59]

Sebagai tambahan, Yang Mulia. terkait dengan adanya koreksi apa ... data dari C.Hasil ke D.Hasil berdasarkan rapat Pleno, kami juga mengajukan bukti T-007 kumpulan surat keterangan dari PPK, ada PPK Kecamatan Arcamanik, Lengkung, dan seterusnya sampai dengan 20 PPK yang ada di Kota Bandung yang menceritakan koreksi dari C.Hasil ke D.Hasil berdasarkan rapat pleno karena ada keberatan atau kesepakatan bersama termasuk panwascam setempat. Terima kasih, Yang Mulia.

276. KETUA: SUHARTOYO [36:40]

Jadi kalau melaksanakan rekomendasi yang seperti ini tidak perlu disaksikan oleh para peserta?

277. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [36:51]

Jadi Pihak Terkait dihadirkan, Pak, saksi dari Partai Nasdem waktu itu.

278. KETUA: SUHARTOYO [36:58]

Di mana tanda tangannya atau persetujuannya?

279. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [37:00]

Oh tidak, Pak.

280. KETUA: SUHARTOYO [37:01]

Tidak.

281. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [37:01]

Karena itu tindak lanjut saja. Karena di (...)

282. KETUA: SUHARTOYO [37:04]

Terus apa esensi diminta hadir untuk apa, kalau tidak membubuhkan persetujuan atau hasil?

283. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [37:12]

Jadi ... apa ... itu kan kewenangan di Bawaslu provinsi, Pak. Jadi menghadiri untuk melakukan, kan dibuka Sirekap, Pak, prosesnya itu Sirekap dibuka.

284. KETUA: SUHARTOYO [37:24]

Ya. Artinya, apa esensinya dihadirkan, kemudian tidak memberikan persetujuan hasil daripada tindakan pada hari itu ataupun untuk menyaksikan saja?

285. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [37:40]

Menyaksikan saja.

286. KETUA: SUHARTOYO [37:41]

Tapi tidak membubuhkan tanda tangan.

287. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [37:43]

Tidak.

288. KETUA: SUHARTOYO [37:44]

Baik. Kemudian dari Pihak Terkait, Cucu Sukmana.

289. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CUCU SUKMANA [37:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

290. KETUA: SUHARTOYO [37:51]

Mau menjelaskan apa, Pak?

291. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CUCU SUKMANA [37:52]

Proses rekapitulasi perhitungan suara di Kota Bandung.

292. KETUA: SUHARTOYO [37:56]

Bapak sebagai apa?

293. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CUCU SUKMANA [37:58]

Saya sebagai Saksi Pleno dari Partai Golkar di Kota Bandung.

294. KETUA: SUHARTOYO [38:02]

Di tingkat apa, Bapak?

295. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CUCU SUKMANA [38:04]

Kota Bandung.

296. KETUA: SUHARTOYO [38:05]

Kota Bandung. Apa yang mau dijelaskan?

297. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CUCU SUKMANA [38:08]

Tentang proses rekapitulasi perhitungan suara di Pleno di partai ... apa ... di Kota Bandung.

298. KETUA: SUHARTOYO [38:16]

Apa yang mau dijelaskan?

299. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CUCU SUKMANA [38:18]

Baik, Yang Mulia. Kami ... saya sampaikan apa yang kami lihat, kami dengar, dan kami saksikan dalam proses perhitungan selama lima hari. Selama hari pertama dan hari keempat proses perhitungan dilaksanakan di 27 kecamatan. Partai Nasdem tidak ada keberatan dan laporan dari D.Hasil Kecamatan yang kami terima sebagai Saksi Pleno Partai Golkar di tingkat kota, semua Dokumen D-1 Kecamatan ditandatangani oleh Partai Nasdem.

300. KETUA: SUHARTOYO [38:52]

Waktu di tingkat kota itu, saksinya Pemohon hadir?

301. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CUCU SUKMANA [38:59]

Hadir, kebetulan (...)

302. KETUA: SUHARTOYO [39:00]

Hadir.

303. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CUCU SUKMANA [39:01]

Sebelahan dengan saya sendiri.

304. KETUA: SUHARTOYO [39:01]

Tidak keberatan juga?

305. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CUCU SUKMANA [39:02]

Tidak keberatan.

306. KETUA: SUHARTOYO [39:03]

Tanda tangan juga?

307. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CUCU SUKMANA [39:04]

Tanda tangan dari apa ... Dokumen D.Hasil Kecamatan yang dibacakan oleh (...)

308. KETUA: SUHARTOYO [39:10]

Ya, sudah Pak, cukup, Pak.
Saksi Dani Nurjaman.

309. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [39:14]

Ya.

310. KETUA: SUHARTOYO [39:15]

Apa yang mau dijelaskan, Pak? Bapak Saksi juga?

311. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [39:17]

Saksi dari Kecamatan Batununggal, Pak. Dari Partai Golkar.

312. KETUA: SUHARTOYO [39:26]

Apa yang Bapak saksikan ketika itu?

313. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [39:29]

Baik. Bismillahirrahmanirrahim.

314. KETUA: SUHARTOYO [39:30]

Di tingkat mana, Pak?

315. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [39:31]

Di kecamatan.

316. KETUA: SUHARTOYO [36:33]

Kecamatan.

317. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [39:33]

Kecamatan Batununggal.

318. KETUA: SUHARTOYO [39:36]

Oke, ya. Yang disaksikan apa ketika (...)

319. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [39:38]

Baik, Yang Mulia. Saya izin ... izin bahwa saya memberikan keterangan kejadian pelaksanaan perhitungan rekapitulasi di Kecamatan

Batununggal bahwa ada beberapa TPS yang dibuka kotaknya, yaitu Kelurahan Binong, Kelurahan Gumuruh, dan Kelurahan Maleer, dan Cipaku (...)

320. KETUA: SUHARTOYO [40:03]

Ini yang dipersoalkan oleh Pemohon, bukan?

321. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [40:05]

Ya.

322. KETUA: SUHARTOYO [40:06]

Oke, lanjutkan.

323. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [40:08]

Sebenarnya permasalahannya itu sama jadi adanya jumlah suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih. Jadi si pencoblos mencoblos partai dan mencoblos calegnya dihitung dua, otomatis jumlah suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan juga (...)

324. KETUA: SUHARTOYO [40:40]

Ya. Itu di kecamatan (...)

325. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [40:42]

Kecamatan Batununggal.

326. KETUA: SUHARTOYO [40:43]

Batununggal, terus apa yang ... proses yang dilakukan di situ, Pak?

327. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [40:47]

Proses yang dilakukan di sini, yaitu akhirnya berembuk semua antara PPK, PPS, dan Para Saksi untuk membuka kotak suara dan

hasilnya adalah akhirnya ketahuan bahwa ada pencoblosan partai dengan caleg dihitung dua.

328. KETUA: SUHARTOYO [41:11]

Terus akhirnya di?

329. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [41:12]

Akhirnya ditetapkan di sirekap hasilnya dan disetujui oleh Para Saksi dan ditanda tangan.

330. KETUA: SUHARTOYO [41:23]

Ada Saksinya Pemohon?

331. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [41:26]

Ada, kalau untuk di Kecamatan Batununggal, kebetulan Saksi Pemohon itu tidak hadir.

332. KETUA: SUHARTOYO [41:32]

Tidak hadir.

333. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [41:33]

Bukan tidak hadir, hadir tapi pas pelaksanaan penandatanganan dia tidak ada.

334. KETUA: SUHARTOYO [41:37]

Bukan keberatan?

335. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [41:39]

Tidak pernah ada keberatan dari Saksi Pemohon, Dari awal sampai (...)

336. KETUA: SUHARTOYO [41:44]

Saksi lain?

337. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [41:45]

Kalau saksi lain ada, dari saksi PDI, saksi (...)

338. KETUA: SUHARTOYO [41:49]

Bukan maksudnya yang keberatan?

339. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANI NURJAMAN [41:51]

Oh, enggak ada. Enggak ada yang keberatan.

340. KETUA: SUHARTOYO [41:53]

Saksi Ricky, apa yang dijelaskan?

341. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [41:59]

Bismillahirrahmaaniirrahim. Baik, Yang Mulia.

Saya mau menjelaskan tentang proses penghitungan surat sua ... penghitungan untuk Pleno di tingkat Kecamatan Kiaracondong. Jadi saya sebagai Saksi yang diberikan mandat oleh Partai Golkar, dari tanggal 18 Februari 2024 sampai berlangsung selama 10 hari.

Pertama, memang ada beberapa kejadian khusus di beberapa TPS di Kecamatan Kiaracondong. Ada tujuh TPS yang memang dipermasalahkan oleh Pihak Pemohon. Itu (...)

342. KETUA: SUHARTOYO [42:41]

Apa yang dipersoalkan, Pak?

343. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [42:43]

Dari untuk suara ... apa namanya ... suara sah dan tidak sah itu memang ada perbedaan dengan surat suara yang digunakan.

344. KETUA: SUHARTOYO [42:55]

Akhirnya diselesaikan ataukah waktu itu (...)

345. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [42:57]

Ya, langsung diselesaikan.

346. KETUA: SUHARTOYO [42:58]

Selesaikan?

347. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [42:59]

Ya.

348. KETUA: SUHARTOYO [43:00]

Pemohon bisa terima?

349. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [43:02]

Bisa, itu memang kita sudah menyepakati semuanya.

350. KETUA: SUHARTOYO [43:06]

Oh, termasuk Pemohon, Saksinya?

351. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [43:08]

Ya, itu dari awal sampai akhir, cuma pas di penandatanganan (...)

352. KETUA: SUHARTOYO [43:13]

Tapi akhirnya bisa menerima, ya?

353. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [43:15]

Ya, cuma di akhir memang beliau tidak hadir untuk menandatangani.

354. KETUA: SUHARTOYO [43:22]

Di akhir itu kapan? Di hari terakhir?

355. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [43:24]

Di hari terakhir.

356. KETUA: SUHARTOYO [43:25]

Tapi di tengah pernah keberatan?

357. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [43:27]

Belum ada pernah satu pun, Pak.

358. KETUA: SUHARTOYO [43:29]

Bukan langsung di tengah, di proses, di tengah ada keberatan dia?

359. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [43:33]

Tidak ada, Pak.

360. KETUA: SUHARTOYO [43:34]

Saksinya Pemohon?

361. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [43:35]

Ya.

362. KETUA: SUHARTOYO [43:35]

Tidak?

363. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIKY [43:36]

Tidak ada.

364. KETUA: SUHARTOYO [43:39]

Saksi Nabhan.

365. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NABHAN RIZQULLAH [43:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya Nabhan Rizqullah, yang diberikan mandat oleh Partai Golkar sebagai Saksi Kecamatan Lengkong, Saksi Partai Golkar Kecamatan Lengkong.

Selama forum, memang terdapat beberapa kejadian, salah satunya yang mungkin dipermasalahkan oleh Pemohon itu di TPS 32 Turangga. Nah, di situ terdapat laporan dari salah satu, terdapat laporan daripada saksi TPS, maaf, laporan daripada saksi kecamatan, yang mendapatkan laporan dari saksi TPS bahwasanya terdapat perbedaan perhitungan di TPS dan di Kecamatan Lengkong, sehingga disepakati oleh para saksi partai kemudian PPK (...)

366. KETUA: SUHARTOYO [44:41]

Di tingkat mana ini?

367. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NABHAN RIZQULLAH [44:42]

Di tingkat Kecamatan Lengkong.

368. KETUA: SUHARTOYO [44:43]

Lengkong.

369. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NABHAN RIZQULLAH [44:44]

Ya. Nah, itu atas rekomendasi panwascam juga, kita lakukan pembukaan kotak suara. Nah, memang setelah pembukaan itu didapati ada perbedaan cara perhitungan yang tadi seperti pencoblosan partai dengan caleg itu dihitung dua, seharusnya satu.

370. KETUA: SUHARTOYO [45:05]

Sudah dilakukan koreksi semua?

371. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NABHAN RIZQULLAH [45:06]

Sudah dilakukan koreksi sehingga disepakati oleh semua pihak yang hadir dan ditandatangani juga seperti itu.

372. KETUA: SUHARTOYO [45:15]

Tidak ada yang keberatan?

373. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NABHAN RIZQULLAH [45:16]

Tidak ada yang mengajukan keberatan. Terima kasih, Yang Mulia.

374. KETUA: SUHARTOYO [45:20]

Baik. Dari Olih Arpan.

375. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: OLIH ARPAN [45:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Olih Arpan Saksi Partai Golkar yang ditugaskan di Kecamatan Sumur Bandung, pada saat rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Sumur Bandung, ada kejadian khusus di jenis pemilihan DPR Kelurahan Merdeka TPS 25, ada kesalahan tulisan DPT, setelah itu ada keberatan dari saksi PDI Perjuangan dan PKS meminta dihitung ulang dan dibuka kotak suara atas permasalahan tersebut lalu para saksi, Parpol, PPK, dan Panwascam sepakat semuanya untuk dibuka kotak suara dan dihitung ulang. Setelah dilakukan perhitungan surat suara ulang langsung dikoreksi atau dibetulkan kembali oleh Ketua PPK, Panwascam, PPS, dan para saksi dari partai masing-masing. Setelah selesai semua saksi menyepakati Ketua PPK dan Panwascam, PPS atau pembetulan sesuai dengan tercantum di D.Hasil kecamatan. Setelah selesai, sepakat, dan ditandatangani, hasilnya telah sesuai lagi, jadi sudah enggak ada permasalahan, selesai. Terima kasih, Yang Mulia.

376. KETUA: SUHARTOYO [47:24]

Semua bisa terima?

377. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: OLIH ARPAN [47:25]

Semua bisa terima ditandatangani oleh 14 saksi partai (...)

378. KETUA: SUHARTOYO [47:31]

Saksi Termohon, ada?

379. SAKSI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: OLIH ARPAN [47:33]

Ada tanda tangan, tanda tangan 14 partai. Terima kasih.

380. KETUA: SUHARTOYO [47:50]

Baik, dari Bawaslu, Pak, waktu itu bagaimana bisa menjelaskan, Ibu?

381. BAWASLU: NURYAMAH [47:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Bawaslu, memang pada saat rekap, dari Partai Nasdem menyampaikan laporan terkait yang tadi sudah disampaikan dan tentu Bawaslu langsung menindaklanjutinya, dan keluar putusannya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh saksi Pemohon, Yang Mulia, jadi saya tidak perlu menyampaikan. Dan selanjutnya juga KPU pun menyampaikan kembali surat kepada kita menindaklanjuti atas putusan yang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu. Bahkan kita pun sudah melampirkan untuk bukti-buktinya dari mulai Bukti LHP kita pada saat melakukan ... apa namanya ... pengawasan rekap pun pada saat melakukan pengawasan tindaklanjutnya tersebut.

Begitu, Yang Mulia.

382. KETUA: SUHARTOYO [48:43]

Jadi dari Bawaslu menganggap bahwa rekomendasi itu sudah dilaksanakan semua?

383. BAWASLU: NURYAMAH [48:49]

Kami sudah melihat dari apa yang menjadi jawaban KPU dan memang ada beberapa yang tidak dilakukan seperti tadi yang disampaikan oleh KPU Provinsi, tetapi sudah dituangkan di ... di kejadian khusus dan ini juga sudah disampaikan pada saat rekap tingkat nasional.

384. KETUA: SUHARTOYO [49:14]

Jadi sudah selesai dengan dimuatnya di bagian ... di ... apa ... di keberatan khusus itu?

385. BAWASLU: NURYAMAH [49:23]

Sudah selesai.

386. KETUA: SUHARTOYO [49:25]

Semua persoalan sudah ... sudah dianggap selesai?

387. BAWASLU: NURYAMAH [49:27]

Untuk yang lain seperti yang tadi disampaikan oleh ... apa ... KPU Provinsi memang kami dari provinsi ... dari Bawaslu Provinsi tidak mendapatkan laporan secara komprehensif, tetapi (...)

388. KETUA: SUHARTOYO [49:42]

Laporan yang komprehensif dari mana yang Ibu maksud?

389. BAWASLU: NURYAMAH [49:44]

Soal beberapa hal yang belum selesai yang dituangkan di kejadian khusus.

390. KETUA: SUHARTOYO [49:51]

Oh, artinya karena tidak komprehensif kenapa disimpulkan sudah selesai?

391. BAWASLU: NURYAMAH [49:57]

Karena kita sudah membawa di tingkat nasional sehingga kami rasa ini sudah menjadi bagian daripada ... apa ... rekap di tingkat nasional.

392. KETUA: SUHARTOYO [50:07]

Artinya, apakah masih tersisa atau tidak itu menjadi pertimbangan nas ... apa ... rekapitulasi nasional, gitu?

393. BAWASLU: NURYAMAH [50:17]

Betul, Yang Mulia.

394. KETUA: SUHARTOYO [50:19]

Suratnya yang seperti apa itu Ibu yang diterima dari KPU itu?

395. BAWASLU: NURYAMAH [50:22]

Mohon izin, Yang Mulia, disini Nomor 214/PL01.08, intinya adalah tindak lanjut pusu ... putusan pemeriksaan cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

396. KETUA: SUHARTOYO [50:38]

Kalau yang surat keterangan KPU Kota Bandung? Terkait pencermatan dan penyandingan data C.Hasil dan D. Dapat enggak dari?

397. BAWASLU: MUHAMAD SOPIAN [50:54]

Terima kasih, Pimpinan ... eh maaf, Yang Mulia. Untuk rekapitulasi di Kota Bandung pada saat itu dilakukan di gudang KPU, Yang Mulia. Jadi pada saat itu kami memang tidak mendapatkan kabar dari Bawaslu Kota eh ... maaf, KPU Kota Bandung. Kami mendapatkan kabar bahwa ada rekapitulasi itu saat malam hari.

Begitu, Yang Mulia.

398. KETUA: SUHARTOYO [51:22]

Yang terkait dengan surat itu tadi, Pak? Surat keterangan ini yang ... bukan yang 214, tapi yang tidak ada nomornya ini, yang melakukan penyandingan.

399. BAWASLU: MUHAMAD SOPIAN [50:41]

Mohon maaf, Yang Mulia, kami tidak mendapatkan dari KPU Kota Bandung.

400. KETUA: SUHARTOYO [51:43]

Enggak dapat, ya? Dari Pak Yulianto, apa yang mau dijelaskan, Pak? Silakan, Pak, waktunya 5 menit. Ahlinya Pemohon.

401. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [52:00]

Yang Mulia, izin dari Termohon. Untuk ... kami dari Termohon boleh menanyakan kepada Saksi Hukum?

402. KETUA: SUHARTOYO [52:08]

Nanti, nanti kami beri kesempatan.

403. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [52:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

404. KETUA: SUHARTOYO [52:08]

Silakan, Ahli dulu.

405. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULIANTO [52:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi. Yang saya hormati Pemohon atau Kuasa Hukumnya, Termohon atau Kuasa Hukumnya, Pihak Terkait atau Kuasa Hukumnya, dan juga saya hormati pemberi keterangan yang hadir di sidang pada kesempatan kali ini.

Izinkan saya menyampaikan pendapat saya mengenai persoalan yang diperselisihkan dalam Perkara Nomor 90 ini, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023.

Persoalan yang melatar belakangi perselisihan ini, yaitu tadi sudah sama-sama mendengarkan, menyimak, saya menangkap bahwa ini berkaitan dengan tindak lanjut oleh KPU Provinsi Jawa Barat dan juga oleh KPU Republik Indonesia, terhadap putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2024.

Bahwa sebagaimana tadi diterangkan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima, memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh pelapor. Dalam hal ini, Pemohon, mengenai adanya pengurangan hasil suara yang diperoleh Pemohon dan yang kedua, penggelembungan hasil suara yang diperoleh Pihak Terkait dan terhadap laporan dimaksud Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memutuskan yang tadi pada intinya (...)

406. KETUA: SUHARTOYO [52:15]

Ya.

407. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULIANTO [52:16]

Menyatakan terlapor terbukti kemudian, memerintahkan KPU untuk melakukan beberapa hal yang tadi juga sudah disampaikan dalam batas waktu sampai dengan rekap tingkat provinsi Jawa Barat berlangsung.

Saya akan menyampaikan beberapa hal, Yang Mulia. Berkaitan dengan masalah penegakan hukum untuk pelaksanaan pemilu yang demokratis, kemudian tugas dan wewenang Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Lalu (...)

408. KETUA: SUHARTOYO [54:41]

Singkat-singkat saja, Pak.

409. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULIANTO [52:42]

Baik.

410. KETUA: SUHARTOYO [54:43]

Silakan, langsung saja.

411. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULIANTO [54:49]

Kewajiban pelaksanaan putusan dan akses keadilan. Terkait dengan hal tersebut, Yang Mulia, saya kira pada poin pentingnya, untuk pemilu demokratis setidaknya ada beberapa hal kalau saya mengutip pendapat Prof. Ramlan itu, yang pertama, berkaitan dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturannya. Kemudian, setiap tahapan ada proses secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai asas pemilu di Indonesia. Kemudian, yang ketiga, kaitannya dengan sistem pengawasan dan yang keempat, berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa dan prosedur atas keputusan yang adil, saya kira di situ. Dan kepada ... apa ... proses ini, di Undang-Undang 7 Tahun 2017, sudah ada aturan mengenai penyelenggara DKPP, Bawaslu dan KPU sebagai konsep check and balances, saling kontrol, saya kira itu yang terpenting. Sehingga, ketika ada kesalahan pada satu institusi bisa dikontrol dan dibetulkan oleh pihak lainnya atau terjadi penyimpangan kemudian dipulihkan, ini bagian dari pelaksanaan itu, maka ada pembagian tugas antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Selanjutnya, sebagai lembaga negara yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pemilu,

saya kira KPU, Bawaslu, dan DKPP ini terikat dengan hukum, kemudian juga mesti melaksanakan aturan, semua yang terlibat dalam proses pemilu untuk menghormati hukum bersikap jujur dan bertindak secara adil sesuai dengan aturan perundang-undangan. Saya kira itu yang terpenting.

Kemudian dalam konteks tersebut, ada beberapa hal yang penting untuk menghormati hukum, baik tertulis, tidak tertulis, dalam bentuk peraturan, termasuk juga dalam hal ini adalah putusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga yudisial, maupun lembaga kuasi yudisial. Dalam hal ini, di kepemiluan, ada Bawaslu, ada DKPP, jadi ini putusannya juga harus dihormati dan dilaksanakan dalam hal tidak menerima atau menolak atau melakukan perlawanan, ini diperbolehkan melalui mekanisme yang disediakan, ya ada mekanisme koreksi administratif atau ke pengadilan tata usaha negara ataupun ke tempat lain yang memang secara tata cara mekanisme itu disediakan (...)

412. KETUA: SUHARTOYO [57:29]

Ya, singkatnya, Bapak.

413. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULIANTO [57:29]

Dalam hal itu tidak dilakukan, Yang Mulia (...)

414. KETUA: SUHARTOYO [57:32]

Singkatnya, Bapak.

415. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULIANTO [57:32]

Ya, saya kira dalam hal itu tidak dilakukan, maka dianggap menerima dan harus patuh, dan dalam konteks perkara ini, yang saya lihat secara normatif aturan perundang-undangan, Bawaslu sudah membuat putusan, maka KPU harus menindaklanjuti dan itu tindaklanjut harus sesuai dengan aturan perundang-undangan, dalam konteks rekapitulasi ada beberapa yang saya kira (...)

416. KETUA: SUHARTOYO [57:59]

Ya, sudah cukup, Pak, jadi menurut Ahli, apakah dalam konteks ini KPU belum menindaklanjuti?

417. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULIANTO [58:06]

Saya tidak tahu secara apa, proses kasus per kasus, tapi dalam pandangan saya, dia harus menindaklanjuti sesuai aturan perundang-undangan pada ... sesuai dengan aturan itu, harusnya 3 hari sejak putusan dijatuhkan itu ada normanya di Undang-Undang (...)

418. KETUA: SUHARTOYO [58:27]

Ya.

419. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULIANTO [58:27]

Pemilu. Atau yang kedua, pada saat rekap, para saksi maupun pengawas pemilu punya hak untuk menyampaikan keberatan dan ada kewajiban bagi KPU di setiap jenjang untuk menindaklanjuti dan melaksanakan keberatan tersebut (...)

420. KETUA: SUHARTOYO [58:49]

Cukup?

421. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULIANTO [58:49]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

422. KETUA: SUHARTOYO [58:51]

Baik, dari Pak Fritz, silakan.

423. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRITZ EDWARD SIREGAR

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi. Apa yang saya sampaikan ini, Yang Mulia merupakan satu kesatuan dengan dokumen dan presentasi yang sudah saya sampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Saya memiliki 4 pokok pikiran yang pertama adalah:

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan satu kesatuan proses.
2. Pengawasan berjenjang pengawas pemilu.
3. Penanganan pelanggaran administrasi dengan acara cepat.

4. Putusan Bawaslu Jawa Barat memiliki cacat secara signifikan.

Untuk yang pertama, saya singkat bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan satu kesatuan proses. Dari ini saya bisa sampaikan dari PPT ini bahwa proses penghitungan suara di TPS sampai dengan rekapitulasi suara secara nasional merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dilepaskan, termasuk bilamana ditemukan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu, proses rekapitulasi, hasil perolehan penghitungan suara di tingkat kecamatan diatur melalui Pasal 378 Undang-Undang Pemilu.

Next, apabila kita membaca dokumen yang telah disampaikan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan juga oleh Bawaslu, maka kita bisa melihat bahwa terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di berbagai kecamatan, kita melihat adanya upaya dari penyelenggara pemilu atas masukan dari panwaslu, ataupun dari saksi bahwa adanya sebuah penyelesaian, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian baik jumlah ataupun kesalahan penghitungan.

3. Next. Hal yang kedua mau saya sampaikan, Yang Mulia. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ini terkait dengan topik kedua, pengawasan berjenjang pengawas pemilu. Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam menerbitkan putusan pelanggaran administrasi cepat dengan menegasikan hasil kerja jajaran di bawahnya. Apabila kita membaca keterangan tertulis yang disampaikan oleh Bawaslu Jawa Barat, dapat kita temukan, Yang Mulia bahwa berbagai kegiatan dan rekomendasi serta saran perbaikan sudah dilakukan oleh panwaslu kecamatan, di berbagai kecamatan di Kota Bandung.

Menurut Ahli, sebagai penyelenggara pemilu untuk Tahun 2017 sampai 2022 akan tampak janggal jika ada selisih suara yang disampaikan oleh pemberi keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sedangkan di sisi yang lain pihak pengawas pemilu secara berjenjang, ikut serta mengawal proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dihadiri sendiri oleh panwaslu kecamatan, Bawaslu Kota, termasuk bahkan Bawaslu Provinsi. Next.

424. KETUA: SUHARTOYO [01:01:44]

Singkatnya, Pak Fritz.

425. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRITZ EDWARD SIREGAR [01:01:46]

Yang berikut, Yang Mulia. Next. Saya bisa melihat, Yang Mulia. Bahwa, next, ... ya maaf, ya. Ini dia, putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki cacat secara formil dan cacat secara materiil. Cacat formil

yang pertama adalah bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, tidak menyarankan kepada pelapor sehingga Ketua dan Anggota KPU Kota Bandung menjadi Pihak Terlapor atau dalam bahasa saya, Yang Mulia, laporan yang disampaikan oleh Willihardy Ummaya, seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau error in persona. Di dalam proses pemeriksaan acara cepat yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang seharusnya menjadi terlapor adalah bahwa KPU Provinsi Jawa Barat, bukan KPU Kota Bandung. Yang berikut, Yang Mulia bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, seharusnya menyatakan pelaporan tersebut daluwarsa atau sudah melewati tenggat waktu, kenapa, Yang Mulia? Karena kalau kita mengacu kepada pemeriksaan acara cepat seharusnya kan yang menjadi objek itu adalah proses rekapitulasi yang ada di Provinsi Jawa Barat atau yang di KPU Provinsi Jawa Barat, bukan apa yang terjadi di kecamatan, dan juga bukan ... apa lagi yang ada di TPS.

Oleh karena itu, terhadap putusan administrasi cepat yang diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, seharusnya Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak memiliki kewenangan untuk menangani laporan yang diajukan oleh pelapor.

Dan yang terakhir, Yang Mulia, next, putusan Bawaslu Jawa Barat memiliki cacat materiil secara signifikan. Saya berpendapat kalau kita membaca putusan daripada Bawaslu Jawa Barat, putusan Jawa Barat tidak menyebutkan bagaimana, di mana, dan kapan, dan kepada terhadap siapa pemeriksaan dilakukan. Jikalau pun, pemeriksaan dilakukan terhadap KPU Kota Bandung, maka putusannya tidak menjelaskan siapa, dan apa yang bertindak mewakili KPU Kota Bandung.

Yang berikutnya, Yang Mulia, kalau kita membaca putusan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat tidak menyebutkan pasal apa yang dilanggar sebenarnya oleh KPU Kota Bandung, apakah terkait dengan rekap di Kecamatan? Atau rekap yang di kabupaten/kotakah? Atau itu rekap yang ada di bawah, yang ada di KPU Kota?

426. KETUA: SUHARTOYO [01:03:55]

Cukup, Pak, cukup.

427. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRITZ EDWARD SIREGAR [01:03:53]

Sama yang terakhir, Yang Mulia. Bahwa kalau kita mengacu kepada acara cepat seharusnya pemeriksaan acara cepat diselesaikan pada hari yang sama. Sedangkan kalau kita membaca Putusan dari

Bawasul Provinsi Jawa Barat itu diterima pada tanggal 10, tapi diputus pada tanggal 11. Demikian, Yang Mulia.

428. KETUA: SUHARTOYO [01:04:30]

Baik, Terima kasih. Dari Yang Mulia, ada?

429. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:04:38]

Baik, Terima kasih. Saya konfirmasi pertama ke Termohon dulu, ya. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebelumnya, itu sebetulnya terungkap, laporan yang diajukan Pemohon itu ada 165 TPS. Kemudian dari 165 itu yang sudah ditindaklanjuti itu baru 60 TPS. Pertanyaannya, 105 TPS itu sampai sekarang ini apakah ada progress atau digantung saja? Mungkin itu dijawab dulu dari KPU Jawa Barat. Silakan, Bu.

430. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:05:14]

Untuk Putusan Bawaslu itu yang di perkara adalah memang 60 dan 105, tapi di putusan Bawaslu hanya tertuang 60 untuk yang di perkara pengurangan Partai Nasdem dan dilakukan dari 105 itu hanya 2 yang di-sampling untuk yang 105 TPS, begitu. Jadi hanya 2 yang di-sampling di 105 TPS, begitu. Untuk yang 105 di proses pencermatan rekap di app pencermatan di KPU Provinsi yang disaksikan waktu itu bersama-sama ini banyak TPS yang belum meng-upload C.Hasil. Jadi kita tidak bisa kemudian apa ... menindaklanjuti yang 105 itu hanya beberapa TPS yang ada C.Hasilnya, sisanya tidak ada C.Hasil begitu, di Sirekap.

431. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:06:16]

Berarti sama sekali 105 ini tidak diapa-apakan Bu, ya?

432. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:06:16]

Dilakukan pencermatan, Pak, kita membuka Sirekap, tapi karena keterbatasan di Sirekap itu C.Hasil tidak semua ada di Sirekap. Jadi beberapa TPS itu sudah dilakukan pencermatan.

433. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:06:37]

Nanti bisa di laporan lengkapnya Bu, ya? Untuk kami nanti kalau ada. Karena tadi dalam penjelasan itu keterangan saksi juga yang kami dapat itu baru 60 yang 105 tidak diselesaikan kesannya.

434. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:06:56]

Mohon maaf, Yang Mulia, yang ditindaklanjuti putusan itu sudah dilampirkan juga.

435. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:07:00]

Ya betul, kan yang 60 itu kan?

436. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:07:04]

Enggak, 105 juga ada ditindaklanjuti putusan, ada.

437. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:07:06]

105 juga ada?

438. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:07:11]

Ada, 105 juga ada.

439. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:07:15]

105 juga ada, ya?

440. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:07:08]

Ya.

441. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:07:11]

Jadi tidak hanya 60, ya?

442. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:07:19]

Ya.

443. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:07:12]

Oke, nah tadi yang dinyatakan sampel itu dari 105 itu yang mana, Bu? Ada dua tadi.

444. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:07:28]

Dari 105, dua TPS yang disampling oleh Bawaslu provinsi, itu satu Andir, Kecamatan Andir, Desa Hegarmanah, TPS 49.

445. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:07:44]

Terus yang kedua?

446. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:07:44]

Yang kedua Kecamatan Regol, Desa Cigereleng, TPS 24. Itu di keterangannya.

447. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:07:55]

Oke. Bu, dari sampling dua TPS ini, apakah Ibu yakin bahwa itu bisa mewakili 105 itu.

448. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:08:02]

Pak, itu adalah kewenangan Bawaslu Provinsi karena itu ada di (...)

449. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:07]

Oh, kewenangan Bawaslu.

450. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:08:08]

Ya. Bukan di kita.

451. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:08]

Jadi kalau tidak ada perintah Bawaslu, tidak bisa.

452. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:08:12]

Enggak, Pak. Jadi prosesnya begini, Pak, sidang pemeriksaan acara cepat itu yang memimpin bukan kami, tapi Bawaslu Provinsi. Itu atas (...)

453. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:20]

Ya, kan sidangnya tanggal 10. Permohonan tanggal 10, ya.

454. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:08:24]

Ya.

455. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:24]

Diputuskan tanggal 11.

456. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:08:27]

11.

457. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:27]

Yang tadi Ahli Fritz mengatakan bahwa itu pun menyalahi. Harusnya dilaporkan tanggal 10, diputuskan tanggal 10.

458. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:08:34]

Ya.

459. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:35]

Nah, pada waktu pemeriksaan pendahuluan, pertanyaannya waktu itu kami ke Bawaslu adalah apa yang menjadi indikator pemeriksaan cepat ini? Karena dengan jumlah TPS 165 itu merugikan Termohon maupun juga Pihak Terkait. Nah, saya ke Ahli dulu, Pak Fritz dulu ya. Tadi soal pengawasan berjenjang, ini kan yang dipersoalkan Pemohon ini dari 165 TPS, ya. Tadi keterangan dari KPU sudah menyatakan sudah ada ditindaklanjuti. Nah, kalau penyelesaian berjenjang itu pada tingkat TPS itu, apakah mungkin bisa bermuara ke Mahkamah Konstitusi? Ataukah nanti rekomendasi diselesaikan pada jenjang setingkat di atasnya?

460. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRITZ EDWARD SIREGAR [01:09:32]

Ya, Yang Mulia. Kalau kita mengacu kepada P ... kepada PKPU 5 tahun 2024 bahwa apabila ada satu persoalan, maka persoalan tersebut misalnya di tingkat kecamatan, maka saksi itu wajib untuk memberikan keberatan, mengisi lembar ... lembar keberatan ataupun kejadian khusus di pada saat proses rekapitulasi itu karena itulah sebagai, kalau dalam bahasa saya, itulah tiketnya untuk sebuah persoalan tersebut diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Apabila keberatan ataupun kejadian khusus

tersebut tidak dicatat pada saat proses rekapitulasi, saya berpendapat Saksi atau dalam hal ini Nasdem sudah menerima bahwa proses rekapitulasi tersebut dapat menerima hasil daripada proses rekapitulasi tersebut.

Oleh karena itu, ketiadaan adanya keberatan ataupun kejadian khusus pada satu tingkat level, pada ... pada satu tingkatan itu tidak dapat diangkat ke tingkat yang lebih tinggi.

Apalagi, Yang Mulia, di dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa pengawas pemilu sudah melakukan rekomendasi ataupun meminta KPU ataupun PPK pada tingkat kecamatan sudah melakukan perbaikan-perbaikan. Artinya, pengawas pemilu sudah melakukan apa yang seharusnya pengawas pemilu lakukan pada tingkat kecamatan, sehingga pada saat ketiadaan adanya kejadian khusus ataupun keberatan pada tingkat kecamatan, itu menghilangkan hak saksi atau partai untuk mempersoalkan rekapitulasi di kecamatan tersebut pada tingkat kota.

461. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:11:03]

Oke, berarti saya bisa berkesimpulan bahwa menurut Ahli tidak bisa bermuara di MK, persoalan ini?

462. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRITZ EDWARD SIREGAR [01:11:11]

Kalau pendapat saya tidak bisa, Yang Mulia.

463. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:11:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

464. KETUA: SUHARTOYO [01:11:19]

Dari Pemohon untuk (...)

465. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [01:11:21]

Izin, Yang Mulia.

466. KETUA: SUHARTOYO [01:11:22]

Ada pertanyaan?

467. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [01:11:24]

Untuk Saksi Termohon, Yang Mulia.

468. KETUA: SUHARTOYO [01:11:26]

Satu pertanyaan, silakan.

469. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [01:11:28]

Izin, Yang Mulia. Ini hanya minta penegasan saja.

470. KETUA: SUHARTOYO [01:11:33]

Ya.

471. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [01:11:33]

Bahwasannya tadi Saksi dari KPU Provinsi menyatakan sudah melakukan penyandingan. Yang pertanyaan kami adalah pada saat sudah melakukan penyandingan(...)

472. KETUA: SUHARTOYO [01:11:43]

Ini Saksi yang mana, Pak?

473. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [01:11:44]

Yang dari KPU. Bu Aneu.

474. KETUA: SUHARTOYO [01:11:47]

Silakan, langsung ... langsung ke pertanyaan, Pak.

475. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [01:11:50]

Ya. Pada saat sudah penyandingan, apakah sudah melakukan koreksi perbaikan angka? Karena fakta di la ... fakta di lapangan berdasarkan kesaksian-kesaksian itu belum sempat untuk melakukan koreksi perubahan. Penyandingannya betul, tapi koreksinya belum. Nah saya minta pernyataan (...)

476. KETUA: SUHARTOYO [01:12:07]

Ya, sudah ada koreksi belum.

477. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [01:12:07]

Dari penegasan.

478. KETUA: SUHARTOYO [01:12:09]

Silahkan. Saksi Termohon.

479. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:12:13]

Ya. Jadi kita sudah menuangkan dalam tindak lanjut, surat tindak lanjut yang kita serahkan kepada Bawaslu, di situ memang ada beberapa TPS, contohnya beberapa TPS yang memang (...)

480. KETUA: SUHARTOYO [01:12:26]

Hasil dari ini, Ibu, yang Bukti T-10 dan ini sudah ditindaklanjuti, belum?

481. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:12:34]

Sudah ditindak lanjuti kan, Pak.

482. KETUA: SUHARTOYO [01:12:36]

Dalam bentuk apa?

483. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:12:37]

Surat tindak lanjut.

484. KETUA: SUHARTOYO [01:12:39]

Ya, maksudnya aktualisasi ke angka-angkanya bagaimana?

485. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:12:43]

Pencermatan.

Oh, Pak, kita jadi di PKPU 6 ... 2024 ... PKPU 5/2024 bahwa jika ada keberatan di tingkat rekapitulasi provinsi (...)

486. KETUA: SUHARTOYO [01:12:52]

Oke, saya paham. Nah, sekarang kalau ditemukan memang ada yang tidak cocok, apakah tetap didiamkan saja mengikuti PKPU itu?

487. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:01]

Jadi Pak (...)

488. KETUA: SUHARTOYO [01:13:02]

Tidak ada tindak lanjut?

489. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:03]

Ya. Karena untuk beberapa TPS yang sudah terkonfirmasi (...)

490. KETUA: SUHARTOYO [01:13:07]

Ya.

491. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:07]

Itu sudah terkonfirmasi (...)

492. KETUA: SUHARTOYO [01:13:09]

Ya, kalau yang tidak?

493. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:10]

Dan tidak ada kejadian khusus. Yang tidak itu 6 TPS, yang tidak terkonfirmasi, kenapa tidak dilakukan? Karena harus ada pembukaan kotak.

494. KETUA: SUHARTOYO [01:13:16]

Itu belum dilakukan?

495. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:17]

Tidak bisa, Pak. Kita melakukan pembukaan kotak (...)

496. KETUA: SUHARTOYO [01:13:18]

Oke, artinya ada berapa TPS tadi yang tidak?

497. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:22]

6 TPS (...)

498. KETUA: SUHARTOYO [01:13:22]

6 TPS.

499. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:22]

Yang tidak ada di Sirekap, Pak.

500. KETUA: SUHARTOYO [01:13:24]

Oke.

501. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:24]

Jadi, C.Hasilnya tidak ada di Sirekap.

502. KETUA: SUHARTOYO [01:13:25]

Oke.

503. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:26]

Ya.

504. KETUA: SUHARTOYO [01:13:26]

Terus yang ditanyakan, keseluruhannya atau hanya 5 tadi atau sisanya?

505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [01:13:31]

Keseluruhan, jadi hasil dari 60 TPS yang sudah disandingkan, itu belum dimasukkan ke data koreksi D.

506. KETUA: SUHARTOYO [01:13:39]

Ya.

507. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [01:13:40]

Nah, itu yang saya minta itu.

508. KETUA: SUHARTOYO [01:13:41]

Itu Ibu, tapi Ibu kan bersandar pada ketentuan pasal tadi itu, kan?

509. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:46]

Ya.

510. KETUA: SUHARTOYO [01:13:46]

Jadi, memang tidak perlu ada tindak lanjut.

511. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:48]

Ya.

512. KETUA: SUHARTOYO [01:13:48]

Karena memang ketentuannya kalau dilakukan ... apa ... pencocokan kemudian klop (...)

513. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:54]

Ya.

514. KETUA: SUHARTOYO [01:13:54]

Ya sudah, kan?

515. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:56]

Ya.

516. KETUA: SUHARTOYO [01:13:56]

Tidak perlu kemudian ada koreksi-koreksi.

517. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:13:58]

Ya, karena walaupun misalkan ada yang dianggap tidak cocok, Pak, itu butuh untuk pembukaan kotak dan itu tidak bisa kita lakukan.

518. KETUA: SUHARTOYO [01:14:07]

Tidak bisa dilakukan.

519. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:14:07]

Ya.

520. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [01:14:07]

Yang Mulia, pernyataan saya hanyalah ini ada di jawaban Termohon juga dan keterangan Saksi, bahwasannya Saksi tadi menyatakan sudah disandingkan dan betul bahwasannya ada ketidakcocokan.

Pertanyaan kami, pada saat ibaratnya sudah disandingkan, angka kami sudah ibaratnya harusnya bertambah 463. Apakah itu sudah dilakukan koreksi menjadi jumlah? Itu pertanyaannya.

521. KETUA: SUHARTOYO [01:14:34]

Ya sudah, sudah.

522. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:14:36]

Harus dijawab, Pak?

523. KETUA: SUHARTOYO [01:14:38]

Ya.

524. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:14:38]

Ya, jadi (...)

525. KETUA: SUHARTOYO [01:14:39]

Sudah ada koreksi, belum?

526. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:14:40]

Tidak, untuk 400 (...)

527. KETUA: SUHARTOYO [01:14:41]

Ya sudah (...)

528. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:14:42]

Tidak ada, Pak.

529. KETUA: SUHARTOYO [01:14:42]

Tidak, tidak ... oke.

530. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:14:43]

Karena kan sudah ada proses D.Kejadian Khusus yang menarangkan bahwa itu adalah ada proses penghitungan ulang.

531. KETUA: SUHARTOYO [01:14:49]

Ya, artinya tidak perlu itu ditindaklanjuti dengan koreksi.

532. TERMOHON: ANEU NURSIFAH [01:14:53]

Ya.

533. KETUA: SUHARTOYO [01:14:54]

Oke, kemudian dari Termohon ada pertanyaan? Pak Ali tadi?

534. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:15:00]

Ada, Yang Mulia.
Pertama, untuk Saksi Pemohon, yang pertama.

535. KETUA: SUHARTOYO [01:15:05]

Satu pertanyaan saja.

536. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:15:07]

Ya.

Untuk Saksi Pemohon berkaitan dengan laporan, laporan yang ditujukan ke Bawaslu, itu kan diajukan setelah proses rapat pleno tingkat kecamatan selesai, begitu, ya.

Nah, pertanyaan pertama adalah dari mana sumber data yang digunakan? Karena C.Hasil yang dipakai itu berbeda dengan yang ada dimiliki oleh KPU dan kenapa dari Saksi Pemohon, pelapor pada waktu itu, tidak menanyakan atau membawa saksi partai di tingkat kecamatan yang mengikuti proses rekapitulasi berjenjang, yang mengetahui proses perubahan dari C.Hasil ke D.Hasil?

Itu untuk Saksi Pemohon, Yang Mulia.

537. KETUA: SUHARTOYO [01:15:46]

Ya, pertanyaan Bapak apa tadi?

538. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:15:48]

Pertanyaannya kenapa Saksi Pemohon tidak diajukan di dalam proses pemeriksaan di Bawaslu?

Terima kasih, Yang Mulia.

539. KETUA: SUHARTOYO [01:15:57]

Baik. Ini yang ditujukan ke saksi siapa yang ditanya?

540. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:16:00]

Saksi Pemohon yang pertama, Yang Mulia. Karena beliau pelapor juga karena di dalam putusan Bawaslu itu tidak (...)

541. KETUA: SUHARTOYO [01:16:05]

Bisa dijelaskan itu, Pak Willihardy.

542. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [01:16:08]

Baik, Yang Mulia. Sebenarnya pada saat itu kami menjadi saksi dan juga Pemohon langsung pada saat sidang cepat.

543. KETUA: SUHARTOYO [01:16:17]

Ya. Maksudnya pertanyaan tadi, kan kenapa tidak diajukan sebagai saksi di Bawaslu.

544. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [01:16:25]

Saya jadi saksi ... jadi saksi.

545. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:16:29]

Pertanyaan saya, kenapa saksi yang ada di tingkat kecamatan, saksi pemohon tingkat waktu rekap kecamatan berlangsung mereka kan yang paham persis tentang perubahannya (...)

546. KETUA: SUHARTOYO [01:16:39]

Yang tahu kejadiannya.

547. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:16:42]

Yang tahu persis kejadiannya karena kalau hanya C.Hasil dan D.Hasil pasti berbeda, apa yang tahu perbedaan itu kan mereka yang ikut rapat pleno di tingkat kecamatan. Nah, kenapa Saksi Pemohon di tingkat rekap kecamatan itu tidak ada di dalam laporan Bawaslu yang diperiksa sebagai sumber data? Karena kalau semata-mata hanya C.Hasil dan D.Hasil pasti membingungkan, begitu.

548. KETUA: SUHARTOYO [01:17:01]

Ya. Kenapa tidak diajukan, Bapak? Itu saja pertanyaannya.

549. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [01:17:04]

Baik, Yang Mulia. Jadi begini, pada saat kami mendapatkan laporan itu kami pun sangat kaget juga karena pada saat penghitungan itu, panel itu ditambah-tambah, ada yang dari satu panel jadi 2 dan 3. Sedangkan kami terkonsentrasi itu di awal itu hanya struktur partai kamilah yang menguasai untuk rekapitulasi (...)

550. KETUA: SUHARTOYO [01:17:29]

Ya. Sudah ...pert... jawabannya itu Pak Ali, cukup?

551. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:17:32]

Untuk Ahli, Yang Mulia.

552. KETUA: SUHARTOYO [01:17:35]

Satu pertanyaan silakan.

553. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:17:36]

Satu pertanyaan buat Ahli. Ahli, tadi menyatakan terbukti ada penggelembungan, setahu saya dalam putusan Bawaslu itu saya baca tidak ada bicara angka, yang terbukti itu bukan masalah angka berapa-berapanya (...)

554. KETUA: SUHARTOYO [01:17:46]

Ya. Pertanyaannya (...)

555. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:17:48]

Dari mana Ahli bisa menyatakan terbukti ada penggelembungan tadi?

556. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULIANTO [01:17:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya tidak mengatakan pada kasus ini terjadi seperti apa, saya hanya membacakan apa yang diputuskan oleh Bawaslu. Kemudian yang disampaikan dalam perkara ini bahwa perkara ini berkaitan dengan 2 hal.

Satu, terkait dengan pengurangan suara Pemohon. Yang kedua, penggelembungan suara Pihak Terkait. Demikian permohonannya.

557. KETUA: SUHARTOYO [01:18:22]

Ya. Cukup, ya.
Dari Pihak Terkait ada pertanyaan?

558. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:18:24]

Yang Mulia, boleh ke Bawaslu?

559. KETUA: SUHARTOYO [01:18:26]

Cukup.

560. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:18:27]

Untuk Ahli satu lagi dari Pihak Terkait, satu saja pertanyaan belum? Ahli dari Pihak Terkait, Yang Mulia. Satu pertanyaan saja.

561. KETUA: SUHARTOYO [01:18:36]

Silakan

562. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:18:36]

Baik. Untuk Ahli Pihak Terkait, pertanyaannya adalah apakah wajar pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi berkait dengan perbedaan data C.Hasil dan D.Hasil, tapi dalam pemeriksaannya tidak memeriksa Panwascam yang ada di TPS Yang dipersoalkan oleh pelapor (...)

563. KETUA: SUHARTOYO [01:18:58]

Singkat saja jawabnya, Pak.

564. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:19:00]

Ya. Apakah menjadi keharusan untuk mencari tahu dari mana perubahan data itu dengan mengundang atau memanggil organ yang ada di ... apa ... panwascam sendiri yang bagian dari Bawaslu dan apakah bisa dinyatakan melanggar kalau Bawaslu yang organnya hadir di kecamatan itu menyatakan tidak ada pelanggaran atau apapun, begitu. Kan mereka hadir, tapi tiba-tiba belakangan dinyatakan melanggar. Padahal pada waktu rapat pleno di tingkat kecamatan, panwascam yang

hadir ikut perubahan, ikut menyetujui dan menerima proses dan hasil. Terima kasih, Yang Mulia.

565. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRITZ EDWARD SIREGAR [01:19:35]

Yang Mulia. Sebagaimana saya yakin Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi, juga ketahui ada 2 jenis penanganan pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi biasa atau pun pelanggaran administrasi secara cepat. Kenapa cepat? Karena itu berkaitan dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur pada saat proses rekap. Di situlah dibutuhkan tindakan cepat dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota atau pun Bawaslu RI pada saat proses rekapitulasi yang sedang terjadi. Pada saat ini, pada saat kasus yang kita baca, ini ada terkait dengan sengketa ataupun bawas ... ataupun pelanggaran administrasi cepat di tingkat Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Seandainya kalau Bawaslu Provinsi Jawa Barat mau lebih luas, mau mendengarkan berbagai pihak, harusnya juga mengundang panwas kecamatan. Tetapi itu dalam koridor pelanggaran administrasi dengan acara biasa, tidak dengan acara cepat.

Demikian, Yang Mulia.

566. KETUA: SUHARTOYO [01:20:29]

Baik.

Dari Pihak Terkait, satu pertanyaan.

567. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [01:20:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin kami mau bertanya kepada saksi fakta yang pertama, Pak Willihardy. Di bukti kami, pada Bukti PT-7, ada video rapat pleno tingkat Kota Bandung. Dalam Bukti PT-7, jelas di situ bahwa seluruh Kota Bandung menyampaikan kepada Pak Willihardy agar menyampaikan keberatan secara terbuka pada saat itu juga, tetapi ditolak. Apakah betul Saudara keberatan menyampaikan keberatan secara resmi? Pak Willihardy?

568. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [01:21:05]

Ya.

569. KETUA: SUHARTOYO [01:21:06]

Silakan, Pak, dijawab.

570. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [01:21:08]

Kami waktu itu keberatan.

571. KETUA: SUHARTOYO [01:21:13]

Keberatan, ya? Cukup, ya? (...)

572. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [01:21:14]

Ya.

573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [01:21:15]

Keberatan secara tertulis?

574. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [01:21:17]

Kita layangkan secara tertulis.

575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [01:21:18]

Me ... mengisi Form Kejadian Khusus?

576. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [01:21:21]

Mengisi.

577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [01:21:23]

Di formulir yang diberikan KPU?

578. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WILLIHARDY UMMAYA [01:21:25]

Ya.

579. KETUA: SUHARTOYO [01:21:27]

Cukup ya, Pak.

580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [01:21:29]

Terima kasih.

581. KETUA: SUHARTOYO [01:21:29]

Baik.

582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [01:21:30]

Kemudian kepada Ahli. Apakah (...)

583. KETUA: SUHARTOYO [01:21:31]

Ahli, ahli siapa ini?

584. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [01:21:33]

Ahli Pemohon.

585. KETUA: SUHARTOYO [01:21:34]

Bukan ... bukan ahli Saudara sendiri?

586. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [01:21:36]

Ya, bukan, bukan. Ahli Pemohon.

587. KETUA: SUHARTOYO [01:21:38]

Silakan, satu pertanyaan.

588. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [01:21:40]

Ahli Pemohon dalam kaitan dengan prinsip kepastian hukum dalam pemilu. Tadi saksi fakta sudah menjelaskan bahwa pada pleno di tingkat kecamatan, kami tidak mendengar ada saksi dari Partai Nasdem yang mengajukan keberatan.

Nah, bagaimana pendapat Ahli terkait dengan prinsip kepastian hukum jika masalah di TPS atau masalah di kecamatan harus diajukan pada tingkat pleno provinsi? Hemat kami, ketika saksi tidak mengajukan keberatan (...)

589. KETUA: SUHARTOYO [01:22:14]

Bapak, pertanyaannya apa? Jangan pendapat Bapak.

590. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [01:22:16]

Ya. Pendapat Ahli mengenai prinsip kepastian hukum.

591. KETUA: SUHARTOYO [01:22:21]

Ya, pertanyaan apa?

592. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [01:22:22]

Ya. Pertanyaan kami itu pandangan Ahli. Karena dari prosesnya secara berjenjang, tidak ada keberatan dari saksi. Tidak ada juga temuan dari panwas, dari pengawas lapangan, tetapi tiba-tiba dilakukan laporan di tingkat Bawaslu. Nah, ini bagaimana Ahli memandang persoalan ini? Kaitannya dengan kepastian hukum.

Terima kasih.

593. KETUA: SUHARTOYO [01:22:43]

Silakan, Ahli singkat-singkat.

594. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YULIANTO [01:22:45]

Ya, terima kasih. Saya kira tiga esensi soal kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan ini merupakan hal yang kadang tidak bisa berjalan sekaligus. Ada kemungkinan memang apa yang disampaikan tadi dalam kerangka bahwa itu berjalan normal ketika itu semua berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan, ada proses yang koreksi yang juga bekerja, pengawasan yang efektif, maksimal. Maka perkara tidak akan sampai ke Mahkamah Konstitusi, kira-kira begitu.

595. KETUA: SUHARTOYO [01:23:17]

Ya, baik. Cukup.
Ibu yang (...)

596. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:23:19]

Izin, Yang Mulia.

597. KETUA: SUHARTOYO [01:23:20]

Dari siapa?

598. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:23:20]

Dari Pemohon ke Ahli Terkait.

599. KETUA: SUHARTOYO [01:23:24]

Sudah cukup, Pak, sudah cukup.

600. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [01:23:25]

Izin, Yang Mulia.

601. KETUA: SUHARTOYO [01:23:27]

Ya. Tadi giliran (...)

602. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [01:23:28]

Teman-teman tadi sudah bisa menanyakan ahli, kami belum.

603. KETUA: SUHARTOYO [01:23:30]

Ya, tapi Bapak-bapak tadi ketika gilirannya enggak bertanya. Enggak sekaligus minta untuk mengajukan ke Ahli.

604. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [01:23:37]

Karena Yang Mulia bilang satu makanya kami nurut, Yang Mulia.

605. KETUA: SUHARTOYO [01:23:39]

Satu pertanyaan tapi untuk yang setiap yang Bapak tuju. Tapi tidak minta untuk pihak yang lain yang ingin ditanya. Mau tanya apa sekarang untuk Ahli? Silahkan, satu pertanyaan.

606. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:23:49]

Ahli.
Izin, Yang Mulia.

607. KETUA: SUHARTOYO [01:23:49]

Silakan.

608. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:23:51]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

609. KETUA: SUHARTOYO [01:23:53]

Jangan putar-putar bolak-balik, nanti enggak selesai-selesai sidang.

610. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:23:55]

Ya, terima kasih.

611. KETUA: SUHARTOYO [01:23:55]

Silakan.

612. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:23:56]

Berkaitan dengan asas kepastian hukum. Ini sudah ada putusan Bawaslu, kemudian sudah disandingkan oleh KPU, hasilnya sudah ada, tapi hasil tersebut tidak dituangkan dalam D.Hasil Provinsi maupun D.Hasil Nasional.

613. KETUA: SUHARTOYO [01:24:11]

Ya. Mirip pertanyaannya dengan KPU tadi, kan itu?

614. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:24:15]

Ya, mohon penjelasan Ahli.

615. KETUA: SUHARTOYO [01:24:13]

Ya. Baik, Silakan, Ahli.

616. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:24:13]

Terkait hal tersebut. Terima kasih, Yang Mulia.

617. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRITZ EDWARD SIREGAR [01:24:23]

Yang Mulia, saya rasa kepastian hukum itu muncul apabila pada saat sejak proses di rekapitulasi, saksi telah memberikan ataupun menandatangani adanya dokumen kejadian khusus ataupun keberatan. Di situ lah munculnya kepastian hukum dan apabila ada persoalan yang tidak selesai, itu diangkat ke tingkat yang ke atasnya, yaitu pada saat proses di rekapitulasi di KPU Kota Bandung. Demikian, Yang Mulia.

618. KETUA: SUHARTOYO [01:24:47]

Baik. Ibu dari Bawaslu, ya? Yang tadi kan ada 5 atau 6 TPS yang tidak bisa klop karena harus membuka kotak itu. Itu juga sempat tahu Bawaslu dari hasil laporannya?

619. BAWASLU: NURYAMAH [01:25:04]

Kami memang untuk persoalan itu, untuk di pembukaan kotak yang lebih tahunya itu ... apa namanya ... di KPU Kota Bandung nya.

620. KETUA: SUHARTOYO [01:25:15]

Bukan, tadi kan Ibu persoalannya sudah mengatakan bahwa itu sudah selesai semua.

621. BAWASLU: NURYAMAH [01:25:18]

Sudah selesai semua memang.

622. KETUA: SUHARTOYO [01:25:18]

Ya, termasuk yang masih seharusnya dikonfirmasi melalui kotak, pembukaan kotak itu pun (...)

623. BAWASLU: NURYAMAH [01:25:25]

Sudah selesai.

624. KETUA: SUHARTOYO [01:25:26]

Lho, katanya enggak bisa karena belum bisa dibuka kotak itu.

625. BAWASLU: NURYAMAH [01:25:33]

Sudah selesai, Yang Mulia.

626. KETUA: SUHARTOYO [01:25:35]

Kemudian kalau tidak ada tindak lanjut sebagaimana yang ditanyakan Pihak Pemohon, dalam bentuk koreksi karena memang itu amanat daripada regulasinya seperti itu, memang sudah seperti itu?

627. BAWASLU: NURYAMAH [01:25:53]

Betul, Yang Mulia.

628. KETUA: SUHARTOYO [01:25:54]

Betul. Jadi, kalau kemudian ada temuan, ada keberatan, pihak itu kemudian mengajukan keberatan ke Bawaslu, Bawaslu kemudian merekomendasikan sesuatu termasuk tadi itu, seperti rekomendasi yang hari ini dipersoalkan di persidangan, kemudian hanya cukup melakukan pencermatan atau penyandingan dan lain sebagainya, tidak perlu kemudian ada tindak lanjut.

629. BAWASLU: NURYAMAH [01:26:19]

Karena tindak lanjutnya sudah dilakukan oleh KPU, Yang Mulia.

630. KETUA: SUHARTOYO [01:26:18]

Apa tindak lanjutnya? setelah dilakukan pencermatan itu?

631. BAWASLU: NURYAMAH [01:26:27]

Mereka sudah menyampaikan laporannya tadi, dalam (...)

632. KETUA: SUHARTOYO [01:26:28]

Semua hasilnya klop, Ibu?

633. BAWASLU: NURYAMAH [01:26:34]

Sudah. Sudah semuanya.

634. KETUA: SUHARTOYO [01:26:35]

Klop semua?

635. BAWASLU: NURYAMAH [01:26:36]

Sudah, Yang Mulia.

636. KETUA: SUHARTOYO [01:26:37]

Betul, ya? Nanti kami akan cek semua, lho.

637. BAWASLU: NURYAMAH [01:26:38]

Mangga, Yang Mulia. Siap.

638. KETUA: SUHARTOYO [01:26:48]

Jangan Ibu, kan ... apa ... pengawas ketika itu kan, seharusnya Ibu netral dan ... apa ... bisa memberi keterangan apa adanya.

639. BAWASLU: NURYAMAH [01:26:53]

Siap, Yang Mulia.

640. KETUA: SUHARTOYO [01:26:57]

Baik. Untuk perkara ini, untuk bukti Termohon yang diajukan ada tambahan T-17 sampai dengan T-024. Kemudian untuk Pihak Terkait Golkar, Buktinya PT-01 sampai dengan PT-72. Kemudian 76, PT-91 sampai dengan PT-225. Betul, ya, Termohon?

641. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:27:24]

Betul, Yang Mulia.

642. KETUA: SUHARTOYO [01:27:22]

Dari Pihak Terkait, betul?

643. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [01:27:26]

Yang Mulia, kami ada bukti tambahan mulai dari PT-226 sampai PT-229.

644. KETUA: SUHARTOYO [01:27:32]

Belum sampai ke sini, belum diserahkan?

645. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [01:27:34]

Sudah kami serahkan, ada aktanya, Yang Mulia.

646. KETUA: SUHARTOYO [01:27:37]

Kapan?

647. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [01:27:38]

Tanggal 14 Mei.

648. KETUA: SUHARTOYO [01:27:46]

Yang 226 ke atas. Ini yang sudah diverifikasi 225, 91 sampai 225.

649. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [01:27:53]

Ini kami ada akta tanda terima bukti PT-226 sampai PT-229, Yang Mulia, 14 Mei.

650. KETUA: SUHARTOYO [01:28:10]

Nanti kami cek dulu, tapi yang ada kami sahkan dulu, ya Pak, ya.

651. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [01:28:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

652. KETUA: SUHARTOYO [01:28:15]

Untuk Termhon dan untuk Pihak Terkait sampai bukti PT-225.

KETUK PALU 1X

Baik untuk Perkara 90, sudah cukup, baik pihak-pihaknya termasuk saksi-saksinya, terima kasih.

Kemudian agenda persiapan selanjutnya tinggal menunggu pemberitahuan dari Mahkamah, apakah akan segera dipanggil untuk di ... anu ... tentunya menunggu secara bersama-sama, setelah sidang pembuktian ini selesai untuk semua nomor, ya. Tunggu saja pada waktu yang nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan. Silakan bisa meninggalkan tempat untuk perkara 90.

653. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:29:01]

Terima kasih, Yang Mulia, izin kami pamit.

654. KETUA: SUHARTOYO [01:29:12]

Yang ... Pak yang Pihak Terkait 226 sudah ada, Pak? Sudah di verifikasi?

655. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [01:29:18]

Baik.

656. KETUA: SUHARTOYO [01:29:18]

Sampai 229, ya, Pak, ya?

657. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [01:29:19]

Betul, betul. Terima kasih.

658. KETUA: SUHARTOYO [01:29:20]

Kami ... kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Silakan.

659. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL TONAPA MASIKU [01:29:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

660. KETUA: SUHARTOYO [01:29:25]

Baik.

Yang di belakang, bisa maju dan langsung kami panggil saja untuk saksi selanjutnya Perkara 59. Saksi dari pemohon Erwin Maradona, pemain dari Argentina ini, Rahmat Zeri Dusti, Riyan Ramadani maju, ya Pak, maju, Ir. Iden, Nur Yusuf, kemudian Termohonnya Ihsan Nuur Hidayatulloh, Rahmat Zeri Dusti. Ini sudah jadi Termohon, Saksi Termohon?

661. SAKSI TERMOHON: RAHMAT ZERI DUSTI [01:30:25]

Ya, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

662. KETUA: SUHARTOYO [01:29:26]

Mantapkan hatinya, mau kemana? Mau Saksinya Pemohon atau Termohon?

663. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:30:34]

Mohon izin, Yang Mulia, kami Kuasa Hukum Pemohon Perkara 59. Untuk Saudara Erwin Maradona dan Saudara Rahmat Zeri Dusti sudah membuat surat pernyataan bahwa Beliau menyatakan menjadi saksi dari Pemohon, Yang Mulia.

664. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [01:30:50]

Izin, Yang Mulia. Terhadap kehadiran itu, kami menyatakan secara tegas keberatan.

665. KETUA: SUHARTOYO [01:30:53]

Keberatan, ya. Tapi, Bapak tarik ini, kalau enggak bagaimana, mau dibelah badannya?

666. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [01:31:03]

Baik, Yang Mulia. Kami tidak menghadirkan Erwin Maradona Harahap dan Ridwan[sic!] Zeri Dusti.

Selanjutnya, Yang Mulia, izin. Terhadap saksi yang diajukan Pemohon, yaitu Riyan Ramadani dan Nur Yusuf, sekarang status yang bersangkutan itu adalah PPS aktif. Riyan Ramadani itu ada di PPS Jatiwangi, sudah dilantik kemarin. Terus (...)

667. KETUA: SUHARTOYO [01:31:34]

Ya, tapi untuk kegiatan yang berikutnya kan?

668. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [01:31:36]

Ya.

669. KETUA: SUHARTOYO [01:31:37]

Yang sudah, kan sudah selesai.

670. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [01:31:39]

Ya.

671. KETUA: SUHARTOYO [01:31:39]

Ya, sudah Bapak diam saja!

672. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [01:31:40]

Oleh karena itu, apabila yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini, kami secara tegas menyatakan keberatan, Yang Mulia.

673. KETUA: SUHARTOYO [01:31:52]

Yang mana ini?

674. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [01:31:54]

Terhadap Riyan Ramadani dan Nur Yusuf.

675. KETUA: SUHARTOYO [01:31:59]

Nur Yusuf, oke.

Jadi, untuk ... anu ya ... PPS yang akan datang ya, terpilih lagi. Kemudian kalau yang Ir. Iden, tidak? Oke. Jadi ... terus Termohon siapa saja, Pak, saksi, Pak?

676. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [01:32:25]

Izin. Jadi, dari 5 saksi yang kita ajukan itu, Yang Mulia, yang hadir adalah Bongsu Syahputra.

677. KETUA: SUHARTOYO [01:32:36]

Terus?

678. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [01:32:34]

Terus, kemudian kami menghadirkan nanti sebagai keterangan dari KPU Kabupaten Bekasi, ada Pak Khoiruddin, Komisioner KPU Bekasi.

679. KETUA: SUHARTOYO [01:32:49]

Pak Ihsan Nuur (...)

680. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [01:32:50]

Kami tidak memasukkan.

681. KETUA: SUHARTOYO [01:32:53]

Ihsan Nuur Hidayatulloh?

682. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [01:32:54]

Tidak hadir juga, Yang Mulia.

683. KETUA: SUHARTOYO [01:32:58]

Jadi, cuma 2 yang hadir, Bongsu Syahputra dan Febby H. Ririhena?

684. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [01:33:04]

Tidak hadir juga. Jadi kalau dari yang pertama, kami itu hanya ada satu yang hadir, Yang Mulia.

685. KETUA: SUHARTOYO [01:33:09]

Siapa?

686. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [01:33:11]

Bongsu Syahputra.

687. KETUA: SUHARTOYO [01:33:10]

Oh, terus? Mau ganti yang mana Bapak? Enggak, boleh ganti-ganti.

688. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [01:33:15]

Ya, hanya saja nanti apabila diperlukan, kami juga hadir kepada persidangan ini, ada Komisioner KPU Bekasi apabila diperlukan keterangan.

689. KETUA: SUHARTOYO [01:33:27]

Oh, bila diperlukan.
Oke, jadi (...)

690. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:33:32]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami dari Pihak Pemohon menolak secara tegas saksi yang diajukan oleh Termohon, yaitu Saudara Bongsu Syahputra karena Saudara Bongsu Syahputra telah diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 24 Tahun 2024, sebagai tindak lanjut dari Putusan Bawaslu Kabupaten Bekasi (...)

691. KETUA: SUHARTOYO [01:33:45]

Ya.

692. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:33:46]

Nomor 7/LP/ADM.PL/BWSLKabupaten/13.12/III/2024, Yang Mulia. Mohon dipertimbangkan, Yang Mulia.

693. KETUA: SUHARTOYO [01:34:01]

Ya, tapi kan (...)

694. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:34:02]

Mohon dipertimbangkan, Yang Mulia.

695. KETUA: SUHARTOYO [01:34:04]

Ya, kami catat.

696. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [01:34:07]

Izin, Yang Mulia. Pemberhentian itu terhadap semuanya, termasuk kepada Erwin dan ... apa ... Rahmat juga, Yang Mulia.

697. KETUA: SUHARTOYO [01:34:12]

Kami catat, tapi kan pemberhentian seperti itu tidak menghilangkan hak sebagai warga negara untuk bersaksi, ya. Nah, soal nanti kualitas kesaksiannya kan Hakim yang akan mempertimbangkan.

Kemudian, Ahlinya Pak Dr. Jamin Ginting. Sudah hadir?

698. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:34:33]

Hadir, Yang Mulia.

699. KETUA: SUHARTOYO [01:34:40]

Silakan.

Terima kasih, Pak. Ini sudah approved, ya? Oke, terima kasih.

Prof. Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., Magister Kenotariatan. Untuk saksi yang kebetulan Agamanya Islam, saya pandu untuk pengucapan sumpahnya nanti. Prof. Jamin Ginting dipandu Yang Mulia Bapak Daniel.

700. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [01:35:16]

Izin, Yang Mulia, Pak Bongsu masih di belakang.

701. KETUA: SUHARTOYO [01:35:20]

Oh, ya. Kok tidak muncul dari tadi, apa setengah hati atau bagaimana? Pak Bongsu, Islam, kan? Saksi, kan? Gabung, Pak. Saya pandu sumpahnya, ikuti saya, ya, yang Muslim. Diangkat ... anu ... al-Qurannya. Ikuti!

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai saksi akan memberi keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

702. SELURUH SAKSI BERSUMPAH: [01:35:35]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai saksi akan memberi keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

703. KETUA: SUHARTOYO [01:35:48]

Silakan, Yang Mulia, untuk Prof. Jamin Ginting.

704. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:35:51]

Baik, terima kasih. Untuk ahli, Prof. Dr. Jamin Ginting, ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya".

705. AHLI BERAGAMA KRISTEN [01:36:22]

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

706. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:36:28]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia, Pak Ketua.

707. KETUA: SUHARTOYO [01:36:28]

Baik, terima kasih Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat. Pak Erwin, ya. Apa yang mau diceritakan? Ketika itu anggota PPK di mana, Pak?

708. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [01:37:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya di Cikarang Barat.

709. KETUA: SUHARTOYO [01:37:16]

Cikarang Barat. Apa yang mau dijelaskan dengan perkara ini?

710. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [01:37:26]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan saya menerangkan kesakian saya bahwa rapat pleno terbuka tingkat Kecamatan Cikarang Barat dilaksanakan dari tanggal 20 Februari sampai 6 Maret 2024 di Aula Pendopo Desa Danau Indah. Pada rapat pleno terbuka, terjadi keributan dari saksi partai politik yang meminta agar dilakukan pencermatan dan pemeriksaan sebelum Form D. Hasil Kecamatan ditetapkan.

711. KETUA: SUHARTOYO [01:37:56]

Dari partai apa, Pak, yang keberatan?

712. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [01:38:01]

Maksudnya, Yang Mulia?

713. KETUA: SUHARTOYO [01:38:02]

Yang keberatan dari siapa?

714. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [01:38:04]

Yang keberatan dari saksi partai.

715. KETUA: SUHARTOYO [01:38:07]

Ya, partai apa?

716. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [01:38:09]

Saksi partai dari Gerindra.

717. KETUA: SUHARTOYO [01:38:12]

Gerindra?

718. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [01:38:13]

Gerindra, Yang Mulia.

719. KETUA: SUHARTOYO [01:38:14]

Betul? Siapa namanya?

720. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [01:38:18]

Partai Gerindra, waktu itu Andi.

721. KETUA: SUHARTOYO [01:38:21]

Andi? Bapak waktu itu melihat tidak kejadiannya?

722. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [01:38:29]

Saya kebetulan di panel yang satu lagi, Yang Mulia.

723. KETUA: SUHARTOYO [01:38:35]

Panel yang satu? Terus yang keberatan di panel satunya lagi?

724. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [01:38:40]

Ya.

725. KETUA: SUHARTOYO [01:38:41]

Berarti tidak lihat kejadiannya?

726. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [01:38:43]

Tidak lihat kejadiannya. Cuma ya, ada kericuhan kan berdekatan itu.

727. KETUA: SUHARTOYO [01:38:48]

Ya. Apa keberatannya, Pak?

728. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [01:38:50]

Ya, dia meminta data hasil rekap.

729. KETUA: SUHARTOYO [01:38:55]

Hasil rekap berarti keberatan itu setelah (...)

730. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [01:38:55]

Pleno ... Pleno sebelumnya.

731. KETUA: SUHARTOYO [01:38:59]

Pleno sebelumnya di mana?

732. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [01:38:59]

He eh. Di Pleno itu juga, dari hasil yang kemarin.

733. KETUA: SUHARTOYO [01:39:06]

Memang berapa kali Pleno sih, Pak?

734. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [01:39:12]

Pleno kan dari tanggal 20.

735. KETUA: SUHARTOYO [01:39:10]

Tiap hari itu Pleno?

736. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [01:39:14]

Ya.

737. KETUA: SUHARTOYO [01:39:15]

Dia minta Pleno yang hari apa?

738. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [01:39:17]

Dari pertama awal itu enggak dikasih data.

739. KETUA: SUHARTOYO [01:39:20]

Keberatan itu?

740. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [01:39:21]

Ya.

741. KETUA: SUHARTOYO [01:39:22]

Dituangkan dalam bentuk apa keberatan itu?

742. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [01:39:25]

Dituangkan dalam bentuk, ada ini apa tadi?

743. KETUA: SUHARTOYO [01:39:30]

Apakah hanya protes atau ada masuk dalam form atau secara formal secara resmi?

744. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [01:39:41]

Protes, Yang Mulia.

745. KETUA: SUHARTOYO [01:39:43]

Protes.

746. KETUA: SUHARTOYO [01:39:44]

Dituangkan dalam bentuk tulisan tidak, formal? Bapak tidak tahu, ya? Rahmat Zeri, apa yang diketahui tentang Perkara ini?

747. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:40:06]

Ya. Ya, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan Saksi menerangkan kesaksian di bawah ini. Assalamualaikum wr.wb.

Yang pertama, Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kecamatan Cikarang Barat dilaksanakan dari tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 (...)

748. KETUA: SUHARTOYO [01:40:27]

Ya.

749. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:40:28]

Di Aula Desa Danau Indah.

750. KETUA: SUHARTOYO [01:40:29]

Ini kejadian yang se ... yang ... yang Saudara saksikan ada apa? Ketika (...)

751. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:40:35]

Jadi kejadian pas pleno itu terjadi kericuhan, Pak.

752. KETUA: SUHARTOYO [01:40:42]

Kericuhan?

753. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:40:42]

He em.

754. KETUA: SUHARTOYO [01:40:43]

Sama yang diceritakan Erwin tadi?

755. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:40:45]

Betul. Jadi (...)

756. KETUA: SUHARTOYO [01:40:46]

Bentuknya apa kericuhan itu, Pak?

757. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:40:48]

Awal dari kericuhan itu berawal dari saksi partai untuk meminta sanding data.

758. KETUA: SUHARTOYO [01:40:57]

Saksi siapa?

759. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:40:59]

He em. Nah, yang saya maksud di sini Saksi dari Partai PKS, Pak.

760. KETUA: SUHARTOYO [01:41:03]

Bukan Gerindra?

761. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:41:05]

He em, dari PKS. ini (...)

762. KETUA: SUHARTOYO [01:41:06]

Siapa namanya?

763. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:41:08]

Saksi PKS itu atas nama Siswoto.

764. KETUA: SUHARTOYO [01:41:14]

Kalau si Pak Erwin tadi Partai Gerindra, ya?

765. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:41:20]

He em.

766. KETUA: SUHARTOYO [01:41:21]

Jangan *he em*, gitu. *Ya*, gitu.

767. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:41:23]

Ya, gitu.

768. KETUA: SUHARTOYO [01:41:24]

Terus, bagaimana lanjutannya?

769. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:41:26]

Nah, lanjutannya dari pihak saksi tersebut meminta belum mendapatkan hasil perhitungan suara per desa.

770. KETUA: SUHARTOYO [01:41:36]

Maksudnya ketika perhitungan sebelumnya?

771. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:41:37]

He em. Ya, dan kedua, Form D.Hasil tidak dilampirkan hasil pleno per desa.

772. KETUA: SUHARTOYO [01:41:44]

Baik.

773. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:41:45]

He em.

774. KETUA: SUHARTOYO [01:41:46]

Ketika kericuhan itu, kemudian apa yang diputuskan oleh pihak KPU?

775. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:41:53]

Nah, untuk kericuhan, jadi (...)

776. KETUA: SUHARTOYO [01:41:55]

Atau PPK?

777. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:41:58]

Di situ ada penengahnya itu panwascam.

778. KETUA: SUHARTOYO [01:42:00]

Panwascam.

779. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:42:01]

Ya, Yang Mulia.

780. KETUA: SUHARTOYO [01:42:02]

Ditengahi seperti apa, Pak?

781. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:42:03]

He em.

782. KETUA: SUHARTOYO [01:42:04]

Ditengahi seperti apa?

783. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:42:05]

Nah, di tengah panwascam, panwascam sudah menuangkan, menerbitkan untuk melakukan sanding data.

784. KETUA: SUHARTOYO [01:42:15]

Sanding data?

785. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:42:17]

Ya, pencermatan.

786. KETUA: SUHARTOYO [01:42:19]

Sudah dilakukan?

787. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:42:20]

Nah ... belum, belum dilakukan, Pak. He em, tapi sudah mengeluarkan surat, tapi pelaksanaan sanding data itu belum terealisasi.

788. KETUA: SUHARTOYO [01:42:34]

Jadi ada perintah dari panwascam untuk sanding data?

789. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:42:37]

He em.

790. KETUA: SUHARTOYO [01:42:38]

Tapi belum ada tindak lanjutnya?

791. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:42:40]

Belum ada, Pak. He em.

792. KETUA: SUHARTOYO [01:42:42]

Bukti berapa itu? Pemohon mengajukan bukti enggak ini? Tentang ini?

793. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:42:50]

Mengajukan, Yang Mulia.

794. KETUA: SUHARTOYO [01:42:51]

P berapa? Itu untuk sanding data berapa TPS, Pak?

795. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:43:00]

Untuk sanding data dari 317 TPS, Yang Mulia.

796. KETUA: SUHARTOYO [01:43:03]

Bukan. Yang ditanya Saksi.

797. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:43:05]

Yang sanding data yang saya tahu itu semuanya, Pak.

798. KETUA: SUHARTOYO [01:43:09]

Semuanya?

799. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:43:09]

Ya, semua per desa, jadi (...)

800. KETUA: SUHARTOYO [01:43:11]

Berapa TPS itu?

801. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:43:12]

543 TPS.

802. KETUA: SUHARTOYO [01:43:19]

Sudah dilakukan?

803. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:43:20]

Belum, Pak. Belum, belum, Yang Mulia.

804. KETUA: SUHARTOYO [01:43:21]

Memang bentuk ... bentuk rekomendasinya panwas, apa? Ada ... ada rekomendasinya?

805. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:43:30]

Ada, Yang Mulia. Ini.

806. KETUA: SUHARTOYO [01:43:30]

P berapa, Pak? Pak Kuasa Hukum.

807. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:43:37]

Mohon izin untuk yang kita jadikan bukti di sini dari mulai D.Hasil dari P-4 (...)

808. KETUA: SUHARTOYO [01:43:43]

Bukan, yang berkaitan dengan sanding data itu, lho.

809. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:43:47]

Itu dari P-5 sampai dengan (...)

810. KETUA: SUHARTOYO [01:43:55]

Itu kan harusnya tidak banyak-banyak.

811. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:43:56]

323, Yang Mulia.

812. KETUA: SUHARTOYO [01:43:58]

P-5 sampai 323?

813. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:44:00]

Ya, untuk C.Hasil semua itu, Yang Mulia.

814. KETUA: SUHARTOYO [01:44:01]

Oh, bukan. Perintah untuk sanding data itu lho Pak, dituangkan dalam bentuk apa oleh panwascam itu? Itu yang ... Pak Rahmat itu pegang apa?

815. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:44:12]

Suratnya, Pak.

816. KETUA: SUHARTOYO [01:44:13]

Surat dari Panwascam itu?

817. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:44:14]

Dari Panwascam. Terkait diarahkan agar PPK itu mengadakan sanding data.

818. KETUA: SUHARTOYO [01:44:19]

Yang 500 TPS itu? Semua desa itu?

819. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:44:21]

500 TPS itu, semua desa. Agar tidak terjadi (...)

820. KETUA: SUHARTOYO [01:44:25]

Mana Pemohon di T berapa, itu? Yang dipegang Bapak itu dijadikan alat bukti tidak? Itu belum dilakukan, Pak?

821. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:44:39]

Belum. Belum dilakukan, Yang Mulia.

822. KETUA: SUHARTOYO [01:44:42]

Pak Riyan apa yang disampaikan?

823. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:44:46]

Izin, Yang Mulia.

Saya ingin menyampaikan, telah terjadinya pergeseran suara Gerindra atau perpindahan pergeseran suara Gerindra sebanyak 70 suara pada Desa Jatiwangi. 70 suara itu dari 16 TPS, yaitu TPS 1, 2, 3, 4, dan

5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Akumulasi pergeseran suara itu atau perpindahan suara itu, suara Partai Gerindra dan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, pemilih Bekasi 2, Partai Gerindra di Desa Jatiwangi. Jadi (...)

824. KETUA: SUHARTOYO [01:45:28]

Berapa akumulasi suaranya?

825. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/20249: RIYAN RAMADANI [01:45:30]

70 untuk (...)

826. KETUA: SUHARTOYO [01:45:31]

70.

827. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:45:31]

Desa Jatiwangi.

828. KETUA: SUHARTOYO [01:45:33]

Dari berapa TPS tadi?

829. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:45:35]

16.

830. KETUA: SUHARTOYO [01:45:36]

16. 16 TPS?

831. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:45:37]

Ya.

832. KETUA: SUHARTOYO [01:45:38]

70 suara?

833. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:45:39]

Ya.

834. KETUA: SUHARTOYO [01:45:42]

Suara Gerindra ke?

835. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:45:43]

Jadi suara partai ke suara calon.

836. KETUA: SUHARTOYO [01:45:46]

Sama-sama Gerindra?

837. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:45:48]

Ya.

838. KETUA: SUHARTOYO [01:45:49]

Oke. Apa lagi?

839. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:45:51]

Sudah, cukup, yang saya sampaikan.

840. KETUA: SUHARTOYO [01:45:53]

Terus waktu itu ada temuan itu di mana ketahuan ini?

841. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:45:57]

Saya waktu itu kan pas pleno memang ada rame juga tuh, kerusuhan (...)

842. KETUA: SUHARTOYO [01:46:05]

Ya.

843. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:46:56]

Antara saksi partai, cuma saya enggak tahu apa yang terjadi. Akhirnya setelah pleno, saya diberikan hasil Sirekap oleh PPK untuk cross-check. Setiap TPS di cross-check ada perbedaan atau tidak dan saya cross-check dengan C.Salinan dan D.Hasil itu ada perbedaan dari Sirekap.

844. KETUA: SUHARTOYO [01:46:30]

Ini saksi siapa ketika itu? Saksi yang 70 suara Gerindra ter ... apa ... ada persoalan dari caleg ke partai itu. Ada mempersoalkan?

845. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:46:41]

Waktu itu kerusuhannya itu pas yang tadi dibilang Bang Rahmat, untuk cross-check data semua desa. Tapi enggak dikasih, akhirnya rusuh. Nah, ternyata (...)

846. KETUA: SUHARTOYO [01:46:54]

Ini yang Desa Jatiwangi ini bagian dari PPK Cikarang Barat?

847. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:46:59]

Saya PPS-nya.

848. KETUA: SUHARTOYO [01:47:00]

Ya, maksudnya PPS Desa Jatiwangi ini termasuk di Cikarang Barat?

849. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:47:06]

Ya.

850. KETUA: SUHARTOYO [01:47:07]

Oke. Ini termasuk yang kemudian menjadi pemicu minta supaya ... apa ... hasil pleno sebelumnya diminta itu?

851. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:47:21]

Sanding data, pencocokan.

852. KETUA: SUHARTOYO [01:47:22]

Kemudian setelah dilaporkan ke panwas, supaya diperintahkan sanding data itu?

853. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:47:27]

Ya.

854. KETUA: SUHARTOYO [01:47:30]

Sudah dilakukan belum, sanding data itu?

855. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:47:32]

Belum.

856. KETUA: SUHARTOYO [01:47:34]

Ir. Iden tidak ada, ya?

857. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [01:47:38]

Ada.

858. KETUA: SUHARTOYO [01:47:39]

Iden, silakan.

859. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDEN [01:47:42]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wr.wb.

Kami atas nama PPS Kelurahan Telaga Asih ingin menyampaikan bahwa telah terjadi pergeseran dan/atau perpindahan perolehan suara Partai Gerindra dan suara calon anggota DPR Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi Dapil 2, Partai Gerindra Nomor Urut 4 atas nama Ella Tri Rahmawati dengan total perse ... pergeseran dan/atau perpindahan

suara sebanyak 395 surat suara dari 37 TPS di Kelurahan Telaga Asih (...)

860. KETUA: SUHARTOYO [01:48:26]

Ini dari partai ke ... ke caleg atau ini beda lagi?

861. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDEN [01:48:30]

Dari ... dari ... dari partai juga dari caleg juga, jumlah total 300 (...)

862. KETUA: SUHARTOYO [01:48:37]

395.

863. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDEN [01:48:37]

395 dari (...)

864. KETUA: SUHARTOYO [01:48:39]

Ini di Desa Telaga Asih.

865. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDEN [01:48:41]

Ya, Kelurahan Telaga Asih dari 37 TPS (...)

866. KETUA: SUHARTOYO [01:48:46]

TPS.

867. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDEN [01:48:41]

Kelurahan Telaga Asih, yaitu TPS 2, TPS 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 54, 55, 61.

Berdasarkan persandingan Formulir C.Hasil Salinan PPS dengan data Sirekab PPK Cikarang Barat dan bersanding rekap manual PPS dengan D.Hasil Kecamatan. Akumulasi pergeseran dan/atau perpindahan perolehan suara tersebut dengan rincian sebagai berikut. Akumulasi

pergeseran perpindahan perolehan suara partai dan suara calon jumlah TPS yang tertera 37 TPS (...)

868. KETUA: SUHARTOYO [01:49:46]

Ya, sudah tadi. 37 dan suaranya akumulasinya 395, kan?

869. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDEN [01:49:51]

395, ya.

870. KETUA: SUHARTOYO [01:49:52]

Sudah.

871. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDEN [01:49:53]

Rincian perselisihan suara Partai Gerindra dan suara calon nomor urut (...)

872. KETUA: SUHARTOYO [01:49:55]

Ya, sudah, akumulasinya saja. Dari 37 TPS itu terakumulasi 395 suara, ya?

873. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDEN [01:50:03]

Ya.

874. KETUA: SUHARTOYO [01:50:04]

Desa Telaga Asin atau Telaga Asih?

875. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDEN [01:50:06]

Kelurahan Telaga Asih.

876. KETUA: SUHARTOYO [01:50:07]

Oke. Nur Yusuf.

877. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR YUSUF [01:50:13]

Ya, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia. Saya PPS dari Desa Telajung akan membacakan adanya pergeseran suara dari suara partai ke suara calon, yaitu sebanyak 198 suara yang terjadi di 61 TPS dari jumlah TPS 68, yaitu TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12 (...)

878. KETUA: SUHARTOYO [01:50:45]

Berapa TPS, Pak?

879. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR YUSUF [01:50:46]

Ya.

880. KETUA: SUHARTOYO [01:50:46]

Berapa TPS?

881. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR YUSUF [01:50:47]

61, Pak.

882. KETUA: SUHARTOYO [01:50:48]

61.

883. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR YUSUF [01:50:49]

Dari jumlah 68, 68 TPS (...)

884. KETUA: SUHARTOYO [01:50:54]

Di (...)

885. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR YUSUF [01:50:54]

Yang ada di Desa Telajung.

886. KETUA: SUHARTOYO [01:50:55]

Oh. Berapa akumulasi suaranya?

887. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR YUSUF [01:50:59]

Akumulasi suara yang dipindahkan dari suara partai ke caleg ... salah satu caleg, yaitu 198.

888. KETUA: SUHARTOYO [01:51:07]

Gerindra juga ini?

889. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR YUSUF [01:51:07]

Ya, sama, Ketua.

890. KETUA: SUHARTOYO [01:51:11]

Oke.

891. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR YUSUF [01:51:12]

Terima kasih.

892. KETUA: SUHARTOYO [01:51:13]

Pak Rahmat, itu yang kertas itu bisa diserahkan ke Hakim tidak?

893. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [01:51:22]

Bisa, Yang Mulia.

894. KETUA: SUHARTOYO [01:51:28]

Dari Pemohon tidak ada betul itu, bagaimana itu? Koordinasi itu (...)

895. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:51:35]

Mohon izin, Yang Mulia. Dari kami sudah ada Bukti di P-340, Yang Mulia. Mengenai saran perbaikan dari Bawaslu, Yang Mulia. Yang ditujukan kepada PPK.

896. KETUA: SUHARTOYO [01:51:47]

P-340?

897. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:51:48]

P-340, Yang Mulia.

898. KETUA: SUHARTOYO [01:51:49]

Sama dengan itu?

899. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:51:51]

Dan 3 ... P-340 dan P-341, Yang Mulia.

900. KETUA: SUHARTOYO [01:51:53]

Sama dengan itu? Dengan yang dibawa Pak Rahmat itu?

901. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [01:51:58]

Bukan, Yang Mulia. Tapi ini hanya perintah dari Bawaslu, Yang Mulia.

902. KETUA: SUHARTOYO [01:52:03]

340, 341, dan ... dari Ihsan ... oh, ini dari Termohon, sebentar nanti ahlinya. Hanya Pak Bongsu, ya?

903. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:52:24]

Ya, Yang Mulia.

904. KETUA: SUHARTOYO [01:52:25]

Apa yang mau disampaikan, Pak Bongsu?

905. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:52:36]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bongsu Saputra. Saya warga Indonesia.

Terkait rekapitulasi tingkat Kecamatan Cikarang Barat, kebetulan, Majelis, saya sebagai ketua PPK. Saya menjalankan rekapitulasi hasil perhitungan suara mulai dari awal sampai akhir, itu saya ... apa ... melakukan dengan mendasari PKPU. Jadi kita itu, cara ... apa ... cara kita merekapitulasi itu, C.Hasil itu kita tempelin, Pak, di papan tulis.

906. KETUA: SUHARTOYO [01:53:18]

Enggak, artinya selama proses penghitungan suara di tempat Bapak itu selaku PPK, tidak ada persoalan?

907. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:53:27]

Kalau persoalan yang tadi bicara kerusuhan memang ada.

908. KETUA: SUHARTOYO [01:53:30]

Ada.

909. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:53:30]

Cuma dari par (...)

910. KETUA: SUHARTOYO [01:53:31]

Bapak di PPK mana?

911. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:53:33]

Saya Cikarang Barat, Pak.

912. KETUA: SUHARTOYO [01:53:34]

Cikarang Barat. Apa ... bentuk kerusuhannya apa?

913. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:53:39]

Minta pencermatan, Pak.

914. KETUA: SUHARTOYO [01:53:40]

Baik.

915. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:53:41]

He eh. Cuma ini hanya 2 saksi partai, dari Partai Buruh sama Partai PBB. Nah (...)

916. KETUA: SUHARTOYO [01:53:49]

Yang minta pencermatan itu?

917. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:53:51]

Ya, tapi kan masih berjalan pleno, gitu. Jadi teman-teman saksi yang lain merasa ... apa ... karena forum kan saya lempar, Pak.

918. KETUA: SUHARTOYO [01:54:02]

Merasa apa? Belum selesai?

919. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:54:04]

Maksudnya karena belum selesai kan saya lempar ke forum. "Gimana, forum mau kita cermati sekarang, apa dilanjut dulu?". Yang lain minta dilanjut, gitu. Jadi yang dua saksi ini tidak terima dengan keputusan yang saya lakukan, Pak. Saya melakukan bahwasannya, saya lanjut. Saya ketok palu, saya lanjutkan.

920. KETUA: SUHARTOYO [01:54:23]

Lanjutkan.

921. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:54:25]

Dia chaos, gitu. Langsung diamankan sama pihak kepolisian lalu dibawa dan diusir, Pak.

922. KETUA: SUHARTOYO [01:54:32]

Kalau yang sampai ke paman ... panwas tadi?

923. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:54:39]

Kalau panwas itu hanya statement saja sih, Pak. Dia enggak ... apa ... enggak bicara yang lain.

924. KETUA: SUHARTOYO [01:54:47]

Tidak ada rekomendasi dari panwas?

925. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:54:49]

Tidak ada.

926. KETUA: SUHARTOYO [01:54:56]

Oke, jadi yang disampaikan Saksi Rahmat tadi sama dengan P-340. Memang bukan rekomendasi, sih.

927. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:55:07]

Lanjut, Pak? Apa selesai?

928. KETUA: SUHARTOYO [01:55:09]

Apa yang mau ditambahkan?

929. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA

Kenapa?

930. KETUA: SUHARTOYO [01:55:12]

Yang mau ditambahkan apa?

931. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:55:15]

Mungkin itu dulu. Nanti saya tunggu pertanyaan dari Pak Majelis.

932. KETUA: SUHARTOYO [01:55:18]

Kok tadi masih mau nambah itu?

933. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [01:55:20]

Kirain, Pak, maaf.

934. KETUA: SUHARTOYO [01:55:21]

Begitu disuruh tambahkan, sudah cukup.

Oke, sebelum nanti ada yang mengajukan pertanyaan. Silakan Ahli, Prof.

Mau di depan juga boleh.

935. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JAMIN GINTING [01:55:34]

Di sini saja, Yang Mulia.

936. KETUA: SUHARTOYO [01:55:35]

Sebelahnya sana, Prof. Sebelahnya Prinsipal ... anu ... Kuasa Hukum, Prof. Yang di belakang itu.

937. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JAMIN GINTING [01:56:09]

Baik, terima kasih.

Selamat sore, yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Anggota, Pihak Pemohon, dan Para Termohon, serta hadirin yang kami muliakan, assalamualaikum wr. wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Adapun permasalahan yang disampaikan saya sebagai Ahli terkait dengan adanya perselisian hasil perhitungan perolehan suara partai politik, dan suara calon dalam C.Hasil dengan D.Hasil. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan di sini terkait dengan implikasi permohonan ini, sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang sebagaimana diubah Perppu 1/2022 dan juga 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Adanya suatu prinsip mandiri, jujur, adil, berkepasian hukum, tertib dan terbuka, dan lain sebagainya. Perlu Ahli sampaikan bahwa indikator-indikator yang bisa kita cermati terkait dengan adanya

perselisihan terkait dengan hasil pemilu di kabupaten maupun daerah terkait dengan C.Hasil dan D.Hasil yang terjadi sehubungan dengan kasus dari Pemohon ini, ada beberapa hal.

Pertama, yaitu indikator itu kita bisa lihat dengan adanya pegeseran perubahan perolehan suara partai, suara calon anggota DPRD dalam satu partai, di mana dibuktikan dengan persandingan perolehan suara dalam C.Hasil dengan perolehan suara yang di-input dalam sistem rekapitulasi elektronik atau Sirekap yang digunakan pada pemilu Tahun 2024. Lalu, adanya anggota panitia pemilihan tingkat kecamatan PPK yang tidak menandatangani Formulir Model D.Hasil kecamatan atau berita acara sertifikat hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota pemilu tahun 2024, yang ditetapkan oleh panitia PPK.

Lalu, juga ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait dengan pelanggaran administrasi pemilu panitia pemilihan PPK di Cikarang Barat. Juga adanya keputusan Badan Pengawas Pemilu tentang pelanggaran administrasi pemilu panitia pemilihan di tingkat kecamatan dan terakhir adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang pemberhentian dengan tidak hormat dan diberhentikan sementara sebagai anggota panitia pemilihan kecamatan.

Dari indikator-indikator tersebut bahwa adanya pergeser dan perubahan perolehan suara yang terjadi di tempat pemungutan suara merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Karena itu bahwa pergeseran perolehan suara dapat mengakibatkan keributan, tadi yang sudah disampaikan adanya simpatisan dari anggota (ucapan tidak terdengar jelas) masing-masing yang tidak puas dengan penyelenggaraan pemilu tersebut. Dengan demikian, dari indikator-indikator itu, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan tentu dapat disimpulkan bahwa putusan terkait yang dikeluarkan oleh ... dikeluarkan oleh panitia pemilihan umum 2004, khususnya terlampir dalam lampiran yang sudah disampaikan oleh Pemohon memiliki cacat hukum. Demikian.

938. KETUA: SUHARTOYO [01:59:54]

Baik, Terima kasih, Prof.

939. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEK [02:00:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ke saksi Pak Erwin Maradona Harahap. Ini nanti sekalian dengan saksi Pak Rahmat Zeri Dusti dan Ir. Iden, ya. Tadi dinyatakan bahwa rekapitulasi itu dari tanggal 20 Februari sampai dengan 6 Maret. Nah, lalu keterangan dari Pak Erwin ini mengatakan terjadi keributan. Itu boleh dijawab tanggal berapa keributannya antara tanggal 20 Februari sampai 6 Maret?

940. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [02:00:41]

Panel 1, yang Mulia

941. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:45]

Ya, itu tanggal berapa keributannya?

942. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [02:00:47]

Tanggal 6.

943. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:49]

Berarti di akhir?

944. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [02:00:50]

Di akhir.

945. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:52]

Diakhir ya, jadi bukan di pertengahan, tapi di akhir?

946. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [02:00:55]

Benar.

947. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:56]

Oke, nah kemudian yang ribut itu apakah antar, atau intern partai atau juga seluruh peserta partai yang hadir pada waktu itu?

948. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [02:01:11]

Saksi partai.

949. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:13]

Yang ribut hanya dari partai? Saksi partai?

950. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [02:01:16]

Ya, saksi partai ada dua.

951. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:18]

Jadi bukan pergeseran suara di antara anggota satu partai tertentu?

952. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [02:01:23]

Belum kalau yang itu.

953. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:24]

Itu belum, ya?

954. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [02:01:25]

Belum.

955. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:27]

Nah, kemudian tadi juga dinyatakan ada dari PBB dan Partai Buruh.

956. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [02:01:33]

Ya, betul, Yang Mulia.

957. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:36]

Kemudian terjadi chaos. Ini betul, ya?

958. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [02:01:40]

Betul, Yang Mulia.

959. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:41]

Itu tanggal 6 juga?

960. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [02:01:43]

Betul, Yang Mulia.

961. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:45]

Tanggal 6. Nah, kemudian terkait dengan tadi keterangan Pak Rifan[sic!] ya, di 16 TPS ada terjadi pergeseran suara dari partai ke calon suara Gerindra. Ini dasarnya apa ini, Pak Riyan?

962. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [02:02:09]

Ya, izin, Yang Mulia. Dasarnya itu sanding data Sirekap dan C.Salinan dan C.Hasil, C.Hasil Plano.

963. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:20]

Yang 70 suara ini?

964. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [02:02:23]

Ya, jadi C.Salinan yang desa pegang dengan Sirekap yang ada di PPK itu berbeda.

965. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:30]

Nah, ini dari calon siapa ke siapa yang di partai Gerindra ini pergeserannya?

966. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [02:02:38]

Dari suara partai ke calon Nomor Urut 1.

967. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:44]

Atas nama?

968. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [02:02:46]

Iwan Setiawan.

969. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:48]

Oke, kemudian yang berkurang suara siapa, itu?

970. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [02:02:50]

Suara partai, untuk yang berkurang ada di Desa Telaga Asih, dari suara caleg ke caleg.

971. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:59]

Oh, Desa Telaga Asih. Bukan di Desa Jatiwangi?

972. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [02:03:02]

Bukan.

973. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:04]

Nah, Pak Riyan di desa mana?

974. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [02:03:06]

Jatiwangi.

975. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:08]

Oh, jadi itu tidak ada di desa Jatiwangi, ya?

976. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [02:03:12]

Ya, tidak ada.

977. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:13]

Kalau Pak Iden, itu pergeseran itu dari suara siapa ke suara siapa atau ke partai saja?

978. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDEN [02:03:21]

Baik, Yang Mulia. Pergeseran dari suara partai ke Nomor Urut 1, Iwan Setiawan dan Caleg Nomor Urut 4 Ella Tri Rahmawati dengan total pergeseran dari 37 TPS itu berjumlah 390 suara. Itu yang dapat saya sampaikan.

979. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:49]

390 atau 395?

980. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDEN [02:03:51]

395, maaf-maaf.

981. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:53]

395, saya catat ini 395. Kemudian yang tadi ... ini Pak Nur Yusuf, ya.

982. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR YUSUF [02:03:59]

Ya. Siap, Yang Mulia.

983. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:01]

Yang 198 suara di 68 TPS itu, dari 68 itu, ada 61 TPS itu (...)

984. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR YUSUF [02:04:10]

Pergeseran, jadi dari suara partai ke suara calon, Calon Nomor Urut 1.

985. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:14]

Nomor Urut 1?

986. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR YUSUF [02:04:16]

Ya, dari suara partai ke suara calon Nomor Urut 1.

987. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:18]

Jadi, kalau terjadi pergeseran ini, ada selain si Pemohon, ya. Lydia Francisca, ada juga ada dari yang lain, ya, kepada suara calon Nomor 1, itu?

988. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR YUSUF [02:04:33]

Tidak ada, Pak.

989. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:35]

Tidak ada?

990. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR YUSUF [02:04:37]

Tidak ada.

991. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:38]

Oh, kalau di TPS, Bapak di Desa Telajung, ya?

992. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR YUSUF [02:04:40]

Ya.

993. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:42]

Kalau di Desa Telajung tidak, ya?

994. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR YUSUF [02:04:46]

Tidak. Hanya dari partai ke caleg aja.

995. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04:47]

Oke, sementara itu, Yang Mulia, terima kasih.

996. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:04:55]

Ini untuk Ahli Prof. Jamin Ginting. Ini kan Prof. Jamin Ginting tadi sudah menyampaikan bahwa pergeseran suara itu merupakan satu bentuk pelanggaran hukum, ya, kan begitu Prof, ya? Kemudian karena itu pelanggaran hukum, sementara keputusan KPU ini cacat hukum. Nah, apakah ini pandangan Ahli secara umum atau memang ini menyangkut Perkara ... apa ... Nomor 59, ini?

997. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JAMIN GINTING [02:05:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari data-data yang saya miliki memang saya melihat ada beberapa data-data yang masuk dalam kategori yang saya sampaikan tadi, Yang Mulia.

998. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:05:45]

Berarti ini termasuk yang 59 ini, dipandang sudah cacat gitu, ya?

999. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JAMIN GINTING [02:05:50]

Demikian, Yang Mulia.

1000. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:05:54]

Oke. Dari data yang Prof sampaikan ... apa ... dari data yang Prof miliki itu dari ... apa ... dari Pemohon saja atau dari semua bacaan dari Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan sebagainya atau satu pihak saja?

1001. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JAMIN GINTING [02:06:12]

Yang saya dapatkan ini dari Pemohon, Yang Mulia.

1002. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:06:14]

Pemohon saja?

1003. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JAMIN GINTING [02:06:16]

Ya, Yang Mulia.

1004. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:06:16]

Oke, baik. Oke, terima kasih, Prof.

Kemudian, ya saya juga balik ke soal kerusakan ini, Pak Riyan, ini, ya. Riyan, ya, Pak Riyan. Oke, ini ada 70 suara di 16 TPS, ini hasil cross-check-nya ini penyebab kericuhan tadi ini karena tidak diberikannya ... apa ... persandingan oleh 2 Saksi tadi, ya.

1005. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [02:06:51]

Ya, Yang Mulia, kalau kericuhannya ini ada di pleno hari akhir

1006. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:06:53]

Pleno hari akhir karena?

1007. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [02:06:54]

Seperti yang Rahmat katakan juga.

1008. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:06:56]

Karena kericuhan disebabkan oleh?

1009. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [02:06:58]

Dia minta cross-check semua desa.

1010. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:06:58]

Semua desa. 2 Saksi ini?

1011. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [02:07:05]

Ya.

1012. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:07:05]

Sementara yang lain, Saksi yang lain tidak ada masalah, gitu?

1013. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIYAN RAMADANI [02:07:08]

Ya.

1014. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:07:11]

2 Saksi ini yang kemudian. Kemudian saya langsung pindah ke Pak Bongsu Syahputra, ya, Saksi Termohon. Apakah yang dimaksud kericuhan ini yang, Pak Bongsu, putuskan itu kemudian melanjutkan?

1015. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:07:27]

Betul.

1016. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:07:27]

Yang itu maksudnya ini?

1017. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:07:30]

Betul.

1018. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:07:34]

Atas dasar dua yang (...)

1019. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:07:35]

Dasarnya kesepakatan forum, Pak.

1020. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:07:36]

Kesepakatan?

1021. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:07:37]

Forum.

1022. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:07:37]

Forum.

1023. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:07:38]

Forum itu beberapa saksi kan banyak.

1024. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:07:38]

Untuk melanjutkan, sementara 2 Saksi ini (...)

1025. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:07:43]

Tidak mau.

1026. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:07:43]

Tidak mau, sehingga walkout atau dia langsung?

1027. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:07:46]

Pertama chaos dulu, dia banting meja, nendang gitu,

1028. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:07:48]

Banting meja, nendang.

1029. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:07:51]

Ya. Terus karena saya juga sempat emosi, ya, kan, saya juga berdiri Pak, gitu kan karena otot harus dilawan dengan otot kan seperti itu.

1030. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:07:58]

Ya.

1031. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:07:59]

Nah, makanya langsung keamanan cepat, gitu Pak. Sigap keamanannya langsung disterilkan.

1032. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:08:06]

Ya, terus berlangsung kerusuhan berapa lama?

1033. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:08:11]

2 menit sih, enggak lama banget sih.

1034. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:08:14]

Sudah itu selesai, sudah?

1035. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:08:14]

Sudah.

1036. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:08:14]

Diamankan sudah?

1037. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:08:16]

Betul.

1038. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:08:16]

Oke, baik. Terima Kasih, Yang Mulia.

1039. KETUA: SUHARTOYO [02:08:18]

Yang berkaitan dengan adanya laporan yang Panwas itu yang buntut dari pada kericuhan itu, itu ada tidak yang berupa rekomendasi-rekomendasi atau perintah-perintah kepada PPK?

1040. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:08:37]

Tidak ada, Pak

1041. KETUA: SUHARTOYO [02:08:37]

Tidak ada?

1042. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:08:39]

Tidak ada.

1043. KETUA: SUHARTOYO [02:08:43]

Ketika selesai itu rekapitulasi tingkat PPK secara keseluruhan selesai (...)

1044. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:08:48]

Langsung ke KPU?

1045. KETUA: SUHARTOYO [02:08:48]

Bukan.

1046. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:08:48]

Oh, gimana?

1047. KETUA: SUHARTOYO [02:08:54]

Nanti dulu, Saudara ini (...)

1048. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:08:51]

Oh, Ya. Pak.

1049. KETUA: SUHARTOYO [02:08:51]

Jangan otot di ... anu ... balas dengan otot. Saudara sebagai penyelenggara sebenarnya bisa menahan diri, jangan otot.

1050. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:09:01]

Ya, Pak. Maaf.

1051. KETUA: SUHARTOYO [02:09:01]

Jangan otot. Enggak boleh. Nanti harus memposisikan memang sedang melayani. Jadi memang harus ... harus sabar. Beda. Jadi ... apa ... variabelnya beda antara penyelenggara, petugas, dengan warga negara ini posisinya sedang berbeda. Ketika ... kecuali Saudara sedang mempunyai variabel bebas, nah sebagai rakyat atau warga negara yang minta dilayani, nah mungkin bisa. Lain kali mesti harus lebih ... Enggak yang ingin saya tanyakan begini, ketika rekapitulasi sudah final, ada tidak pihak-pihak yang masih mengajukan keberatan?

1052. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:09:44]

Tidak ada, Pak.

1053. KETUA: SUHARTOYO [02:09:44]

Tidak ada? Semua tanda tangan?

1054. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:09:47]

Tanda tangan, Pak.

1055. KETUA: SUHARTOYO [02:09:53]

Termasuk yang tendang meja tadi?

1056. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:09:55]

Kalau yang Buruhnya tanda tangan, pak.

1057. KETUA: SUHARTOYO [02:09:55]

Partai Buruhnya?

1058. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:09:55]

Buruhnya tanda tangan, tapi untuk PBB nya tidak.

1059. KETUA: SUHARTOYO [02:09:58]

Tidak. Selebihnya tanda tangan dan terima. Termasuk Pemohon?

1060. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:10:01]

Ya.

1061. KETUA: SUHARTOYO [02:10:01]

Pemohon dari partai apa sih?

1062. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:10:08]

Gerindra, dia.

1063. KETUA: SUHARTOYO [02:10:10]

Terima ya, tanda tangan ya.

1064. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:10:08]

Ya, tanda tangan.

1065. KETUA: SUHARTOYO [02:10:08]

Saksi mandatnya?

1066. SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:10:11]

Betul.

1067. KETUA: SUHARTOYO [02:10:13]

Dari Pemohon ada pertanyaan untuk Ahli atau Saksinya satu-satu, silakan.

1068. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:10:15]

Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Pertama saya ingin bertanya kepada Saksi yang kami ajukan, Saudara Erwin Maradona.

1069. KETUA: SUHARTOYO [02:10:20]

Ya.

1070. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:10:31]

Saudara Saksi, apakah Saudara Saksi pada saat bertugas sebagai PPK pegang akun Sirekap?

1071. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [02:10:38]

Pegang, pegang.

1072. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:10:40]

Tolong jelaskan apa kewenangan Saudara Saksi terhadap akun Sirekap tersebut dan bagaimana pergeseran suara yang terjadi, sebagaimana yang ada dalam Permohonan kami?

1073. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [02:10:55]

Ya, awalnya saya pegang selaku bidang teknis penyelenggara pemilu, itu pegang Sirekap juga, yaitu sebagai admin. Nah, pas tanggal 6 akhir, pas pleno akhir tanggal 6 itu tiba-tiba adminnya jadi dua.

1074. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:11:18]

Lalu?

1075. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAHAP [02:11:18]

Lalu kan saya kan kaget, itu kenapa pleno bisa ada yang buka, kan gitu. harusnya kan cuma admin saja yang buka.

1076. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:11:30]

Lalu kemudian?

1077.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP

Lalu saya, ya, karena ada yang ngebuka ya saya konfirmasi ke KPU.

1078.KETUA: SUHARTOYO [02:11:38]

Ya, sudah. Ada pertanyaan lain untuk Ahli?

1079.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:11:46]

Sebentar belum selesai, Yang Mulia. Nah, kemudian ada percakapan-percakapan apa yang Saudara dengar dari anggota-anggota PPK yang lain terkait perselisihan suara ini?

1080. PEMBICARA: [02:11:52]

Izin, Yang Mulia. Kesepakatannya pertanyaannya satu-satu, Yang Mulia.

1081.KETUA: SUHARTOYO [02:12:00]

Bisa ditambahkan, Pak? Percakapan-percakapan apa (...)

1082.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [02:12:03]

Ya, ini pada waktu habis selesai pleno itu tanggal akhir ya, di dini hari, jam dini hari, 00.00 WIB. Saya bersama rekan saya langsung cross-check hasil Sirekap, langsung kasih tahu ini, "Nih Mat, ini hasil dari pleno tadi siang," kan gitu, sampai malam, nah saya kasih. Nah, tiba-tiba lah kok datanya lain, berbeda, dia lihat gitu, sepengetahuan dia. Nah, langsung saya cross-check ke panwas, saya minta coba akurin data, gitu. Jadi akurin lah sama, dia bilang juga berbeda, kayak gitu.

1083.KETUA: SUHARTOYO [02:12:52]

Cukup?

1084.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [02:12:52]

Cukup, dan itu juga ada lagi, dia kan konfirmasi, nah saya suruh cari tau. Nah, dia telpon salah satu PPK, dan saya rekam isi pembicaraannya.

1085.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:13:07]

Apa isi rekamannya, Pak?

1086.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [02:13:08]

Dan hasilnya mengejutkan. Dia di situ, dia mengaku operasi, dan cuma dia yang bermain, nah sementara saya yang tiga orang ini, enggak bermain.

1087.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:13:20]

Operasi apa maksudnya, Pak?

1088.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [02:13:22]

Untuk penggelembungan suara, memindahkan suara.

1089.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:13:25]

Oh. Untuk partai?

1090.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN MARADONA HARAHAP [02:13:26]

Dari Partai Gerindra.

1091. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:13:28]

Untuk partai ... untuk partai apa? Untuk dari ... dari suara caleg?

1092. KETUA: SUHARTOYO [02:13:35]

Sebentar, Kuasa Hukum, didalilkan tidak di Permohonan itu?

1093. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:13:40]

Ada, Yang Mulia.

1094. KETUA: SUHARTOYO [02:13:40]

Soal penggelembungan rekaman-rekaman itu loh? Tidak, kan?

1095. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:13:44]

Untuk itu kita ... untuk itu, kita masukkan dalam bukti, Yang Mulia.
Untuk di terakhir.

1096. KETUA: SUHARTOYO [02:13:47]

Bukti berapa?

1097. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:13:49]

Bukti 359 dalam bentuk flash disk, rekaman suara, Yang Mulia.

1098. KETUA: SUHARTOYO [02:13:57]

Cukup, ya, pertanyaannya?

1099.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:13:59]

Untuk Pihak Saksi ... untuk Pihak Saksi dari kami cukup, Yang Mulia. Sekarang kami ingin bertanya kepada dari Saksi Termohon.

1100.KETUA: SUHARTOYO [02:14:09]

Silakan, satu pertanyaan. Jangan banyak-banyak nanti waktunya tidak mencukupi.

1101.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:14:14]

Baik. Untuk Saksi Termohon, apakah Saksi Termohon tahu mengenai surat tanggal 6 Maret perihal saran perbaikan yang dikirimkan oleh Bawaslu kepada pani ... PPK Cikarang Barat?

1102.SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:14:28]

Tidak tahu.

1103.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:14:31]

Waktu itu Saksi Termohon sebagai apa?

1104.SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:14:34]

Ketua.

1105.KETUA: SUHARTOYO [02:14:37]

Itu surat yang dimaksud T-10 tadi?

1106.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:14:40]

Surat pada P-4 ... 340, Yang Mulia.

1107.KETUA: SUHARTOYO [02:14:42]

Ya, yang (...)

1108.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:14:44]

Perihal saran perbaikan dari Bawaslu yang dikirimkan ke PPK Cikarang Barat.

1109.KETUA: SUHARTOYO [02:14:50]

Tidak dapat ya dari pihak PPK?

1110.SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:14:52]

Tidak, Pak.

1111.KETUA: SUHARTOYO [02:15:00]

Dengan Ahlinya, ada pertanyaan tidak?

1112.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:15:03]

Sebentar, Yang Mulia. Dalam Form D.Hasil ... eh ... bukan form D.Hasil (...)

1113.KETUA: SUHARTOYO [02:13:11]

Dia kan tidak mendapatkan surat itu, Pak.

1114.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:15:11]

Form D.Kejadian Khusus pada P-341, Yang Mulia.

1115.KETUA: SUHARTOYO [02:15:14]

Kan dia tidak mendapatkan surat itu. Apa yang mau dialami?

1116.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:15:17]

Bukan. Untuk ... Ini pertanyaan lain, Yang Mulia.

1117.KETUA: SUHARTOYO [02:15:20]

Apa? Pertanyaan apa?

1118.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:15:23]

Perihal Form D.Kejadian Khusus.

Dalam form D.Kejadian Khusus ini dituliskan bahwa Form D.Hasil tidak dilampirkan hasil pleno per desa. Apakah memang dalam (...)

1119.KETUA: SUHARTOYO [02:15:35]

Seperti itu faktualnya?

1120.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:15:36]

Seperti itu mekanismenya atau bagaimana? Coba jelaskan.

1121.SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:15:40]

Ya. Tidak, Pak. Itu sebenarnya karena kondisinya itu sudah malam. Seharusnya kan kita ... kita enggak punya printer, Pak, masalahnya. Jadi staf saya nge-print hasil D.Hasil sampai D.Hasil lampiran itu di luar, gitu. Jadi D.Hasilnya saja sudah banyak, jadi teman-teman saksi minta izin langsung pamit saja setelah menandatangani D.Hasil, gitu Pak, ceritanya.

1122.KETUA: SUHARTOYO [02:16:08]

Oke.

1123.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:16:09]

Nah, apakah D.Hasil yang dikeluarkan itu ditandatangani semua oleh anggota PPK?

1124.SAKSI TERMOHON: BONGSU SYAHPUTRA [02:16:16]

Tidak.

1125.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:16:18]

Baik. Cukup, Yang Mulia.

1126.KETUA: SUHARTOYO [02:16:19]

Cukup, ya? Dari Kuasa Termohon ada pertanyaan? Satu, dua pertanyaan.

1127.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:16:25]

Mohon izin, Yang Mulia.
Bertanya kepada Ahli, Yang Mulia.

1128.KETUA: SUHARTOYO [02:16:29]

Tadi sudah cukup, Saudara katanya.

1129.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:16:31]

Untuk Termohon maksudnya, Yang Mulia.

1130.KETUA: SUHARTOYO [02:16:33]

Satu pertanyaan, silakan.

1131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:16:34]

Satu pertanyaan saja, Yang Mulia.

Mohon izin, Saudara Ahli, kami ingin bertanya, bagaimana pendapat Saudara Ahli, jika D.Hasil yang dikeluarkan oleh PPK kecamatan tidak ditandatangani oleh salah satu atau sebagian petugas PPK, apalagi terdapat selisih perolehan suara antara C.Hasil dan D.Hasil tersebut, apakah D.Hasil tersebut menjadi cacat hukum atau dapat digunakan? Karena pada prinsipnya, dalam peraturan PKPU 25 Tahun 2023 tentang Tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara itu berpedoman pada prinsip kepastian hukum.

Silakan, Saudara Ahli.

1132. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JAMIN GINTING [02:17:12]

Izin menjawab, Yang Mulia.

1133. KETUA: SUHARTOYO [02:17:14]

Silakan.

1134. AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JAMIN GINTING [02:17:16]

Dasar dari C.Hasil itu adalah hal yang paling prinsipal dalam suatu surat suara dimana di situ merupakan sumber dari Sirekap dan juga D.Hasil. Sehingga, kalau terjadi suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, maka nantinya akan dilihat kembali ke C.Hasil tersebut. Tanda tangan merupakan suatu bentuk pernyataan setuju atau tidak setuju terkait dengan hasil rekapitulasi tersebut. Sehingga demi kepastian hukum ke depan, maka semua hasil rekap apapun itu harus atas persetujuan dan tanda tangan. Kalaupun nanti tidak ditanda tangan, harus mendapatkan alasan dan catatan-catatan. Nah nanti kalau dilihat kalau sampai ada hasilnya yang berbeda, tentu dari hasil yang berbeda itu dapat dilakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Demikian, Yang Mulia.

1135. KETUA: SUHARTOYO [02:18:22]

Baik, dari Termohon ada pertanyaan?

**1136. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA
[02:18:25]**

Baik, terima kasih.

Kepada Riyan Ramadani, Ir. Iden, dan Nur Yusuf dalam satu pertanyaan. Sama, begitu ya.

Tadi dari keterangannya menyampaikan mengetahui adanya pergeseran suara, pertanyaannya kapan dimulainya Anda, Anda kan sebagai PPS, ini kan? Kapan Anda sebagai PPS tahu adanya pergeseran itu tidak mencegah, begitu dan kemudian apa upaya Anda? Anda tadi menyampaikan sudah kenal dengan Rahmat dan Erwin. Apa alasan Rahmat dan Erwin ketika itu, apa yang dilakukan?

1137. KETUA: SUHARTOYO [02:19:12]

Jangan sekaligus begitu, jawabnya susah nanti.

**1138. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA
[02:19:16]**

Siap, Yang Mulia.

1139. KETUA: SUHARTOYO [02:19:16]

Ada tidak itu Para Saksi mencegah ketika itu?

1140. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDEN [02:19:20]

Baik, baik.

Jadi gini, awal kejadian mengenai masalah perhitungan rapat pleno, perhitungan suara di tingkat kecamatan, awal dari awal semulanya saja juga bahasanya sudah ricuh.

1141. KETUA: SUHARTOYO [02:19:35]

Ada atau tidak, ada pencegahan tidak ketika (...)

1142. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDEN [02:19:38]

Nah, pada waktu itu, ya, semua PPS ingin ... apa ... ingin membandingkan antara rekapitulasi di tingkat kelurahan/desa, ya, disandingkan dengan tingkat kecamatan itu jauh berbeda, Pak. Saya tahu itu karena dari pihak penyelenggara teknis bahwa ini bahwa ada

suatu pergeseran atau pemindahan dari suara partai. Khususnya, Kelurahan Telaga Asih, yang dibacakan tadi dengan 37 TPS dari 65 TPS bergeser ke Nomor Urut 1 itu sama suara partai Nomor Urut 4 (...)

1143. KETUA: SUHARTOYO [02:20:29]

Tadi sudah dijelaskan itu.

1144. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDEN [02:20:30]

395.

1145. KETUA: SUHARTOYO [02:20:31]

395 tadi.

1146. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IDEN [02:20:32]

Itu saja.

1147. KETUA: SUHARTOYO [02:20:34]

Masih ada pertanyaan? Sudah terjawab semua tadi, mewakili aja salah satu, jangan tiga-tiga yang ditanya, silahkan. Satu pertanyaan lagi, Pak.

1148. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [02:20:46]

Baik. Kaitannya dengan Rahmat dan Erwin, tadi kan berarti diketahui, PPS mengetahui misalnya, asumsi awalnya tadi, bagaimana Rahmat dan Erwin bisa menjelaskan, apakah Riyan, Iden, dan Nur ini apakah terlibat dalam proses rekap PPK, siapa yang meng-input, siapa yang bantu (...)

1149. KETUA: SUHARTOYO [02:21:15]

Rekap PPK itu apa? Rekapitulasi Tingkat PPK?

1150. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [02:21:17]

Ya, betul.

1151. KETUA: SUHARTOYO [02:21:18]

Terlibat tidak, Pak. Ketika penghitungan di tingkat PPK, jawab saja.

1152. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT ZERI DUSTI [02:21:24]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Tidak terlibat, Pak.

1153. KETUA: SUHARTOYO [02:21:26]

Ya, sudah

1154. KETUA: SUHARTOYO [02:21:28]

Baik, dari Bawaslu ...Ibu... ada yang ingin disampaikan, Pak, berkenan dengan ini. Singkat-singkat, Pak.

1155. BAWASLU: KHOIRUDIN [02:21:38]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, yang pertama, saya ingin menjelaskan terkait masalah benar bahwa Pemohon memang atas nama Lidya itu laporan ke Bawaslu dan kita tindak lanjutnya dengan administratif dan pidana dan kita mengeluarkan putusan administratif.

1156. KETUA: SUHARTOYO [02:21:57]

Yang administratif yang tadi itu, bukti yang diserahkan tadi.

1157. BAWASLU: KHOIRUDIN [02:22:02]

Ya, semua sudah diserahkan (...)

1158. KETUA: SUHARTOYO [02:22:04]

Tingkat Kecamatan atau (...)

1159. BAWASLU: KHOIRUDIN [02:22:07]

Itu ...itu... surat, surat Bawaslu kecamatan, bukan Bawaslu.

1160. KETUA: SUHARTOYO [02:22:012]

Ya. Terus yang (...)

1161. BAWASLU: KHOIRUDIN [02:22:13]

Surat Bawaslu Kecamatan ini sifatnya saran perbaikan karena belum terjadi, itu hanya pada saat terjadi kegaduhan.

1162. KETUA: SUHARTOYO [02:22:20]

Ya.

1163. BAWASLU: KHOIRUDIN [02:22:21]

Jadi yang tadi disampaikan Saksi Bongsu, dia tidak tahu mungkin karena lagi sibuk. Tapi yang pasti pada waktu itu memang saya sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran memang konsultasi kepada saya, dan saya menyampaikan bahwa sampaikan kepada saran perbaikan untuk sesuai dengan aturan, jadi bukan untuk melakukan perbaikan ... atau sanding apa yang tadi disampaikan Saksi dari Pemohon.

1164. KETUA: SUHARTOYO [02:22:45]

Oke, terus yang Bapak maksud yang pidana?

1165. BAWASLU: KHOIRUDIN [02:22:49]

Nah, yang pidana memang kita proses, dan berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu, kita tidak dapat tidaklanjuti karena kekurangan alat bukti. Demikian.

1166. KETUA: SUHARTOYO [02:22:57]

Yang lain? Tidak ada lagi, hanya itu, ya.

Baik, untuk perkara ini ada bukti untuk Termohon, hanya yang 359 ini, ya, hanya dari Pemohon ada Bukti P-359, ya, Pak, 359, ya.

1167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:23:38]

Betul, Yang Mulia. Mengenai rekaman, Yang Mulia.

1168. KETUA: SUHARTOYO [02:23:41]

Yang lain tidak ada, ya.

1169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:23:42]

Mohon. Izin, Yang Mulia. Masing-masing dari Saksi kami membawa dokumen yang ingin diserahkan kepada Yang Mulia.

1170. KETUA: SUHARTOYO [02:23:49]

Dokumen apa itu?

1171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:23:51]

Mengenai rekaman C.Hasil, Yang Mulia.

1172. KETUA: SUHARTOYO [02:23:54]

Nanti Bapak koordinasikan, kalau Saksi kan enggak bisa memberikan dokumen, Mas. Harus melalui pihak ... melalui Pemohon. Kalau itu ada relevansinya, diterima, nanti serahkan ke Mahkamah.

1173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIZAL KHOIRUR ROZIQIN [02:24:10]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

1174. KETUA: SUHARTOYO [02:24:12]

Ya, baik.
Ini yang 359 dulu kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara 59, kalau masih mau ajukan bukti, ya, silakan. Tapi sebenarnya itu harus dikoordinasikan oleh pihak, oleh kuasa hukum, atau prinsipal yang menjadi pihak dalam perkara ini, bukan saksi. Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait atau Bawaslu. Oleh

karena itu, nanti silakan, tapi diakomodir di ... melalui pihak Pemohon kalau ingin diajukan dokumen-dokumen dari para saksi tadi.

Kemudian Perkara 59 sudah selesai. Nanti silakan ditunggu perkembangan perkara ini, nanti Mahkamah akan memberitahukan bagaimana perkembangan perkara ini selanjutnya. Terima kasih kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Bawaslu serta Ahli, Prof. Jamin Ginting atas keterangannya.

Kemudian dilanjutkan, sudah bisa meninggalkan tempat untuk yang sudah selesai urusannya. Kalau masih ada yang terkait dengan perkara berikutnya silakan tetap. Untuk Perkara (...)

1175. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [02:24:30]

Baik, izin men ... izin meninggalkan tempat, Yang Mulia.

1176. KETUA: SUHARTOYO [02:24:31]

Silakan.

1177. KUASA HUKUM TERMOHON: SIGIT NURHADI NUGRAHA [02:24:32]

Terima kasih.

1178. KETUA: SUHARTOYO [02:24:33]

Selanjutnya Perkara 46. Saksi silakan, Aat Hidayat dari Pemohon. Sudirman, Muhammad Royani. Dan Termohonnya Era Rahmat, Darmawan, Miftahil. Silakan, maju! Agamanya Islam semua, yang Erni tambahan ini, ya?

1179. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [02:26:05]

Tambahan, Yang Mulia.

1180. KETUA: SUHARTOYO [02:26:06]

Kenapa ditambah? Kan sudah tiga.

1181. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [02:26:09]

Baru kami dapatkan ternyata Erni ini backup untuk (...)

1182. KETUA: SUHARTOYO

Tidak bisa kami pertimbangkan nanti kalau tetap diajukan.

1183. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [02:26:17]

Oke. Nggih, terima kasih.

1184. KETUA: SUHARTOYO [02:26:17]

Gimana? Nggih apa?

1185. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Dalam artian, kalau memang tidak dipertimbangkan, kami enggak akan ajukan.

1186. KETUA: SUHARTOYO [02:26:22]

Enggak akan ajukan, ya, boleh. Jadi tiga Pemohon, tiga Termohon.

Silakan, Yang Mulia. Agama Islam semua. Kecuali ini ada penyelenggara yang masih aktif? Sudah enggak ada? Terpilih kembali untuk berikutnya di pilkada? Tidak? Baik.

1187. HAKIM ANGGOTA: GUNTUR HAMZAH [02:26:45]

Ya. Para Saksi, ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmaanirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

1188. SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [02:26:49]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

1189. HAKIM ANGGOTA: GUNTUR HAMZAH [02:27:06]

Oke, terima kasih.

1190. KETUA: SUHARTOYO [02:27:10]

Silakan kembali ke ... Dari Aat Hidayat, mau menjelaskan apa? Singkat-singkat saja, Pak.

1191. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/20246: AAT HIDAYAT [02:27:35]

Baik, Pak. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya, atas nama saya Aat Hidayat (...)

1192. KETUA: SUHARTOYO [02:27:45]

Saksi TPS 16, ya?

1193. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:27:42]

Ya.

1194. KETUA: SUHARTOYO [02:27:47]

Dari partai apa?

1195. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/20246: AAT HIDAYAT [02:27:49]

Dari partai PPP, Pak.

1196. KETUA: SUHARTOYO [02:27:50]

PPP.

1197. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:27:53]

Saya akan menerangkan khusus untuk pernyataan tertulis terkait di TPS 16.

1198. KETUA: SUHARTOYO [02:27:59]

Ya, ada Bapak di sana, Pak?

1199.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:28:03]

Ada, Pak.

1200.KETUA: SUHARTOYO [02:28:06]

Yang Bapak mau ceritakan apa? Silakan

1201.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:28:14]

Mohon izin, Yang Mulia. Yang saya lihat dan saksikan langsung bahwa TPS 16 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang. Ter... pada pertama, TPS membuka kotak suara presiden yang seperti biasa dan penghitungan dalam TPS 16, dimulai dari presiden lanjut ke provinsi ... DPD, mohon maaf. DPD, Provinsi, dan Kota. Maka, di dalam kota membuka kotak dari kota kabupaten (...)

1202.KETUA: SUHARTOYO [02:29:11]

Ketika di mana?

1203.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:29:13]

Di Pleno kecamatan.

1204.KETUA: SUHARTOYO [02:29:15]

Kecamatan, kecamatan apa?

1205.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:29:18]

Serang, Pak.

1206.KETUA: SUHARTOYO [02:29:21]

Kenapa kok di ... Ketika mau dibuka itu, mau dihitung?

1207.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:29:24]

Ya. Pada saat penghitungan awal, itu berjalan seperti biasa penghitungan suara partai dan caleg suara sah, jumlah suara sah yang awalnya 225 dan suara tidak sah yang awalnya 64, itu setelah dijumlahkan, dimasukkan kepada Sirekap, Sirekap tidak bisa menerima atau tidak muncul warna hijau di Sirekap tersebut, Pak.

1208.KETUA: SUHARTOYO [02:30:05]

Waktu dibuka kotak itu apa yang terjadi, Pak? Keanehan yang terjadi apa?

1209.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:30:10]

Setelah penghitungan, Pak, setelah penghitungan (...)

1210.KETUA: SUHARTOYO [02:30:16]

Ya.

1211.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:30:20]

Keanehannya itu, suara sah. Jadi, di Sirekap itu tidak muncul (...)

1212.KETUA: SUHARTOYO [02:30:22]

Ya. Tidak muncul indikator hijau itu.

1213.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:30:27]

Betul.

1214.KETUA: SUHARTOYO [02:30:32]

Terus apa lagi?

1215.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:30:33]

Terus akhirnya, kami dengan pihak PPS, PPK akhirnya menghitung manual ulang. Dari suara jumlah keseluruhan. Pada saat itu, terjadi suara sah, setelah penghitungan manual itu suara sah menjadi 228. Itu, maka Sirekap menjadi hijau kalau yang awalnya 225 menjadikan 228 suara sah itu, maka Sirekap itu menjadi hijau.

1216. KETUA: SUHARTOYO [02:30:34]

Oh, begitu.

1217.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:30:35]

Ya. Tapi karena kami sebagai saksi, maka kami protes itu, Pak.

1218. KETUA: SUHARTOYO [02:31:23]

Oke. Protesnya diterima?

1219.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:31:25]

Protesnya diterima, Pak.

1220. KETUA: SUHARTOYO [02:31:27]

Protes ke siapa itu?

1221.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:31:26]

Protes ke penyelenggara.

1222. KETUA: SUHARTOYO [02:31:30]

Penyelenggara? Enggak ke Panwas?

1223.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:31:34]

Enggak. Saya (...)

1224. KETUA: SUHARTOYO [02:31:33]

Akhirnya, setelah diterima diapakan protes Bapak itu? Ditindaklanjuti?

1225. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:31:38]

Betul, Pak. Ditindaklanjuti karena protes ... pada saat kami protes, yang kami protes itu adalah suara tidak sahnya, Pak.

1226. KETUA: SUHARTOYO [02:31:52]

Ya. Terus diapakan? Apakah kemudian ada koreksi atau apa, Pak?

1227. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:31:56]

Kami mempertanyakan pembuktian, Pak, terhadap suara yang tidak sah ... yang 64 menjadi 4 itu, Pak.

1228. KETUA: SUHARTOYO [02:32:08]

Apa hasil pembuktiannya?

1229. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:32:10]

Hasil pembuktian pada saat awal dibuka, kita bareng-bareng dari saksi yang ada dan PPS atau penyelenggara, itu membuka kotak suara presiden untuk membuktikan bahwa 64 suara itu, ada atau tidak.

1230. KETUA: SUHARTOYO [02:32:27]

Setelah dibuka?

1231. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:32:27]

Setelah dibuka, tidak ditemukan satupun suara tidak sah tersebut. Maka pembuktian kembali ke buka kotak suara kabupaten dan kota.

1232. KETUA: SUHARTOYO [02:32:41]

Apa yang ditemukan?

1233.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:32:42]

Alhasil, sama saja dan tidak bisa ditemukan surat suara tidak sah itu.

1234.KETUA: SUHARTOYO [02:32:50]

Kemudian yang lain, apa yang ditemukan dalam kotak itu?

1235.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:32:52]

Yang ditemukan hanya di surat suara sah dan (...)

1236.KETUA: SUHARTOYO [02:32:58]

Ada daftar hadir pemilih?

1237.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:33:02]

Daftar hadir pemilih, kami tidak melihat itu, Pak.

1238.KETUA: SUHARTOYO [02:33:05]

Surat pindah pemilih?

1239.SAKSI PEMOHON 4 PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/20246: AAT HIDAYAT [02:33:07]

Tidak ada, Pak.

1240.KETUA: SUHARTOYO [02:33:09]

Ini yang penting ini. Kemudian tahu enggak ada rekomendasi Bawaslu, Pak?

1241.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:33:12]

Pada saat itu kami berkoordinasi dengan Bawaslu dan Bawaslu itu melempar kembali kepada saksi bahwa ini akan dilanjutkan atau tidak.

1242. KETUA: SUHARTOYO [02:33:31]

Saksi siapa? Maksudnya Saudara?

1243. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:33:33]

Ya, betul, Pak.

1244. KETUA: SUHARTOYO [02:33:33]

Dilanjut?

1245. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:33:35]

Tidak, Pak.

1246. KETUA: SUHARTOYO [02:33:36]

Kenapa?

1247. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:33:38]

Maksudnya tidak disahkan itu, Pak. Artinya kami tidak menerima itu.

1248. KETUA: SUHARTOYO [02:33:45]

Oh. Tapi maksudnya, saudara koordinasi ke Bawaslu itu, laporan?

1249. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:33:48]

Betul, Pak.

1250. KETUA: SUHARTOYO [02:33:51]

Ada produknya enggak? Ada rekomendasi enggak dari Bawaslu atas laporan Bapak itu? Ada tindak lanjut tidak dari Bawaslu atas laporan Bapak itu?

1251.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:34:05]

Pada saat itu tidak ada, Pak.

1252.KETUA: SUHARTOYO [02:34:08]

Tidak ada. Saudara tidak tanya?

1253.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:34:10]

Betul, Pak.

1254.KETUA: SUHARTOYO [02:34:11]

Ini Sudirman apa yang mau dijelaskan?

1255.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDIRMAN [02:34:24]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wr. Wb.

1256.KETUA: SUHARTOYO [02:34:28]

Walaikumsalam.

1257.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDIRMAN [02:34:30]

Yang Mulia, saya hanya meyakinkan bahwa saya dalam pemilu 2024 saya Saksi Partai PDIP, di Pleno PPK Kecamatan Serang, akan menerangkan yang terkait sepanjang TPS 16 dan TPS 95.

Bahwa benar saksi-saksi partai memprotes TPS 16 dan 95. Pihak PPK tidak memberikan form sanggahan ataupun keberatan dengan alasan waktu mepet. Bahwa (...)

1258.KETUA: SUHARTOYO [02:35:24]

Saudara, Padahal mengajukan keberatan?

1259.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDIRMAN [02:35:26]

Keberatan, Yang Mulia.

1260. KETUA: SUHARTOYO [02:35:30]

Karena?

1261. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDIRMAN [02:35:31]

Karena enggak sesuai, gitu.

1262. KETUA: SUHARTOYO [02:35:34]

Di TPS, yang mana?

1263. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDIRMAN [02:35:36]

TPS 16.

1264. KETUA: SUHARTOYO [02:35:39]

16. Enggak sesuainya gimana kalau TPS 16?

1265. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDIRMAN [02:35:43]

Enggak sesuainya itu, surat-suara tidak sah itu yang tadinya 64 menjadi 4, Yang Mulia.

1266. KETUA: SUHARTOYO [02:35:53]

64 menjadi 4?

1267. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDIRMAN [02:35:54]

Ya.

1268. KETUA: SUHARTOYO [02:35:56]

Untuk suara?

1269.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDIRMAN [02:35:58]

Tidak sah.

1270.KETUA: SUHARTOYO [02:36:00]

Untuk partai apa?

1271.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDIRMAN [02:36:00]

Kurang tahu, Yang Mulia, itu.

1272.KETUA: SUHARTOYO [02:36:06]

Oh, kalau yang 95, Pak?

1273.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDIRMAN [02:36:10]

Kalau 95 itu selisih, Pak.

1274.KETUA: SUHARTOYO [02:36:14]

Selisih apa?

1275.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDIRMAN [02:36:19]

Selisih angka, Pak.

1276.KETUA: SUHARTOYO [02:36:21]

Ya, antara partai atau suara siapa? Dengan suara siapa? Atau partai dengan caleg? Atau bagaimana maksudnya?

1277.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDIRMAN [02:36:30]

Keseluruhan, Pak.

1278.KETUA: SUHARTOYO [02:36:32]

Di 95 itu?

1279.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDIRMAN [02:36:33]

Ya.

1280.KETUA: SUHARTOYO [02:36:36]

Kalau berkaitan dengan pembukaan kotak, tahu 95? TPS 95?

1281.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDIRMAN [02:36:45]

Kalau 95 pembukaan itu enggak ada absensi, Pak.

1282.KETUA: SUHARTOYO [02:36:48]

Enggak ada apa? Absensi? Daftar hadir?

1283.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDIRMAN [02:36:50]

Ya.

1284.KETUA: SUHARTOYO [02:36:52]

Kenapa itu waktu itu dibuka kotak suara untuk, apa memang pas dibuka untuk dihitung itu atukah ada kecurigaan khusus sehingga dibuka kotak TPS 95?

1285.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDIRMAN [02:37:08]

Soalnya di situ kejadiannya enggak bisa nerangin ketua itunya ... apa ... petugas PPK nya.

1286.KETUA: SUHARTOYO [02:37:14]

Tahu tidak, ada rekomendasi kalau begitu? Soal tidak ada absensinya itu? Dari Bawaslu? Atau panwaslu?

1287.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUDIRMAN [02:37:24]

Kurang tahu itu, Pak.

1288. KETUA: SUHARTOYO [02:37:26]

Enggak tahu, ya?

Dari Saksi Muhaimin apa yang dijelaskan, Pak?

1289. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAIMIN ROYANI [02:37:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

1290. KETUA: SUHARTOYO [02:37:42]

Walaikumsalam.

1291. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAIMIN ROYANI [02:37:48]

Perkenankan, Pak. Saya ingin menerangkan adanya selisih. Adanya selisih dari DPT, DPT yang awalnya 178, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT=178, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb=11, jumlah hak pilih DPK=0, jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3=189, dan pengguna surat suara antara lain jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT=230, jumlah surat suara yang digunakan=204, jumlah surat suara yang dikembalikan=0, jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai=26, KPPS TPS 95 telah melakukan kesalahan, Yang Mulia. Pada penulisan jumlah DPT awal yang 178 yang seharusnya 233, 233 jumlah pengguna hak pilih DPTb pada Model Form C.Hasil Salinan, yaitu 11, Yang Mulia, menjadi 0. Jumlah pengguna hak pilih DPK pada Model Form C.Hasil Salinan=0 menjadi 15, dan ketika pembuktian, pembukaan kotak di situ tidak ditemukan surat SPM (Surat Pindah Memilih), dan absensi, Yang Mulia.

1292. KETUA: SUHARTOYO [02:39:20]

Baik, nanti didalami lagi. Dari Termohon.

1293. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:39:27]

Mohon izin, Yang Mulia, ada tambahan tadi.

1294. KETUA: SUHARTOYO [02:39:32]

Apa itu?

1295.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:39:32]

Untuk di TPS 16 ada 1 yang kami temukan, yaitu perbedaan tanda tangan anggota KPPS di salinan C-1.

1296.KETUA: SUHARTOYO [02:39:50]

Itu sudah dilaporkan?

1297.SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:39:54]

Itu sudah saya laporkan, cuma agak sedikit ralat karena yang saya laporkan di situ perbedaan dua versi.

1298.KETUA: SUHARTOYO [02:40:01]

Ya artinya kejadian itu sudah Bapak laporkan dengan (...)

1299.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:40:06]

Pengawas.

1300.KETUA: SUHARTOYO [02:40:06]

Ke pengawas. Sudah ada keputusan?

1301.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:40:10]

Oh.

1302.KETUA: SUHARTOYO [02:40:13]

Kan ada tanda tangan palsu.

1303.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:40:16]

Pada saat itu kami tidak melaporkan itu, Pak. (...)

1304. KETUA: SUHARTOYO [02:40:19]

Sampai sekarang tidak melaporkan?

1305. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:40:21]

Yang Mulia, Belum. Tidak.

1306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [02:40:24]

Izin, Yang Mulia. Kami buktikan di P-3, Yang Mulia.

1307. KETUA: SUHARTOYO [02:40:26]

Ya.

1308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [02:40:27]

Di P-3 ada tanda tangan yang berbeda di halaman 1 dan halaman berikutnya, termasuk tanda tangan saksi di (...)

1309. KETUA: SUHARTOYO [02:40:35]

P-3, Ya?

1310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [02:40:37]

P-3. Di C-Salinan, C-Hasil Salinan.

1311. KETUA: SUHARTOYO [02:40:40]

Ya, itu sama saksi dilaporkan ke pengawas tidak?

1312. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:40:43]

Pada saat itu tidak.

1313. KETUA: SUHARTOYO [02:40:45]

Tidak. Pada saat itu. Pada saat yang lain?

1314. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:40:48]

Pada saat yang lain, kami laporkan ke pihak PPP langsung.

1315. KETUA: SUHARTOYO [02:40:55]

PPP, partainya.

1316. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:40:55]

Ya, ke atasan.

1317. KETUA: SUHARTOYO [02:40:57]

Bukan ke Panwas, ya? Oleh partai ada tindak lanjut?

1318. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:41:02]

Saya kurang tahu.

1319. KETUA: SUHARTOYO [02:41:04]

Ya, nanti dibuka Bukti P-3, Pak.

1320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [02:41:08]

Ya, P-3. Kemudian untuk dari kami sudah mengajukan ke Bawaslu. Sebentar, Yang Mulia.

1321. KETUA: SUHARTOYO [02:41:27]

Tanda tangan yang atas sama siapa, Pak?

1322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [02:41:30]

Muhaimin Royani. Itu di P-9, Yang Mulia.

1323. KETUA: SUHARTOYO [02:41:44]

Ya, nanti dibuka, sudah ... ini kan bukti laporannya ini? Ya, kan, Pak dari saksi Muhaimin Rohani, Royani ya?

1324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [02:42:07]

Ya.

1325. KETUA: SUHARTOYO [02:42:08]

Kepada Bawaslu Kota Serang. Nanti kita tanya ke Bawaslu-nya.

1326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [02:42:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

1327. KETUA: SUHARTOYO [02:42:19]

Ya. Sekarang dari Era Rahmat, Apa yang mau dijelaskan ini? Tentang TPS 16. Apa yang mau ditambahkan?

1328. SAKSI TERMOHON: ERA RAHMAT [02:42:38]

Izin, Yang Mulia. Nama saya Era Rahmat, mantan Ketua KPPS 16. Izin, saya ingin menyampaikan bahwa saya dipanggil oleh KPPS untuk datang ke PPK yang sedang melakukan rekapitulasi suara di PPK bahwa ada kesalahan atau kekeliruan penulisan di C.Hasil tanggal 29/2024.

1329. KETUA: SUHARTOYO [02:43:07]

Terus? Atas kesalahan itu, benar? Memang setelah Saudara cek benar ada kesalahan?

1330. SAKSI TERMOHON: ERA RAHMAT [02:43:14]

Ada.

1331. KETUA: SUHARTOYO [02:43:15]

Apa bentuk kesalahannya?

Apa yang salah, Pak menurut orang PPK itu? Bapak kok seperti tidak tahu sendiri begitu? Apa yang dikatakan salah oleh PPK itu, Pak?

1332. SAKSI TERMOHON: ERA RAHMAT [02:43:41]

Sebentar ya, Yang Mulia.

1333. KETUA: SUHARTOYO [02:43:42]

Loh kan Bapak ngalamin sih, kenapa harus mengingat-ingat?

Pak Darmawan ... saksi kalau seperti itu tidak meyakinkan, malah meragukan. Dari Termohon, Darmawan, apa yang diketahui, ini?

1334. SAKSI DARI TERMOHON: DARMAWAN [02:44:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin memperkenalkan diri. Saya Darmawan, mantan Ketua KPPS 95.

Terkait dari laporan Pemohon mengenai perihal kekeliruan di dalam jumlah di DPT yang seharusnya memang 233 menjadi 207, itu sudah di ... sudah di (...)

1335. KETUA: SUHARTOYO [02:44:48]

Sudah dikoreksi?

1336. SAKSI DARI TERMOHON: DARMAWAN [02:44:48]

Sudah dilakukan di P ... kecamatan.

1337. KETUA: SUHARTOYO [02:44:50]

Sudah dikoreksi?

1338. SAKSI DARI TERMOHON: DARMAWAN [02:44:51]

Sudah dikoreksi.

1339. KETUA: SUHARTOYO [02:44:52]

Sudah ... itu ada ... masih ada yang keberatan?

1340. SAKSI DARI TERMOHON: DARMAWAN [02:44:55]

Tidak ada, Yang Mulia.

1341. KETUA: SUHARTOYO [02:44:55]

Tidak ada.

1342. SAKSI DARI TERMOHON: DARMAWAN [02:44:56]

Untuk di TPS 95.

1343. KETUA: SUHARTOYO [02:44:58]

Pak Darmawan jadi apa? Ketua KPPS?

1344. SAKSI DARI TERMOHON: DARMAWAN [02:45:00]

Mantan Ketua KPPS.

1345. KETUA: SUHARTOYO [02:45:01]

Memang waktu reka ... rekapitulasi di PPK ikut?

1346. SAKSI DARI TERMOHON: DARMAWAN [02:45:07]

Di PPK ikut.

1347. KETUA: SUHARTOYO [02:45:08]

Ikut?

1348. SAKSI DARI TERMOHON: DARMAWAN [02:45:08]

Ikut.

1349. KETUA: SUHARTOYO [02:45:09]

Betul tidak ada keberatan lagi?

1350. SAKSI DARI TERMOHON: DARMAWAN [02:45:11]

Tidak ada.

1351. KETUA: SUHARTOYO [02:45:11]

Berkaitan TPS 95?

1352. SAKSI DARI TERMOHON: DARMAWAN [02:45:13]

TPS 95.

1353. KETUA: SUHARTOYO [02:45:15]

Kalau yang tidak ada daftar hadir?

1354. SAKSI DARI TERMOHON: DARMAWAN [02:45:17]

Daftar hadir? Gimana maksudnya, Yang Mulia?

1355. KETUA: SUHARTOYO [02:45:19]

Pembu ... pembukaan kotak?

1356. SAKSI DARI TERMOHON: DARMAWAN [02:45:21]

Ya?

1357. KETUA: SUHARTOYO [02:45:21]

Tidak ditemukan daftar hadir? Absen?

1358. SAKSI DARI TERMOHON: DARMAWAN [02:45:24]

Betul tidak ada, akhir kemudian ada. Memang salah penyimpanan saja waktu pas ... apa ... miskomunikasi.

1359. KETUA: SUHARTOYO [02:45:31]

Kemana?

1360. SAKSI DARI TERMOHON: DARMAWAN [02:44:32]

Ada.

1361. KETUA: SUHARTOYO [02:44:33]

Kok tidak ada dalam kotak?

1362. SAKSI DARI TERMOHON: DARMAWAN [02:45:34]

Tidak ada di dalamnya ... anggota tidak memang ditaruh di tempat. Waktu itu kebetulan malam sih, Yang Mulia. Tengah malam, jadi memang tidak dimasukkan ke dalam kotak.

1363. KETUA: SUHARTOYO [02:45:43]

Tapi akhirnya ditemukan itu?

1364. SAKSI DARI TERMOHON: DARMAWAN [02:45:46]

Ditemukan.

1365. KETUA: SUHARTOYO [02:45:48]

Terus para pihak sudah enggak keberatan lagi?

1366. SAKSI DARI TERMOHON: DARMAWAN [02:45:50]

Tidak ada, Yang Mulia.

1367. KETUA: SUHARTOYO [02:45:53]

Pak Miftahil, apa Pak yang mau dijelaskan, Pak?

1368. SAKSI DARI TERMOHON: MIFTAHIL [02:45:58]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya mantan Ketua PPK Kecamatan Serang. Saya ingin menjelaskan terkait tadi yang disampaikan oleh mantan Ketua KPPS 16 dan juga 95, dimana betul kami melakukan pemanggilan terhadap Ketua KPPS 16. Bahwa ada kesalahan penulisan, seperti tadi yang disampaikan oleh Pemohon terkait dengan jumlah suara tidak sah. Dimana di awal itu ditulis bahwa hasil dari sebelum perbaikan suara sah itu 225, kemudian suara tidak sah adalah 64, total suara sah dan tidak sah 289. Itu sebelum dilakukan perbaikan. Kemudian setelah dilakukan perbaikan, yaitu total suara sahnya itu 285, Yang Mulia, bukan 228, tapi 285 kemudian suara tidak sahnya itu=4. Total suara sah dan tidak sahnya itu 289. Itu kami bersepakat, kese ... hasil kesepakatan bersama yang kami tawarkan dari PPK kepada para saksi dan juga panwas bahwa dilakukan

penghitungan ulang untuk C.Hasil Plano per partai, mulai dari Partai PKB sampai dengan Partai Ummat. Itu kami lakukan penghitungan ulang.

1369. KETUA: SUHARTOYO [02:47:47]

Semuanya sepakat itu?

1370. SAKSI DARI TERMOHON: MIFTAHIL [02:47:49]

Semuanya sepakat. Kemudian dihasilkan suara sah itu 285. Nah, kenapa munculnya 4 ini? Kesepakatan bersama bahwa mengurangi dari jumlah suara sah dan tidak sah, 289.

1371. KETUA: SUHARTOYO [02:48:05]

Ya. Akhirnya setelah dilakukan ... apa ... PSSU itu, pemungutan suara ... apa ... Penghitungan (...)

1372. SAKSI DARI TERMOHON: MIFTAHIL [02:48:12]

Ya.

1373. KETUA: SUHARTOYO [02:48:12]

Surat Suara Ulang (...)

1374. SAKSI DARI TERMOHON: MIFTAHIL [02:48:13]

Ya.

1375. KETUA: SUHARTOYO [02:48:14]

Sudah, persoalan sudah selesai.

1376. SAKSI DARI TERMOHON: MIFTAHIL [02:48:16]

Sudah selesai.

Karena memang kami tidak mengurangi dan menambahkan suara partai manapun. Maka, mereka saksi-saksi semua yang hadir di situ sepakat, di tanggal 26 itu sepakat. Karena memang pada saat itu juga ada yang minta untuk dihadirkan daripada ketua KPPS-nya kami sudah hadirkan dan dikonfirmasi bahwa itu ada kesalahan penulisan seperti itu, Yang Mulia.

1377. KETUA: SUHARTOYO [02:48:39]

Ya.

1378. SAKSI DARI TERMOHON: MIFTAHIL [02:48:40]

Itu untuk TPS yang 16. Nah, kemudian di TPS yang (...)

1379. KETUA: SUHARTOYO [02:48:48]

95?

1380. SAKSI DARI TERMOHON: MIFTAHIL [02:48:48]

95 juga sama, ada kesalahan penulisan itu, Yang Mulia. Yang sebelumnya, sebelum perbaikan itu suara sah itu adalah 193, kemudian suara tidak sahnya itu=11, total suara sah, tidak sah=204.

Nah, kemudian kami lakukan hal yang sama hasil kesepakatan juga, setelah dilakukan penghitungan kembali di C.Hasil Plano, yang mulai dari Partai PKB (...)

1381. KETUA: SUHARTOYO [02:49:19]

Ya sudah.

1382. SAKSI DARI TERMOHON: MIFTAHIL [02:49:20]

Sampai dengan Partai Ummat itu (...)

1383. KETUA: SUHARTOYO [02:49:21]

Hasilnya bagaimana?

1384. SAKSI DARI TERMOHON: MIFTAHIL [02:49:23]

Hasilnya adalah 192 karena ada 1 di Partai PKB yang tallynya itu 1, tapi ditulisnya 2, jadi hasil kesepakatan bahwa itu adalah 1. Sehingga yang tadinya 193 menjadi 192.

1385. KETUA: SUHARTOYO [02:49:38]

Semua sudah menerima hasil ini?

1386. SAKSI DARI TERMOHON: MIFTAHIL [02:49:40]

Sudah semua tidak ada yang ini ... apa namanya ... yang keberatan dan tidak ada ... apa namanya ... yang lain-lain.

1387. KETUA: SUHARTOYO [02:49:47]

Ya.

1388. SAKSI DARI TERMOHON: MIFTAHIL [02:49:48]

Seperti itu, Yang Mulia.

1389. KETUA: SUHARTOYO [02:49:50]

Pak, yang dari Bawaslu dulu, berkaitan dengan rekomendasi pelanggaran etik. Ini bagaimana, Pak, untuk Kota Serang?

1390. BAWASLU: ALI FAISAL [02:50:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Yang pertama, terkait dengan TPS 16 Unyur.

1391. KETUA: SUHARTOYO [02:50:09]

Ya.

1392. BAWASLU: ALI FAISAL [02:50:09]

Jadi, pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Unyur ini sebagian kelurahan yang paling terakhir, Yang Mulia.

Lalu kemudian, yang di TPS 16 ini ada kesalahan karena Sirekapnya merah. Dari kejadian merahnya Sirekap itu, lalu kemudian Panwaslu Kecamatan ... apa namanya ... berkoordinasi untuk bagaimana mencari jalan keluarnya, begitu.

Nah, ternyata kemudian kita melakukan ... apa namanya ... koordinasi dengan PPK dan kemudian kalau begini harus ada yang dibuka begitu karena harus ada penghitungan. Penghitungan terkait dengan jumlah hasil, ya, jumlah hasil terkait dengan ... apa ... surat suara sah dan tidak sah hanya di seputar itu. surat suara sah yang awalnya 200 (...)

1393. KETUA: SUHARTOYO [02:51:14]

Ya. Ini berkaitan dengan yang rekomendasi ini bagaimana, Pak?

1394. BAWASLU: ALI FAISAL [02:51:18]

Ya.

1395. KETUA: SUHARTOYO [02:51:19]

Itu saja, singkat-singkat saja.

1396. BAWASLU: ALI FAISAL [02:51:20]

Kita ingin meminta dibuka untuk menghitung suara sah dan tidak sah karena selisihnya disana itu, Yang Mulia.

1397. KETUA: SUHARTOYO [02:51:30]

Yang berkaitan dengan penerusan rekomendasi etik ini?

1398. BAWASLU: ALI FAISAL [02:51:34]

Yang karena ... karena ini sudah termasuk juga untuk 95, Yang Mulia. Karena ini kejadiannya di satu kelurahan, jadi karena kita menganggap ini ada kesalahan prosedur mekanisme dan tata cara, termasuk etik maka ini diangkat menjadi temuan Panwaslu Kecamatan dan kemudian kita putuskan terhadap dua hal karena (...)

1399. KETUA: SUHARTOYO [02:51:59]

Apa tadi keputusannya, Pak?

1400. BAWASLU: ALI FAISAL [02:52:00]

Secara administrasi, mereka melanggar prosedur mekanisme dan tata cara dan kemudian (...)

1401. KETUA: SUHARTOYO [02:52:06]

Apa yang direkomendasikan?

1402. BAWASLU: ALI FAISAL [02:52:09]

Direkomendasikan ke KPU setempat dan kemudian etik berdasarkan Perbawaslu 7 Tahun 2022. Itu, Yang Mulia.

1403. KETUA: SUHARTOYO [02:52:15]

Ya. Ini sudah ditindaklanjuti belum, Pak?

1404. BAWASLU: ALI FAISAL [02:52:17]

Oleh KPU, sudah ditindaklanjuti.

1405. KETUA: SUHARTOYO [02:52:19]

Semuanya? (...)

1406. BAWASLU: ALI FAISAL [02:52:21]

Saya tidak cek semuanya, Yang Mulia.

1407. KETUA: SUHARTOYO [02:52:25]

Tidak cek?

1408. BAWASLU: ALI FAISAL [02:52:29]

Ya.

1409. KETUA: SUHARTOYO [02:52:30]

Yang berkaitan dengan baik yang tingkat kecamatan maupun tingkat kota yang pelanggaran etik ini semua sudah di (...)

1410. BAWASLU: ALI FAISAL [02:52:35]

Ya, kami meneruskan dari (...)

1411. KETUA: SUHARTOYO [02:52:38]

Sudah diselesaikan belum maksudnya?

1412. BAWASLU: ALI FAISAL [02:52:40]

Sudah diselesaikan karena sudah masuk ke rekapitulasi sampai ke tingkat kecamatan yang selesai. Itu, Yang Mulia.

1413. KETUA: SUHARTOYO [02:52:48]

Tidak ada yang tersisa maksudnya?

1414. BAWASLU: ALI FAISAL [02:52:51]

Tidak ada, Yang Mulia.

1415. KETUA: SUHARTOYO [02:52:53]

Ya, Bapak seperti ragu begitu. Jadi tidak ada dari ini kan ada dua, dua yang diajukan PK.13-469 dan 95 ini ... di TPS 95 ini berkaitan dengan yang tadi disampaikan tingkat kecamatan.

1416. BAWASLU: ALI FAISAL [02:53:13]

Betul.

1417. KETUA: SUHARTOYO [02:53:14]

Kemudian ada yang kota, kota yang etik. Ini dua-duanya sudah dianggap selesai atau belum oleh Bawaslu?

1418. BAWASLU: ALI FAISAL [02:53:21]

Kalau yang etik, Yang Mulia. Terus terang memang kami belum mendapatkan konfirmasi balik dari KPU (...)

1419. KETUA: SUHARTOYO [02:53:27]

Kalau yang kecamatan?

1420. BAWASLU: ALI FAISAL [02:53:29]

Kalau kecamatan sudah, ada tindak lanjut. Kalau yang kota kami belum mendapatkan konfirmasi, Yang Mulia.

1421. KETUA: SUHARTOYO [02:53:37]

Oke.

1422. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:53:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya ke Pak Miftahil, ya. Pak Miftahil.

1423. SAKSI TERMOHON: MIFTAHIL [02:53:55]

Siap, Yang Mulia.

1424. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:53:56]

Baik, tadi keterangan Pak Miftahil mengatakan setelah dilakukan perubahan terhadap rekapitulasi, ya. Di TPS 16, ya, tadi.

1425. SAKSI TERMOHON: MIFTAHIL [02:54:12]

Betul.

1426. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:54:15]

Ya. Itu kemudian sudah dilakukan perbaikan suara. Nah, pada waktu itu adakah penambahan suara ke partai yang lain pada saat itu?

1427. SAKSI TERMOHON: MIFTAHIL [02:54:26]

Tidak ada, Yang Mulia.

1428. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:54:28]

Tidak ada?

1429. SAKSI TERMOHON: MIFTAHIL [02:54:29]

Tidak ada pengurangan dan penambahan suara (...)

1430. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:54:31]

Terus suara yang sah itu kan ada bertambah sekitar 60.

1431. SAKSI TERMOHON: MIFTAHIL [02:54:35]

Itu tidak sah itu, Yang Mulia.

1432. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:54:37]

Oh. Jadi 60 itu tidak sah?

1433. SAKSI TERMOHON: MIFTAHIL [02:54:39]

Tidak sah. Suara sah itu tidak ada yang ditambahkan dan tidak ada yang dikurangkan. Makanya Saksi dan juga Panwas yang hadir di situ, ya, enggak ada yang keberatan. Karena tidak mengurangi suara siapapun.

1434. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:54:53]

Oh. Jadi itu 60 itu justru yang tidak sah, ya?

1435. SAKSI TERMOHON: MIFTAHIL [02:54:56]

Tidak sah, betul.

1436. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:54:57]

Oke, saya pikir yang sah tadi.

1437. SAKSI TERMOHON: MIFTAHIL [02:54:59]

Bukan, Yang Mulia.

1438. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:55:01]

Oke, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1439. KETUA: SUHARTOYO [02:55:04]

Dari Pemohon ada pertanyaan untuk, ya, silahkan satu dua pertanyaan.

1440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [02:55:09]

Terima kasih. Untuk Saksi kami dari Pemohon. Pertama bahwa apakah benar pihak PPK Kecamatan Serang, tidak memberikan form keberatan dengan alasan waktu yang mepet?

1441. KETUA: SUHARTOYO [02:55:30]

Kepada Saksi siapa ini?

1442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [02:55:31]

Kepada Saksi dari Saksi yang TPS 16.

1443. KETUA: SUHARTOYO [02:55:36]

Ada dua 16, Pak?

1444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [02:55:37]

Ya, 16 itu yang khusus mandat PPP, Pak.

1445. KETUA: SUHARTOYO [02:55:42]

Ada tidak soal tidak adanya form itu, kan sudah malam itu?

1446. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:55:46]

Jadi begini, Pak, Yang Mulia. Pada saat setelah (...)

1447. KETUA: SUHARTOYO [02:55:54]

Bapak jawab saja ada tidak?

1448. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:55:54]

Tidak ada.

1449. KETUA: SUHARTOYO [02:55:55]

Tidak ada. Cukup Pak? Masih ada?

1450. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:55:57]

Cukup. Untuk yang terkait hilangnya absensi di TPS 95. Ini (...)

1451. KETUA: SUHARTOYO [02:56:07]

Ke siapa ini?

1452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [02:56:08]

Untuk ke saksi mandat kami di TPS 95.

1453. KETUA: SUHARTOYO [02:56:11]

Ya. 95, Pak.

1454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [02:56:13]

Apakah benar bahwa surat sua ... absensi di TPS 95 itu tidak ditemukan? Dan kemudian apakah benar bahwa saksi kami atau saksi kita ini protes atau tidak? Dan apakah kemudian itu (ucapan tidak terdengar jelas) atau tidak? Terima kasih.

1455. KETUA: SUHARTOYO [02:56:37]

Ya. Absen sudah ditemukan, Pak?

1456. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAIMIN ROYANI [02:56:41]

Terima kasih. Absen tidak ditemukan, Yang Mulia.

1457. KETUA: SUHARTOYO [02:56:44]

Tidak ditemukan. Atau di ... Bapak tidak tahu karena menurut ... anu ... sudah ditemukan.

1458. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAIMIN ROYANI [02:56:49]

Mohon izin, ketika ditemukan itu, di situ tidak diberitahukan bahwa di situ ada absensi.

1459. KETUA: SUHARTOYO [02:57:57]

Ya.

1460. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAIMIN ROYANI [02:56:57]

Sampai selesainya perhi ... rekapitulasi.

1461. KETUA: SUHARTOYO [02:57:59]

Ya.

**1462. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-
16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAIMIN ROYANI
[02:57:00]**

Itu tidak ada.

1463. KETUA: SUHARTOYO [02:57:00]

Tapi akhirnya ditemukan? Enggak tahu?

**1464. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-
16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAIMIN ROYANI
[02:57:04]**

Tidak ada.

1465. KETUA: SUHARTOYO [02:57:04]

Tidak ada.

**1466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-
16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA
[02:57:05]**

Izin, Yang Mulia. Apakah ditemukan di saat pleno (...)

1467. KETUA: SUHARTOYO [02:57:07]

Nah itu.

**1468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-
16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA
[02:57:08]**

Atau di luar pleno? Terima kasih.

**1469. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-
16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAIMIN ROYANI
[02:57:12]**

Di luar itu, Pak.

1470. KETUA: SUHARTOYO [02:57:14]

Di luar pleno. Cukup, Pak?

1471. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [02:57:16]

Kalau ke per ... Termohon, Yang Mulia, bisa?

1472. KETUA: SUHARTOYO [02:57:18]

Satu pertanyaan, silakan. Yang mana?

1473. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [02:57:20]

Yang Mulia, untuk di ... saksi untuk yang PPK. Sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2024, Pasal 15 ayat (10) bahwa PK ... PPK itu wajib untuk memberikan sebuah Form Keberatan.

1474. KETUA: SUHARTOYO [02:57:43]

Ya.

1475. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [02:57:44]

Pada setiap keberatan yang dilakukan oleh partai ... saksi partai politik.

1476. KETUA: SUHARTOYO [02:57:47]

Ya. Pertanyaannya apa, Pak?

1477. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [02:57:47]

Apakah itu dilakukan oleh Saudara Saksi? Yang lain, untuk di TPS 95 ketua (...)

1478. KETUA: SUHARTOYO [02:57:56]

Soal daftar hadir (...)

1479. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [02:57:57]

Tentang daftar hadir ini, ternyata bukan daftar hadir saja, Yang Mulia. Berdasarkan temuan dari Bawaslu, itu bukan hanya daftar hadir yang hilang, termasuk surat pindah memilih.

1480. KETUA: SUHARTOYO [02:58:09]

Ya, ada dua.

1481. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [02:58:11]

Kemudian surat suara yang tidak sah. Itu bagaimana Anda dan kapan itu ditemukan?

1482. KETUA: SUHARTOYO [02:58:18]

Tahu, Pak? Yang lain, Pak, selain tadi yang ... yang ... kalau absen kan pakai ... absen kan tadi sudah ditemukan, meski benar tidak di saat pleno, ditemukannya?

1483. SAKSI DARI TERMOHON: MIFTAHIL [02:58:29]

Betul, Yang Mulia.

1484. KETUA: SUHARTOYO [02:58:30]

Kemudian, soal yang pemilih yang pindah?

1485. SAKSI DARI TERMOHON: MIFTAHIL [02:58:33]

Keberatan.

1486. KETUA: SUHARTOYO [02:58:35]

Yang pindah lama atau yang satunya, yang persoalan yang satunya? Kan ada tiga tadi.

1487. SAKSI DARI TERMOHON: MIFTAHIL [02:58:41]

Di ... untuk TPS 95?

1488. KETUA: SUHARTOYO [02:58:44]

Ya.

1489. SAKSI DARI TERMOHON: MIFTAHIL [02:58:46]

Ya, tidak ada.

1490. KETUA: SUHARTOYO [02:58:46]

Terus yang itu tidak ada juga? Tidak ditemukan kalau itu?

1491. SAKSI DARI TERMOHON: MIFTAHIL [02:58:49]

Tidak, pada saat pleno tidak.

1492. KETUA: SUHARTOYO [02:58:51]

Dua-duanya?

1493. SAKSI DARI TERMOHON: MIFTAHIL [02:58:52]

Ya.

1494. KETUA: SUHARTOYO [02:58:53]

Baik absen yang tidak dari pindahan maupun yang pindahan?

1495. SAKSI DARI TERMOHON: MIFTAHIL [02:58:57]

Ya, itu untuk TPS 95.

1496. KETUA: SUHARTOYO [02:58:59]

Dua-duanya ketemu akhirnya?

1497. SAKSI DARI TERMOHON: MIFTAHIL [02:59:00]

Akhirnya ketemu.

1498. KETUA: SUHARTOYO [02:59:02]

Dua-duanya?

1499. SAKSI DARI TERMOHON: MIFTAHIL [02:59:02]

Dua-duanya.

1500. KETUA: SUHARTOYO [02:59:03]

Berapa wak ... kok, Pak (...)

1501. SAKSI DARI TERMOHON: MIFTAHIL [02:59:06]

Pak, Pak ini yang menemukan, Pak.

1502. KETUA: SUHARTOYO [02:59:07]

Berapa lama setelah pleno, Pak?

1503. SAKSI DARI TERMOHON: DARMAWAN [02:59:11]

Kurang lebih 5 harian.

1504. KETUA: SUHARTOYO [02:59:14]

Jangan-jangan dibuat lagi, dibiarkan tanda tangan lagi, enggak?

1505. SAKSI DARI TERMOHON: DARMAWAN [02:59:18]

Tidak itu asli, Yang Mulia.

1506. KETUA: SUHARTOYO [02:59:20]

Asli ya?

1507. SAKSI DARI TERMOHON: DARMAWAN [02:59:20]

Asli, Yang Mulia.

1508. KETUA: SUHARTOYO [02:59:21]

Terus yang soal suara yang ... pe ... pengaruh suara itu kan ada tiga masalah tadi? Bisa menjawab?

1509. SAKSI DARI TERMOHON: DARMAWAN [02:59:28]

(ucapan tidak terdengar jelas).

1510. KETUA: SUHARTOYO [02:59:30]

Tidak ada kaitannya?

1511. SAKSI DARI TERMOHON: DARMAWAN [02:59:31]

Tidak ada kaitannya.

1512. KETUA: SUHARTOYO [02:59:32]

Dibantah kalau itu, Pak. Bukan dibantah. Tidak. Katanya saksi tidak tahu kalau soal, tidak.

1513. SAKSI DARI TERMOHON: MIFTAHIL [02:59:39]

Izin, Yang Mulia. Menjawab pertanyaan tadi terkait D.Keberatan itu, ya, Pak. Pada saat itu, ya, karena sudah disepakati dan tidak ada yang minta, ya, kami tidak memberikan.

1514. KETUA: SUHARTOYO [02:59:52]

Keluarkan form itu?

1515. SAKSI DARI TERMOHON: MIFTAHIL [02:59:53]

Betul, Yang Mulia.

1516. KETUA: SUHARTOYO [02:59:55]

Tapi PKPU-nya tadi wajib, Bapak tanggapi, enggak?

1517. SAKSI TERMOHON: MIFTAHIL [03:00:04]

Ya, kalau ada permintaan, pasti kami akan berikan. Karena mungkin ... eh ... bukan mungkin karena kami menganggap itu sudah disepakati dan sepertinya seperti itu.

1518. KETUA: SUHARTOYO [03:00:12]

Oke. Dari Termohon ada pertanyaan tidak?

1519. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:00:15]

Ada, Yang Mulia.

1520. KETUA: SUHARTOYO [03:00:16]

Kepada siapa?

1521. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:00:17]

Ke semua Saksi yang dihadirkan Pemohon, dari satu pertanyaan.

1522. KETUA: SUHARTOYO [03:00:21]

Satu saja, jangan semua. Itu mau mewakili nanti bisa (...)

1523. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:00:22]

Oke.

1524. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:00:26]

Untuk Saksi Pak Aat, ya, sama Pak Sudirman, itu pertanyaan satu. Apakah Saksi ini hadir dan diundang di dalam rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan?

1525. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [03:00:43]

Hadir, Pak.

1526. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:00:43]

Kemudian, apakah juga menandatangani daftar hadir?

1527. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [03:00:49]

Menandatangani.

1528. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:00:48]

Oke.

1529. SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AAT HIDAYAT [03:00:53]

Dan Bapak dari PPK juga tahu.

1530. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:00:54]

Oke.

1531. KETUA: SUHARTOYO [03:00:55]

Oke.

1532. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:00:56]

Kemudian, saya ingin tanya juga kepada Saksi yang kami hadirkan, Yang Mulia, untuk mengkonfirmasi. Kepada Pak Miftahil, ya, apakah benar Pak Aat Hidayat sama Pak Sutirman ini juga hadir dalam rapat rekapitulasi hasil ... apa ... di tingkat kecamatan?

1533. SAKSI TERMOHON: MIFTAHIL [03:01:22]

Betul.

1534. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:01:21]

Juga menandatangani daftar hadir?

1535. SAKSI TERMOHON: MIFTAHIL [03:01:23]

Ada, menandatangani.

1536. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:01:26]

Oke. Terus kepada Saksi Pak Era Rahmat Sudomo, Yang Mulia. Kepada Pak Era, apakah benar apa yang disampaikan oleh Saksi Pak Miftahil tentang adanya kesalahan, kemudian dilakukan koreksi di tingkat kecamatan terkait dengan suara sah dan tidak sah yang ada di TPS 16?

1537. SAKSI TERMOHON: ERA RAHMAT [03:01:49]

Betul.

1538. KETUA: SUHARTOYO [03:01:50]

Cukup, ya?

1539. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:01:51]

Cukup, Yang Mulia.

1540. KETUA: SUHARTOYO [03:01:51]

Baik. Jadi, untuk perkara ini ada bukti dari Termohon T-25 dan T-26, ya?

1541. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [03:02:00]

Benar, Yang Mulia.

1542. KETUA: SUHARTOYO [03:02:03]

Tapi, bukti fisiknya telah ... oke, telah sesuai. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian, untuk Perkara 46.

1543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [03:02:16]

Lagi, Yang Mulia?

1544. KETUA: SUHARTOYO [03:02:17]

Sudah selesai, Pak. Sudah tadi, sudah diberi kesempatan. Perkara 46 sudah selesai, ya. Terima kasih kepada para pihak. Kemudian, untuk perkara 46 ini selanjutnya menunggu bagaimana nanti Mahkamah menyikapi permohonan ini dan nanti akan diberitahukan pada waktu yang sudah ditentukan nanti. Silakan bisa meninggalkan tempat untuk Perkara 46.

1545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [03:02:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin meninggalkan ruangan.

1546. KETUA: SUHARTOYO [03:02:57]

Silakan. Saksi-Saksi juga, terima kasih. Dilanjut Perkara 183. Supaya maju, Saksi Pemohon Ade Sugiri. Mana Kuasa Hukum ini? Maju, Pak. 183, Kuasa Hukum ini Termohon. Maju, Pak. Jangan di belakang gitu. Nanti daripada malah suruh di luar, kan malah repot. Kemudian, Hafid Amrullah, maju, Pak, langsung, Pak. Syamsudin. Kemudian, Didin Saepudin. Untuk Termohon. Pendi, Tauhid, Nanas Nasihin[sic!], Dede. Ini Pihak Terkait Saksinya baru diserahkan hari ini, ya?

1547. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:03:50]

Sudah dimasukkan langsung di dalam online, Yang Mulia, kemarin.

1548. KETUA: SUHARTOYO [03:03:53]

Sudah?

1549. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:03:53]

Sudah, Yang Mulia

1550. KETUA: SUHARTOYO [03:03:55]

Buktinya masuk tanggal berapa, jam berapa?

1551. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:04:00]

Kalau yang dimasukkan sekarang itu langsung yang 4 rangkap, Yang Mulia. Tapi untuk daftarnya langsung dimasukkan kemarin malam, Yang Mulia.

1552. KETUA: SUHARTOYO [03:04:04]

Buktinya, ada yang dimasukkan kemarin malam. Kemarin malam mana, ya? Kan hari kerja.

1553. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:04:10]

Ya, melalui online, Yang Mulia.

1554. KETUA: SUHARTOYO [03:04:13]

Hari kapan itu?

1555. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:04:13]

Semalam, Yang Mulia.

1556. KETUA: SUHARTOYO [03:04:16]

Ha? Bukan semalam, kan satu hari kerja sebelum.

1557. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:04:20]

Ya, hari Minggu, Yang Mulia.

1558. KETUA: SUHARTOYO [03:04:21]

Hari Minggu itu kan, hari libur, Pak.

1559. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:04:23]

Benar, Yang Mulia. Dimasukkan secara online, Yang Mulia. Kalau yang hari ini kita masukkan di (...)

1560. KETUA: SUHARTOYO [03:04:27]

Ya. (...)

1561. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:04:27]

10.27 tadi, Yang Mulia.

1562. KETUA: SUHARTOYO [03:04:29]

Dimasukkannya tidak di hari libur, Pak. Hari kerja.

1563. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:04:34]

Oh, ya. Benar, Yang Mulia.

1564. KETUA: SUHARTOYO [03:04:36]

Nah, itu dia. Mana saksi-saksi, Saudara? Berapa orang itu?

1565. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:04:40]

Ada lima orang saksi dan satu orang ahli, Yang Mulia.

1566. KETUA: SUHARTOYO [03:04:41]

Nanti di, kami pertimbangkan ya, karena sudah diserahkan di hari libur lagi. Silakan, kalau mau didengar tidak?

1567. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:04:52]

Apa, Yang Mulia?

1568. KETUA: SUHARTOYO [03:04:52]

Mau didengar tidak?

1569. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:04:54]

Mau didengar, Yang Mulia.

1570. KETUA: SUHARTOYO [03:04:55]

Silakan. Nanti kami pertimbangkan. Ayo, maju semua.

1571. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:04:59]

Maju, maju.

1572. KETUA: SUHARTOYO [03:05:01]

Mansyur, Agil, Supriyadi, Mufrod, Dipo Heru Prayitno.

1573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:05:06]

Izin, Yang Mulia, untuk Ahli lagi. Tadi ada di atas, Yang Mulia (...)

1574. KETUA: SUHARTOYO [03:05:11]

Ya, nanti ahli belakangan saja kita dengar.

1575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:05:13]

Baik, Yang Mulia.

1576. KETUA: SUHARTOYO [03:05:12]

Dengan Ahlinya Pemohon sekalian ... Termohon. Saksi, semua agama Islam, ya? Bapak, Islam? Katolik? Katolik ya, Pak Dipo, ya. Bapak nanti disumpah tersendiri. Sekarang Yang Islam dulu. Bapak, maju. Mundur dulu, Bapak mundur dulu. Ikuti saya, yang Islam, ya.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

1577. SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [03:05:12]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

1578. KETUA: SUHARTOYO [03:05:12]

Ya, kembali ke tempat. Silahkan, semua. Kemudian yang Pak Dipo, Yang Mulia Bapak Daniel.

1579. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:06:13]

Baik, terima kasih, Pak Dipo, ya. Agama Katolik, ya. Baik, tiga jari. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

Baik, terima kasih. Terima kasih.

1580. SAKSI YANG BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH [03:06:13]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

1581. KETUA: SUHARTOYO [03:06:51]

Terima kasih. Untuk ahli, silakan ada Bapak Maruarar dan Pak Arsun ... Prof. Arsun, Asrun, monggo maju. Saya ambil, bantu lafal sumpah untuk Pak Asrun. Nanti untuk Yang Mulia Pak Maruarar biar Pak Daniel. Ikuti.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya."

Silakan, Yang Mulia.

1582. AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [03:06:51]

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

1583. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:07:31]

Baik. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, ikuti lafal janji yang akan saya tuntun.

“Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.”

Baik, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

1584. AHLI YANG BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

1585. KETUA: SUHARTOYO [03:08:02]

Baik, kalau begitu biar Ahli dulu memberi keterangan dari Termohon Pak Andi Asrun, kira-kira 5 menit sebagai Termohon dulu, baru nanti Pihak Terkait.

Di situ juga enggak apa-apa atau mau ke podium, silakan, waktunya 5 menit nanti kalau ada pertanyaan dari.

1586. AHLI TERMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN [03:08:37]

Terima kasih, Yang Mulia, Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua.

Poin pertama, yang ingin saya katakan adalah bahwa ketaatan terhadap norma hukum sifatnya absolut, ya. Dan norma hukum itu kita bisa lihat di dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi putusan pengadilan. Termasuk dalam hal ini ketika perselisihan pemilu maka para pihak, para penyelenggara, para kontestan pemilu harus taat terhadap undang-undang berkaitan dengan pemilu, yaitu Undang-Undang MK, Undang-Undang Pemilu, dan hukum acara MK yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan panduan teknis, ini yang menurut saya yang penting.

Dan kemudian, berdasarkan kajian saya terhadap permohonan ini, saya tidak melihat adanya alasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang 7/2017, Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375, Pasal 376, alasan untuk melakukan pemilihan ulang. Dan kemudian juga saya tidak melihat ada ... saya melihat ada konsistensi, ya ... inkonsistensi di dalam permohonan ini bahwa justru Pemohon di dalam permohonan ini dalam Positanya, ingin memperjuangkan suara perolehan suara PDIP, bukan suaranya sendiri. Dan kemudian ada juga yang, menurut saya, kesalahan fatal yang tidak mengikuti panduan teknis yang dibuat MK untuk

beracara, bimbingan teknis beracara MK bahwa ada Petitum 2 kali. Ini menyalahi penduan teknis, menyalahi hukum acara, dan kemudian 2 Petitum ini, dimuat dalam kategori terpisah, substansinya juga berbeda. Kemudian, saya melihat juga bahwa saat ini dikatakan tidak ada di dalam permohonan ini, tidak saya melihat adanya satu pernyataan atau keterangan bahwa pihak Pemohon ini menempuh jalur-jalur hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Misalnya, melakukan keberatan, mengisi form keberatan di tingkat TPS atau PPK, saya tidak melihat ini. Dan kemudian tidak ada juga pelaporan ke Bawaslu yang punya hasil. Ini yang menurut saya penting, Yang Mulia, sebagai langkah awal.

Jadi, ketika Pihak Pemohon ini tidak menggunakan haknya, ya sebagaimana diatur dalam undang-undang dan PMK, dalam Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang MK, dan PMK maka dia tidak bisa lagi menggunakan haknya menuntut keberatan, mengajukan keberatan pada forum lain seperti di Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian juga saya melihat bahwa secara berjenjang penyelenggara pemilu KPU RI, KPU Povinsi, KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan tugas dan kewenangannya secara berjenjang. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

1587. KETUA: SUHARTOYO [03:12:09]

Baik. Terima kasih, Prof.
Dilanjut, Yang Mulia, Bapak Dr. Maruarar.

1588. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARUARAR SIAHAAN [03:12:27]

Majelis Hakim MK Yang Mulia, seluruh peserta. Kami dari ... diminta oleh Pihak Terkait untuk ikut memberikan suatu keterangan. Dan keterangan kita ada beberapa yang agak mirip tadi dengan Saudara Asrun ini. Dan dari sisi saya, apa yang terlihat bagi kita bahwa Pemohon memang benar seperti dikatakan, tidak konsisten terhadap apa yang menjadi aturan-aturan secara teknis, baik dalam undang-undang maupun di dalam aturan ... peraturan PMK tersebut. Kalau kita lihat misalnya bahwa dari apa yang sudah diajukan juga dalam Eksepsi bahwa satu inkonsistensi yang pertama dan meskipun permohonan sudah diperbaiki, tetap juga yang dimohon perselisihan hasil pemilu DPR di Dapil 2 di Aceh. Itu kalau dari sisi ... anu ... ya, namanya ya mungkin silap tapi tidak bisa silap, ya kan. Kalau di dalam perselisihan pemilu dengan sudah ada bimbingan teknis, bahkan sampai menjawab, menyusun. Ini sebenarnya kesempatan itu sudah ada, tapi muncul juga perbaikan sudah tanggal 27, tetap juga di Aceh. Ya enggak nyambung lah kan, *sorry to say* men.

Nah kalau kita lihat bahwa satu hal lain yang menjadi persoalan bahwa Petition atau permohonan perselisihan hasil pemilihan itu adalah merupakan suatu permohonan yang diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, jadi keputusannya itu sebenarnya. Tetapi yang mempengaruhi, ya bisa kita persoalkan 100, tetapi kalau 150 yang menjadi persoalan diperoleh lawan itu kan tidak mempengaruhi perolehan kursi.

Nah, ini yang tidak diuraikan dalam hal ini, yaitu perolehan suara PDIP di Dapil 2 Banten itu didalilkan keliru dan harus sedemikian rupa, perolehan kursi partai politik PDIP itu harusnya segini, sejumlah ini, tetapi mereka tidak menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon terpengaruh enggak dengan adanya pelanggaran itu sehingga dia memperoleh kursi itu, tetapi bukan pihak lawan.

Yang kedua, ya keberatan lain itu diajukan sebenarnya bahwa tiap rapat pleno tahap perhitungan sudah dihadiri oleh peserta dan sudah menyatakan. Meskipun kemudian, belakangan mungkin ada di situ disebutkan bahwa PPK itu menyatakan ini waktu sudah habis ini, tolong dulu disetujui saja dulu. Tetapi tentu godaan-godaan semacam itu kan kalau di daerah ... di daerah kita itu namanya tipu-tipu itu kan. Pesawat terbang juga bisa ditipu itu. Saya minta tiketnya ke Jakarta naik pesawat, tapi saya jalan darat. Kemudian di jalan raya saya bilang saya tipu dia katanya. Nah, itu yang menjadi persoalan sudah tiap tahap tadi sudah disebutkan oleh Pak Asrun tadi, ada kesempatan untuk itu. Dan ketika kemudian terjadi bahwa sudah penentuan atau penetapan ... perolehan hasil suara di KPU nasional, mereka masih mengajukan keberatan kepada Bawaslu Provinsi dan kemudian munculah dari keberatan administratif itu, hukuman terhadap penyelenggara, tapi apakah misalnya di dalam hal itu perolehan suara itu dengan seluruh dokumen yang ada diperiksa atau tidak, tidak ada disebutkan di dalam apa yang disebutkan oleh Bawaslu.

Ketiga ... kedua, ini lagi Berita Acara hasil penghitungan ... perhitungan suara jika disetujui ditandatangani oleh wakil partai peserta pemilu yang hadir. Kalau ini sudah ada, kemudian muncul lagi keberatan tentu itu menjadi pertimbangan bagi pada Majelis. Nah, yang menjadi persoalan khusus yang dihadapi apakah ... apakah jika benar dengan alat bukti yang sah terjadi kesalahan sebagaimana didalilkan, maka seharusnya Pemohon itu mengikuti ketentuan yang ditentukan dengan tata cara penyusunan permohonan itu tadi. Bahwa kesalahan perhitungan itu dan kesalahan perhitungan itu mempengaruhi tidak terhadap perolehan suara ... perolehan kursi karena ini adalah partai.

Nah oleh karena itu, di dalam soal pembuktian sengketa proses dan sengketa hasil terlepas dari Eksepsi yang dikemukakan oleh Termohon yang dari pihak KPU, yaitu tadi yang sudah kami kutip itu, perbaikan dan awal juga permohonan itu tetap menyatakan yang dipersoalkan adalah Keputusan KPU tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan

Suara DPR di Dapil 2 Aceh, jadi kalau dia sudah konsisten begini ya, ya kalau bahasa anunya, ya sudah lah, kalau dua kali salah agak berat karena mungkin copy paste ya memang begitulah kalau di pemilu, pilkada, dan lain sebagainya. Nah, kalau di samping ini barangkali bagi Hakim ... bagi Majelis ini cacat surat kuasa, tentu adalah formalitas-formalitas yang sangat sederhana, yaitu surat kuasa tidak dilampirkan katanya dari ketua umum dengan lengkap dengan fotokopi kartu tanda penduduk, tetapi yang justru Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 itu, diatur itu menjadi suatu ketegasan aturan main sebenarnya bahwa kita memiliki kelengkapan-kelengkapan.

Nah oleh karena itu, ketiga hal pertama yang sudah disebutkan itu sebenarnya dari sudut persyaratan formalitas itu sudah menyangkut ontvankelijkheid daripada suatu permohonan yang dengan mudah sebenarnya MK, sorry to say, bisa menerapkan regulasi atau peraturan yang sudah ... sudah disusun dan bahkan pedoman itu sudah di ... diseberluaskan dalam diklat-diklat oleh MK di Puncak itu.

Jadi oleh karena itu, dari awal sebenarnya secara prima facie, dengan sederhana melihatnya, kita telah bisa mengambil keputusan dalam kasus ini sesungguhnya, tetapi seandainya pun Majelis akan masuk maka yang menjadi persoalan besar di sini bahwa di dalam perhitungan yang dituntut sesudah di tingkat ... apa namanya ... provinsi ya, provinsi di ... Bawaslu dilaporkan kembali padahal tanggal ketika dilakukan pemeriksaan atau investigasi itu, di KPU pusat sudah akan ditetapkan hasil perolehan suara, tentu barangkali ada ketentuan peraturan Bawaslu khusus tentang ini dan apakah kemudian kalau dinyatakan pelaksana atau penyelenggara pemilu mulai dari PPS sampai kepada KPU kabupaten/kota telah melakukan pelanggaran di dalam sengketa administratif ini, apakah misalnya kita akan menggunakan itu sedemikian rupa juga untuk melihat sebenarnya dari hasil penyimpangan itu, bolehkah kita tunjukkan perolehan suara yang salah itu di mana dan pengaruhnya terhadap perolehan kursi dari Pemohon itu di mana? Jadi, kalau saya perhatikan di dalam permohonan itu bahwa Pihak Terkait saja yang dipersoalkan suaranya digelembungkan yang dibawa di dalam persoalan ini. Tetapi apakah benar, sudah disandingkan itu sehingga dicapai hal seperti itu karena dengan mudah, dengan kita lihat dari paparan yang diajukan dalam permohonan, tetapi dari mana angka itu, apakah itu dari C.Hasil atau dari C.Hasil Salinan? Ini menjadi kompetensi daripada Majelis, saya kira (...)

1589. KETUA: SUHARTOYO [03:21:27]

Ya.

1590. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARUARAR SIAHAAN [03:21:27]

Untuk melihat lebih lanjut.

1591. KETUA: SUHARTOYO [03:21:29]

Baik. Baik, Prof.

1592. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARUARAR SIAHAAN [03:21:28]

Saya kira dari kesimpulan itu, makanya kami berpendapat bahwa prima fasie permohonan itu sudah harus niet ontvankelijkheid, tetapi kalau mau dilihat, apakah misalnya di dalam pemeriksaan seperti yang di ... yang dikeluhkan oleh Pihak Terkait ketika pemeriksaan Bawaslu due proses tidak terjadi karena mereka tidak dalam investigasi yang dila ... dilakukan tidak didengar keterangannya. Saya kira ini tentu dari sudut fairness akan menjadi persoalan besar karena tujuan daripada suatu investigasi itu adalah untuk mencari ... mencari keadilan melalui proses yang disebutkan due proces of law.

Saya kira demikian, yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

1593. KETUA: SUHARTOYO [03:22:15]

Baik, terima kasih.

Dari Pemohon ada pertanyaan untuk Ahli? Atau dari Termohon dulu yang mengajukan Ahli. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan mungkin, Pak, dari Ahlinya.

1594. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [03:22:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin kami akan bertanya kepada dua Ahli sekaligus.

1595. KETUA: SUHARTOYO [03:22:36]

Ke Ahlinya Termohon dulu.

1596. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [03:22:38]

Ahlinya Termohon lebih dulu. Baik, terima kasih.

Kepada Prof. Andi Asrun, satu hal tadi soal Eksepsi tentang bahwa ada Dapil Aceh 2 yang dibawa-bawa ke permohonan ini.

Kemudian, saya coba menanyakan tentang formulasi Petitem dalam permohonan ini, di Petitem 1 mengabulkan, 2 membatalkan dan seterusnya, 3 memerintah Termohon untuk melakukan penyandingan data (...)

1597. KETUA: SUHARTOYO [03:23:13]

Tadi sudah dikomentari, sama Ahli kok itu. Bapak mau tanya apa? kan sudah dipersoal ... dibahas oleh Ahli itu.

1598. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [03:23:21]

Ya.

1599. KETUA: SUHARTOYO [03:23:21]

Soal Petitem.

1600. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [03:23:22]

Saya lebih konkret ke Petitem, Yang Mulia.

1601. KETUA: SUHARTOYO [03:23:24]

Ya, silakan.

1602. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [03:23:24]

Ini kan ada (...)

1603. KETUA: SUHARTOYO [03:23:25]

Singkat saja, Pak.

1604. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [03:23:26]

Ya.

Poin 4 dan poin 5. Poin 4 itu memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan rekapitulasi, sedangkan poin 5 nya itu menetapkan perolehan suara untuk partai PDIP sebesar 141.000. Poin Petitem 4, memerintahkan untuk rekapitulasi, sedangkan poin 5 menetapkan angka, apakah formulasi Petitem 4 dan 5 ini masuk dalam kategori

pertentangan antara Petitem 1 dengan yang lainnya? Itu saja, Yang Mulia.

1605. KETUA: SUHARTOYO [03:23:58]

Dengan Pak Dr. Maruarar sekalian kalau ada?

1606. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [03:24:01]

Sekalian dua.

1607. KETUA: SUHARTOYO [03:24:03]

Oh. Sekaligus satu pertanyaan.

1608. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [03:24:04]

Ya, terima kasih.

1609. KETUA: SUHARTOYO [03:24:05]

Baik. Dari Pihak Terkait ada pertanyaan? Pihak Terkait?

1610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:24:09]

Kita ada pertanyaan, Yang Mulia.

1611. KETUA: SUHARTOYO [03:24:11]

Tidak ada?

1612. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:24:12]

Ada, ada, Yang Mulia.

1613. KETUA: SUHARTOYO [03:24:13]

Silakan.

1614. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:24:14]

Langsung kepada Ahli Termohon (...)

1615. KETUA: SUHARTOYO [03:24:16]

Ya, satu-satu. Silahkan.

1616. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:24:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan saya tadi hanya untuk memperjelas pandangan dari Ahli yang menyatakan bahwa seorang Pemohon atau siapapun tidak boleh lagi menggunakan haknya di forum lain jika Pemohon tersebut sudah menggunakan haknya di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.

1617. KETUA: SUHARTOYO [03:24:41]

Pertanyaan Saudara apa?

1618. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:24:44]

Apa penjelasan tentang hak itu (...)

1619. KETUA: SUHARTOYO [03:24:48]

Oke. Dari Pemohon Kuasa Hukum, ada pertanyaan?

1620. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [03:24:53]

Baik. Pada Ahli, ya. Nanti boleh dua-duanya ikut menanggapi. Saudara Ahli (...)

1621. KETUA: SUHARTOYO [03:25:01]

Untuk dua-duanya, ya? Silahkan.

1622. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [03:25:03]

Bagaimana pendapat Ahli? Tadi Ahli Asrun bilang bahwa norma hukum itu berlaku absolut. Bagaimana menurut Ahli kepastian hukum apabila ada putusan Bawaslu yang tidak ...nindak... ditindaklanjuti oleh KPU? Terima kasih.

1623. KETUA: SUHARTOYO [03:25:21]

Baik, langsung.

1624. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:25:24]

Izin, Yang Mulia. Untuk yang Terkait bisa kita majukan langsung lagi? Atau satu-satu?

1625. KETUA: SUHARTOYO [03:25:28]

Tadi kan sudah saya suruh sekaligus.

1626. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:25:30]

Oh, saya kira tadi hanya untuk yang Termohon.

1627. KETUA: SUHARTOYO [03:25:32]

Makanya dicermati ...anu...

1628. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:25:34]

Baik, maaf, Yang Mulia.

1629. KETUA: SUHARTOYO [03:25:35]

Satu lagi untuk Pak Maru. Silahkan.

1630. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:25:40]

Kepada Ahli, saya mau bertanya. Apakah putusan, sebuah putusan administrasi dari Bawaslu yang diputus bertentangan dengan Peraturan Bawaslu sendiri, yang dalam hal ini, PerBawaslu Nomor 8 Tahun 2022, yang menyatakan, dalam hal setelah, ... saya ... saya bacakan, dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara peserta pemilu secara nasional, terdapat laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/kota, yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara peserta pemilu, dan terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu, yang diajukan oleh peserta pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, menghentikan laporan melalui kajian awal dan menyampaikan laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang penyelesaian hasil pemilu melalui keterangan tertulis.

Nah, pertanyaannya kepada Ahli, apakah produk hukum putusan tersebut dapat dipertimbangkan setidaknya oleh Majelis? Terima kasih.

1631. KETUA: SUHARTOYO [03:25:56]

Silakan, Prof. Andi Asrun jawab singkat-singkat.

1632. AHLI DARI TERMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN [03:27:01]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa kalau saya melihat Petitum di dalam permohonan ini, ada dua Petitum, ya dan kemudian Petitum satu itu ada inkonsistensi dari Petitum nomor sekian, nomor sekian.

1633. KETUA: SUHARTOYO [03:27:15]

Ya.

1634. AHLI DARI TERMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN [03:27:16]

Jadi kalau memang itu diminta penghitungan suara, penghitung suara. Karena itu yang yang bisa dieksekusi.

1635. KETUA: SUHARTOYO [03:27:23]

Ya.

1636. AHLI DARI TERMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN [03:27:23]

Kalau persandingan tidak memberikan arti apa-apa.

1637. KETUA: SUHARTOYO [03:27:27]

Baik, dari Pemohon berkaitan dengan rekomendasi (...)

1638. AHLI DARI TERMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN [03:27:35]

Ya, dari Pemohon. Saya melihat ini di dalam permohonan dikatakan bahwa ada laporan ke Bawaslu dan belum ada putusan dari Bawaslu.

1639. KETUA: SUHARTOYO [03:27:47]

Ada rekomendasi tadi pertanyaannya (...)

1640. AHLI DARI TERMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN [03:27:49]

Ini malah di poin 4 ini, di halaman 6 dikatakan bahwa terkait dengan pengelembungan suara PDIP di bawah kecamatan tersebut, Pemohon telah mengajukan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 13 Maret 2024 dan masih dalam tahap pemeriksaan.

1641. KETUA: SUHARTOYO [03:28:03]

Ini tadi pertanyaannya Pemohon (...)

1642. AHLI DARI TERMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN [03:28:05]

Ya.

1643. KETUA: SUHARTOYO [03:28:06]

Diawali dengan kepastian hukum.

1644. AHLI DARI TERMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN [03:28:08]

Ya, ya.

1645. KETUA: SUHARTOYO [03:28:08]

Artinya ketika ada persoalan-persoalan sifatnya yang prosedural tadi, ada permohonan yang ada salah typo atau salah ketik yang menyebut-menyebut Aceh, kemudian Petitum yang kontradiksi interminus lah, tapi Pemohon menyodorkan ini ada rekomendasi Bawaslu. Untuk kepastian hukum mana yang diutamakan? Kan kira-kira begitu kira-kira.

1646. AHLI DARI TERMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN [03:28:39]

Kalau saya lihat di ujungnya kita lihat. Kalau di Petitum yang enggak beres, maka permohonannya juga bisa dibilang enggak beres juga.

1647. KETUA: SUHARTOYO [03:28:46]

Gitu, ya.

1648. AHLI DARI TERMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN [03:28:47]

Saya kira intinya di situ. Kalau Bawaslu misalnya ada persoalan, di sini masalahnya ada Bawaslu juga. Bawaslu bisa menjelaskan. Terima kasih.

1649. KETUA: SUHARTOYO [03:28:55]

Baik. Ya, dari pertanyaan Pihak Terkait berkaitan dengan yang (...)

1650. AHLI DARI TERMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN [03:29:01]

Forum yang lain.

Saya kira ini problem juga kalau tidak menggunakan haknya secara berjenjang karena sudah diberikan undang-undang menggunakan hak keberatan secara berjenjang. Kalau tidak dipakai, maka haknya gugur, ketika diulang pada forum lain seperti Mahkamah Konstitusi, itu namanya sebuah inkonsistensi.

Terima kasih.

1651. KETUA: SUHARTOYO [03:29:24]

Baik. Dari Yang Mulia Bapak Dr. Maru, singkat-singkat.

1652. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARUARAR SIAHAAN [03:29:29]

Ya, saya kira kenapa sebenarnya PerBawaslu seperti itu muncul bahwa sudah ada penetapan hasil perolehan suara secara nasional, bahkan sudah masuk satu sengketa di Mahkamah Konstitusi, tentu adalah untuk tidak terjadi apa yang dikatakan kekacauan dalam ... dalam penilaian itu, yaitu kalau berjenjang sudah terjadi seperti itu sama dengan di ... di peradilan umum misalnya, itu kasus sudah di Mahkamah Agung, pengadilan tinggi masih mengeluarkan perintah, itu namanya intervensi dari satu sisi dan kedua, kekacauan atau ketidakpastian yang terjadi.

Oleh karena itu, masuk akal PerBawaslu seperti itu harus diterapkan. Karena nanti yang mana yang menjadi dipedomani ini kalau seandainya bertentangan putusan antara yang ditetapkan oleh Bawaslu, tetapi di Mahkamah Konstitusi kemudian muncul suatu aspek lain dari putusan itu yang berbeda. Oleh karena itu menurut saya, itu makanya ada yang disebutkan di setiap jenjang diadakan satu keberatan, proses keberatan, dan kalau sudah dilalui itu namanya sudah diterima tanpa suatu keberatan.

Oleh karena itu juga, jangan cepat misalnya digoda oleh apa yang dikatakan, "Oh, KPK menye ... apa ... PPK mengatakan tekan saja, waktu sudah habis". Ya, itu kalau mau diperdayakan begitu kan namanya, ya, kalau di dalam bahasa Tapanuli, ya, sate soto, mate naoto katanya. Kalau ada ... apa ... ya, yang dibodoh-bodohi ini ada ... apa ... jadi korban. Padahal semua kan sudah terpelajar yang ikut di dalam proses itu.

Saya kira dari sisi saya itu aja yang bisa saya (...)

1653. KETUA: SUHARTOYO [03:31:13]

Baik, baik.

Baik, Para Ahli, terima kasih. Sepertinya (...)

1654. PEMBICARA: [03:31:20]

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Pertanyaan kami tadi untuk kedua ahli tentang formulasi Petitum tadi (...)

1655. KETUA: SUHARTOYO [03:31:26]

Pak ... yang Petitum bertentangan, Pak Dr. Maru belum menjawab.

1656. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARUARAR SIAHAAN [03:31:29]

Ya, saya kira memang formulasi yang sudah ada di dalam peraturan PMK sudah sangat jelas, itulah yang harus kita pergunakan. Jadi, jangan biarkan misalnya muncul satu ... apa namanya ... semangat, sehingga menyebabkan bahwa apa yang sudah menjadi petunjuk teknis yang secara susah payah Mahkamah Konstitusi mengatur dalam aturan, bahkan mensosialisasikannya bagi lawyer di BIMTEK, di Puncak, saya kira harusnya bisa dipedomani dan tidak melenceng dari hal itu.

Terima kasih, Pak, Ketua.

1657. KETUA: SUHARTOYO [03:32:01]

Baik. Terima kasih, untuk kedua Ahli. Sudah bisa meninggalkan tempat.

1658. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARUARAR SIAHAAN [03:32:04]

Oh, terima kasih, Pak.

1659. KETUA: SUHARTOYO [03:32:04]

Biar kami periksa saksi-saksi.

1660. AHLI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARUARAR SIAHAAN [03:32:09]

Terima kasih, Pak.

1661. KETUA: SUHARTOYO [03:32:12]

Silakan, terima kasih atas keterangannya.

Sekarang dari Pak Ade Sugiri. Apa, Pak yang mau dijelaskan singkat-singkat, ya?

1662. SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:32:22]

Ya, siap, Majelis. Assalamualaikum wr. wb.

1663. KETUA: SUHARTOYO [03:32:30]

Walaikumsalam wr. wb.

1664. SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:32:32]

Saya akan menerangkan, pada saat Pleno PPK Kecamatan Taktakan (...)

1665. KETUA: SUHARTOYO [03:32:38]

Ya.

1666. SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:32:38]

Saksi mandat dari Partai Demokrat yang bernama Hidayatuddin, tidak menandatangani Berita Acara D.Hasil itu untuk DPR RI.

1667. KETUA: SUHARTOYO [03:32:56]

Karena apa?

1668. SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:32:54]

Karena keberatan adanya perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil. Namun, di situ pihak PPK dan panwascam itu mengabaikan. Itu justru mereka mengarahkan supaya dibuat atau dicatat dalam D.Kejadian Khusus. Jadi, itu yang direkomendasikan oleh PPK tingkat kecamatan dan panwascam.

1669. KETUA: SUHARTOYO [03:33:25]

PPK Taktakan, ya?

1670. SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:33:29]

Taktakan, ya.

1671. KETUA: SUHARTOYO [03:33:27]

Itu saja?

1672.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:33:27]

Nah, itu kemudian, dengan adanya kejadian seperti itu, saya pada saat itu sebagai pelapor, melaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu Kota Serang. Itu tanggal 4 Maret 2024. Dengan Nomor 010/LP/PL/Kota/11.01/III/2024.

1673. KETUA: SUHARTOYO [03:33:59]

Ya.

1674.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:34:00]

Selama tujuh hari saya mempertanyakan, tidak ada informasi, tidak ada pemberitahuan apapun. Kemudian, saya tanyakan kepada Bawaslu Kota bagaimana perkembangan laporan saya? Dijawab oleh orang Bawaslu pada saat itu, itu masih proses, karena kita harus komunikasi dengan pihak Gakkumdu. Padahal pada saat itu saya jelas (...)

1675. KETUA: SUHARTOYO [03:34:25]

Ini yang akhirnya keluar rekomendasi bukan?

1676.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:34:26]

Ya. Saya jelas bahwa pada saat itu melaporkan, saya sebutkan, saya melaporkan tiga peristiwa dugaan.

1677. KETUA: SUHARTOYO [03:34:33]

Ya. Artinya kemudian yang keluar rekomendasi itu bukan.

1678.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:34:36]

Ya. Itu bukan, bukan Majelis. Nanti itu bertahap, berjenjang.

1679. KETUA: SUHARTOYO [03:34:37]

Ya.

1680.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:34:42]

Itu berjenjang, Majelis. Dalam artian, pada saat di Bawaslu kota tersebut, saya melaporkan itu, pelanggaran, dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran etik, dan dugaan pelanggaran tindak pidana. Nah, itu saya mendapatkan jawaban dari Bawaslu Kota, itu pada tanggal 1 April. Jawaban tersebut bahwa, tidak cukup bukti.

1681.KETUA: SUHARTOYO [03:35:00]

Bukti.

1682.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:35:02]

Itu hampir satu bulan lebih. Tanggal 4 ke tanggal 1. Satu bulan kurang.

1683.KETUA: SUHARTOYO [03:35:09]

Ya. Ini Bapak (...)

1684.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:35:08]

Bawaslu Kota.

1685.KETUA: SUHARTOYO [03:35:09]

Sebagai apa sih, anunya? Jabatannya ketika itu?

1686.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:35:12]

Saya sebagai tim kordinator pemenangan pada saat itu.

1687.KETUA: SUHARTOYO [03:35:15]

Dari?

1688.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:35:18]

Dari partai, dari dewan, dari anggota dewan DPR RI. Kemudian (...)

1689. KETUA: SUHARTOYO [03:35:22]

Dari partai apa?

1690. SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:35:24]

Ya?

1691. KETUA: SUHARTOYO [03:35:25]

Partai apa?

1692. SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:35:25]

Demokrat.

1693. KETUA: SUHARTOYO [03:35:28]

Demokrat.

1694. SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:35:26]

Dari partai demokrat.

1695. KETUA: SUHARTOYO [03:35:27]

Oke.

1696. SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:35:27]

Kemudian, pada saat rapat Pleno, saya mendapat surat mandat untuk menjadi saksi.

1697. KETUA: SUHARTOYO [03:35:34]

Saksi.

1698.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:35:35]

pada rapat Pleno.

1699.KETUA: SUHARTOYO [03:35:37]

Ya, oke.

1700.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:35:39]

Pada rapat Pleno tersebut, saya kembali mempertanyakan terkait masalah kejadian waktu di PPK Kecamatan Taktakan. Yang tidak (...)

1701.KETUA: SUHARTOYO [03:35:49]

Tingkat apa ini, Bapak tanya ini?

1702.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:35:51]

Tingkat kota.

1703.KETUA: SUHARTOYO [03:35:52]

Kota.

1704.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:35:53]

Pada saat rapat Pleno kota (...)

1705.KETUA: SUHARTOYO [03:35:53]

Apa jawabannya ketika itu?

1706.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:35:56]

Jawaban pada saat ketika itu, itu yang dari 75 TPS yang bermasalah.

1707.KETUA: SUHARTOYO [03:36:03]

Ya.

1708.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:36:03]

Itu diambil sampling 9. Diambil sampling 9, kemudian pada saat itu diperiksa, Pak, disandingkan.

1709.KETUA: SUHARTOYO [03:36:11]

Ya.

1710.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:36:12]

Tetapi hanya yang 9 saja.

1711.KETUA: SUHARTOYO [03:36:14]

Padahal yang 70 (...)

1712.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:36:15]

Yang sisanya 55 itu tidak. Awalnya pihak KPU berkata kepada saya sebagai saksi, kalau mau silakan, kita ambil sampling. Saya tidak menjawab ya atau tidak.

1713.KETUA: SUHARTOYO [03:36:29]

Tapi akhirnya dilakukan (...)

1714.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:36:29]

Akhirnya mereka dilakukan sampling tersebut.

1715.KETUA: SUHARTOYO [03:36:31]

Ya, sudah. Hasilnya? Dari yang diambil sampling itu?

1716.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:36:34]

Diambil sampling 9 tersebut, ternyata memang ada koreksi untuk diperbaiki. Jadi, ada koreksi, Pak.

1717.KETUA: SUHARTOYO [03:36:43]

Itu, ya (...)

1718.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:36:43]

Di situ terbukti bahwa (...)

1719.KETUA: SUHARTOYO [03:36:45]

It ... itu diskresinya KPU ka ... kota, ya? Ketika (...)

1720.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:36:50]

KPU kota pada saat itu. Kemudian (...)

1721.KETUA: SUHARTOYO [03:36:52]

Bukan karena perintah dari rekomendasi atau apa dari pengawas, ya?

1722.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:36:57]

Tidak, tidak. Langsung dari KPU kotanya bahwa memang pada saat itu juga dicocokkan, disandingkan. Tetapi saya sebagai saksi pada saat itu tidak melihat.

1723.KETUA: SUHARTOYO [03:37:05]

Ya, cukup, Pak (...)

1724.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:37:07]

Sirekapnya. Kemudian (...)

1725. KETUA: SUHARTOYO [03:37:07]

Kalau Pak ap ... apalagi?

1726. SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:37:09]

Ya, kemudian pada saat itu yang 55-nya itu tidak ... tidak diakomodir.

1727. KETUA: SUHARTOYO [03:37:13]

Ya, Sudah kan, tadi sudah dijelaskan. Yang 53 tidak, kan?

1728. AKSI PEMOHON 183: ADE SUGIRI [03:37:16]

Ya.

1729. KETUA: SUHARTOYO [03:37:18]

Yang 9 saja.

1730. SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:37:20]

Ya, kemudian pada saat berikutnya itu ada juga, Pak. Ada keberatan dari di Kota Serang. Itu 1.200 suara yang di ... yang dikoreksi oleh (...)

1731. KETUA: SUHARTOYO [03:37:35]

1.200 suara siapa ini?

1732. SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:37:36]

Ya, di ... dikoreksi dan diperbaiki oleh Pleno Kota.

1733. KETUA: SUHARTOYO [03:37:41]

Oke. Pak Hafid?

1734.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:37:45]

Tapi itu, Pak. Lanjut, Pak. Karena tadi yang berjenjang itu karena memang tadi keterangan Ahli juga mengatakan berjenjang. Ini berkaitan dengan keterangan Ahli, Majelis.

1735.KETUA: SUHARTOYO [03:37:53]

Ya, jangan diresponskan, kan Ahli (...)

1736.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:37:55]

Ya, ya.

1737.KETUA: SUHARTOYO [03:37:56]

Punya independensi untuk berpendapat.

1738.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:37:56]

Ya, ya. Jadi (...)

1739.KETUA: SUHARTOYO [03:37:58]

Tapi kami yang menilai.

1740.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:37:58]

Keberatan ... nota keberatan saya berjenjang dari kecamatan ... PPK Kecamatan tidak direspons, diabaikan. Kemudian, di kota pun hanya sebagian yang diakomodir.

1741.KETUA: SUHARTOYO [03:38:09]

Ya.

1742.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:38:09]

Kemudian di tingkat provinsi pun tidak diakomodir sampai (...)

1743.KETUA: SUHARTOYO [03:38:14]

Tapi persoalannya, kalau yang berjenjang tadi itu kaitannya dengan ke lembaga lain, yang MK itu, Pak.

1744.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:38:19]

Ya.

1745.KETUA: SUHARTOYO [03:38:20]

Bukan konteksnya berjenjang dalam arti yang sempit seperti yang, Bapak ... dari PPK kemudian ke kabupaten, ke provinsi. Tapi Ahli tadi konteksnya pada yang sudah seharusnya selesai berjenjang, maupun tidak berjenjang, tapi kalau sudah ini berpindah ke institusi lain, ke MK mestinya itu sudah, itu kan pendapat Ahli. Jadi (...)

1746.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:38:47]

Ya.

1747.KETUA: SUHARTOYO [03:38:47]

Bapak ... apa ... nanti yang menilai (...)

1748.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SUGIRI [03:38:51]

Siap, Yang Mulia.

1749.KETUA: SUHARTOYO [03:38:52]

Ya. Pak Hafid, apa Pak Hafid? Singkat-singkat.

1750.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAFID AMARULLAH [03:38:55]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Langsung ... langsung saja, Yang Mulia.

1751.KETUA: SUHARTOYO [03:38:57]

Ya.

**1752.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-
16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAFID AMARULLAH
[03:39:00]**

Jadi, saya di sini akan menjelaskan soal data.

1753.KETUA: SUHARTOYO [03:39:02]

Saudara, jadi apa waktu itu?

**1754.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-
16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAFID AMARULLAH
[03:39:04]**

Saya di tim datanya.

1755.KETUA: SUHARTOYO [03:39:06]

Tim data mana? Demokrat juga?

**1756.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-
16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAFID AMARULLAH
[03:39:08]**

Ya, dari Demokrat. Untuk perhitungan suaranya (...)

1757.KETUA: SUHARTOYO [03:39:10]

Ya, apa yang diceritakan.

**1758.SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-
16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAFID AMARULLAH
[03:39:10]**

Baik. Jadi, yang kami temukan sejak awal itu ada di beberapa kecamatan. Walaupun di sini saya terfokus di tiga kecamatan, yaitu di kecamatan Walantaka dan Taktakan untuk yang di Kota Serang, dan di Kecamatan Baros untuk yang di kabupaten.

Untuk jumlah TPS-nya, di Walantaka ini ada dua ... sebetulnya ada 12 TPS, yaitu di Kelurahan Nyapah dari TPS 1 sampai dengan TPS 12. Hanya saja (...)

1759. KETUA: SUHARTOYO [03:39:40]

Ya. Itu enggak usah disebutkan, karena kami sudah ada (...)

1760. SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAFID AMARULLAH [03:39:41]

Oke.

1761. KETUA: SUHARTOYO [03:39:41]

Pegangan.

1762. SAKSI DARI PEMOHON NOMOR PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HAFID AMARULLAH [03:39:43]

Oke, siap. Berarti saya lanjut saja ke angka suara. Bahwasannya di sini hasil perhitungan kami untuk Pihak Terkait memperoleh suara di versi D.Hasil dari SK KPU itu=143.703. Sedangkan versi yang kita hitung adalah 142.119. Yang mana jikalau, misalkan dikurangi dari suara Demokrat itu berselisih sekitar 160 suara, yang mana di sini Partai Demokrat unggul. Begitu, Yang Mulia.

1763. KETUA: SUHARTOYO [03:40:20]

Baik.

1764. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [03:40:23]

Izin, Yang Mulia, untuk yang saksi yang ini, saya izin, Yang Mulia, dari Pihak Terkait. Untuk saksi yang katanya tim data ini, kan seharusnya bahwa berdasarkan peraturan acara di MK yang ditugaskan secara resmi, apakah benar ada penugasan dia, Saudara ini sebagai tim data dari Partai Demokrat? Apa dari calon persorangan?

Terima kasih, Yang Mulia.

1765. KETUA: SUHARTOYO [03:40:39]

Ya, itu bagian dari apa, dari keberatan Saudara, silakan. Tapi saksi pada prinsipnya silakan, siapa saja bisa menjadi saksi sepanjang

memang dia tidak terhalang dengan syarat-syarat yang ditentukan di ... apa ... di peraturan yang ditentukan, tapi untuk perkara PHPU, Pak, memang saksi di PMK tidak ... tidak rigid ada larangan-larangan seperti itu. Hanya kalau penyelenggara, memang pendirian MK selalu ditekankan kalau masih aktif tidak perlu dilakukan penyempahan, tapi kalau yang sudah tidak aktif lagi dilakukan penyempahan, tapi selebihnya memang fleksibilitasnya agak ... agak terbuka kalau untuk saksi ya di perkara PHPU.

Oke, Pak Syamsudin apa yang mau dijelaskan, Pak?

1766.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAMSUDIN [03:41:36]

Siap, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Saya di sini bertindak selaku pelapor dalam Perkara ini, ke Bawaslu tingkat provinsi, Bawaslu tingkat provinsi, ini dikarenakan tidak ada respons yang sebelumnya dari Bawaslu tingkat kota.

1767.KETUA: SUHARTOYO [03:41:54]

Bapak juga dari tim Demokrat, ya?

1768.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAMSUDIN [03:41:59]

Ya.

1769.KETUA: SUHARTOYO [03:41:59]

Di bagian apa, Bapak?

1770.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAMSUDIN [03:42:02]

Di advokasi.

1771.KETUA: SUHARTOYO [03:42:03]

Advokasi. Kemudian, karena tidak ada respons kemudian di tingkat provinsi, Bapak (...)

1772.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAMSUDIN [03:42:09]

Kita ke Bawaslu tingkat provinsi.

1773. KETUA: SUHARTOYO [03:42:10]

Provinsi.

1774. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAMSUDIN [03:42:11]

Provinsi. Kemudian langsung ditanggapi, dan dilakukan persidangan dan dari Bawaslu provinsi kemudian membentuk tim investigasi yang menyandingkan data-data yang kita berikan itu.

1775. KETUA: SUHARTOYO [03:42:25]

Bukan ini terkait dengan kemudian keluar rekomendasi itu?

1776. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAMSUDIN [03:42:29]

Ya.

1777. KETUA: SUHARTOYO [03:42:31]

Di Perkara, di Nomor 001 itu?

1778. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAMSUDIN [03:42:33]

Betul, Yang Mulia.

1779. KETUA: SUHARTOYO [03:42:36]

Ini keluarnya bulan apa sih, Pak?

1780. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAMSUDIN [03:42:38]

Bulan Maret, tanggal 28.

1781. KETUA: SUHARTOYO [03:42:40]

Maret atau April?

1782.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAMSUDIN [03:42:42]

Maret, Yang Mulia.

1783.KETUA: SUHARTOYO [03:42:43]

Maret, ya. 28 atau 29?

1784.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAMSUDIN [03:42:46]

28, Yang Mulia.

1785.KETUA: SUHARTOYO [03:42:50]

Oke, tapi Perkara sudah Pemohon atau partai Saudara sudah mengajukan gugatan di MK, ya? Ketika itu?

1786.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAMSUDIN [03:43:00]

Ketika mengajukan, belum, Yang Mulia.

1787.KETUA: SUHARTOYO [03:43:01]

Ketika ada putusan ini? Ada putusan 29 Maret, sudah mengajukan gugatan di MK belum?

1788.SAKSI DARI PEMOHON PERKARA 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAMSUDIN [03:43:14]

Sudah, Yang Mulia.

1789.KETUA: SUHARTOYO [03:43:15]

Sudah, ya. Bapak pakai tengok sana, tengok sini.

Oke, Pak. Dari Termohon Didin Saepudin apa apa yang mau menjelaskan singkat-singkat, Pak?

1790.SAKSI DARI TERMOHON: DIDIN SAEPUDIN [03:43:29]

Siap, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

1791. KETUA: SUHARTOYO [03:43:34]

Walaikumsalam.

1792. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIN SAEPUDIN [03:43:37]

Saya Didin Saepudin, mantan ketua PPK Kecamatan Taktakan, pileg/pilpres, mau menyampaikan terkait dengan proses rekapitulasi di kecamatan, itu secara gambaran umum bahwa proses rekapitulasi itu adalah membuka kotak suara, mengeluarkan C.Hasil, kemudian C.Hasil, itu ditempel di papan, kemudian dibacakan dan terlihat oleh panwascam dan saksi partai politik, kemudian pembacaan dilakukan oleh PPS dan kemudian di-input ke dalam Sirekap. Sampai pada dimulai Sabtu, 17 Februari 2024.

1793. KETUA: SUHARTOYO [03:44:19]

Ini di Taktakan, ya?

1794. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIN SAEPUDIN [03:44:19]

Siap, Yang Mulia.

1795. KETUA: SUHARTOYO [03:44:19]

Terus singkat saja, Pak. Di sana kejadian apa?

1796. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIN SAEPUDIN [03:44:26]

Ya. Sampai akhir pada tanggal 2 Maret 2024, selama 15 hari kita melakukan rekapitulasi, maka kita putuskan di tanggal 2 Maret itu, kemudian lakukan pencermatan. Nah, dalam proses setelah penggandaan dan pendanatanganan, ada keberatan saksi, Yang Mulia.

1797. KETUA: SUHARTOYO [03:44:48]

Dari partai?

1798. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIN SAEPUDIN [03:44:48]

Dari partai Demokrat, ini atas nama Hidayatuddin, yang intinya bahwa isinya adalah menolak menandatangani hasil(...)

1799. KETUA: SUHARTOYO [03:44:57]

di PPK?

1800. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIN SAEPUDIN [03:44:57]

Di PPK, tetapi untuk provinsi beliau menandatangani. Jadi untuk kota dan RI dia tidak menandatangani.

1801. KETUA: SUHARTOYO [03:45:09]

Kota dan RI tidak?

1802. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIN SAEPUDIN [03:45:09]

Ya.

1803. KETUA: SUHARTOYO [03:45:09]

Keberatannya masih soal?

1804. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIN SAEPUDIN [03:45:09]

Kemudian keberatannya adalah meminta untuk membuka C.Plano di beberapa TPS.

1805. KETUA: SUHARTOYO [03:45:17]

Tapi dari penyelenggara tidak mau?

1806. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIN SAEPUDIN [03:45:24]

Karena pelaksanaannya sudah kita ketuk palu di tanggal 2 Maret, maka itu sudah ... apa namanya ... sudah selesai. Maka kita dikasih, memberikan sesuai aturan memberikan D.Keberatan, format D.Keberatan atau kejadian khusus yang kita sampaikan kepada semua.

1807. KETUA: SUHARTOYO [03:45:45]

Ya. Artinya tidak, Akhirnya kemudian tidak kebera... tidak tanda tangan baik di tingkat provinsi maupun nasional, ya?

1808. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIN SAEPUDIN [03:45:52]

Ya.

1809. KETUA: SUHARTOYO [03:45:52]

Tingkat kota dengan nasional?

1810. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIN SAEPUDIN [03:45:52]

Tingkat kota dan nasional.

1811. KETUA: SUHARTOYO [03:45:52]

Ke provinsi tanda tangan?

1812. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIN SAEPUDIN [03:45:59]

Tanda tangan, Yang Mulia.

1813. KETUA: SUHARTOYO [03:46:05]

Oke.
Kalau Pak Pendi.

1814. SAKSI TERMOHON: PENDI [03:46:09]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin apa yang disampaikan oleh Yang Mulia untuk singkat saja. Ini saya harus menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh Pihak Pemohon terkait di kelurahan ... di Kecamatan Walantaka. Saya mantan Ketua PPK Kecamatan Walantaka. Yang pertama adalah tadi sudah disampaikan mengenai proses rekapitulasi di Kecamatan Walantaka. Dalam proses tersebut tidak ada keberatan dari para saksi. Namun ketika setelah selesai di tahap penggandaan penandatanganan D.Hasil, pada malam itu ada keberatan dari saksi Partai Demokrat. Dan sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 jika ada keberatan setelah selesai, setelah selesai rekapitulasi, maka kami memfasilitasi untuk menyerahkan D.Keberatan, D ... form D.Keberatan sehingga Partai Demokrat menuangkan di form D.Keberatan itu di (...)

1815. KETUA: SUHARTOYO [03:47:18]

Tapi sudah tanda tangan belum? Sudah tanda tangan dari hasil rekapitulasi belum? Di tingkat Kecamatan Walantaka?

1816. SAKSI TERMOHON: PENDI [03:47:22]

Untuk tanda tangannya itu karena pas waktu itu sedang proses tanda tangan, si saksi ini, Yang Mulia, sekitar pukul 03.00 kalau tidak salah itu, awalnya tanda tangan. Ketika memang ada informasi dari tim Demokrat sehingga saksi yang sedang menanda tangan proses tanda tangan itu tidak jadi.

1817. KETUA: SUHARTOYO [03:47:41]

Tidak jadi.

1818. SAKSI TERMOHON: PENDI [03:47:41]

Tidak diteruskan teretangkan itu, Yang Mulia.

1819. KETUA: SUHARTOYO [03:47:45]

Loh bagaimana tanda tangan tidak diteruskan?

1820. SAKSI TERMOHON: PENDI [03:47:43]

Ya, itu.

1821. KETUA: SUHARTOYO [03:47:43]

Berhenti di tengah atau bagaimana?

1822. SAKSI TERMOHON: PENDI [03:47:46]

Belum selesai.

1823. KETUA: SUHARTOYO [03:47:49]

Setengah tanda tangan?

1824. SAKSI TERMOHON: PENDI [03:47:52]

Belum selesai.

1825. KETUA: SUHARTOYO [03:47:48]

Tapi sudah tanda tangan?

1826. SAKSI TERMOHON: PENDI [03:47:55]

Sudah sebagian tanda tangan.

1827. KETUA: SUHARTOYO [03:47:53]

Oh, karena banyak.

1828. SAKSI TERMOHON: PENDI [03:47:53]

Banyak penggandaan nya.

1829. KETUA: SUHARTOYO [03:47:53]

Lembar-lembar?

1830. SAKSI TERMOHON: PENDI [03:47:56]

Menggandaannya itu banyak, Yang Mulia.

1831. KETUA: SUHARTOYO [03:48:00]

Berarti ada sebagian ditandatangani, sebagian tidak?

1832. SAKSI DARI TERMOHON: PENDI [03:48:00]

Sebagian tidak, begitu, Yang Mulia. Sehingga D.Hasilnya di apa ... di (...)

1833. KETUA: SUHARTOYO [03:48:04]

Oke.

1834. SAKSI DARI TERMOHON: PENDI [03:48:04]

Saya sampaikan untuk D.Hasilnya.

1835. KETUA: SUHARTOYO [03:48:06]

Terus tahu Saudara keberatan tidak tanda tangan itu sampai di tingkat mana?

1836. SAKSI DARI TERMOHON: PENDI [03:48:11]

Saya hanya tahu di tingkat kecamatan.

1837. KETUA: SUHARTOYO [03:48:12]

Di Walantaka, ya?

1838. SAKSI DARI TERMOHON: PENDI [03:48:13]

Ya.

1839. KETUA: SUHARTOYO [03:48:13]

Oke.
Pak Tauhid.

1840. SAKSI TERMOHON: TAUHID [03:48:20]

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

Saya Tauhid, mantan Ketua PPK Kecamatan Baros ingin menyampaikan bahwa kegiatan rekapitulasi di Kecamatan Baros sepanjang kegiatan dari awal sampai akhir, kami memakai prosedur dan mekanisme yang ada di PKPU 5/2024, Pak ... Yang Mulia. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dan penetapan hasil pemilu, dari mulai membuka kotak di depan para saksi dan panwascam, memasang D.Hasil yang dalam kotak itu, terus (...)

1841. KETUA: SUHARTOYO [03:49:02]

Ya, kemudian dari hasil rekapitulasi di Baros ada persoalan tidak?

1842. SAKSI TERMOHON: TAUHID [03:49:06]

Tidak ada, Yang Mulia.

1843. KETUA: SUHARTOYO [03:49:08]

Tidak ada keberatan?

1844. SAKSI TERMOHON: TAUHID [03:49:09]

Tidak ada.

1845. KETUA: SUHARTOYO [03:49:11]

Partai Demokrat?

1846. SAKSI TERMOHON: TAUHID [03:49:12]

Termasuk Partai Demokrat pun datang menandatangani, ada bukti hasil penandatngannya ada, Yang Mulia.

1847. KETUA: SUHARTOYO [03:49:21]

Pak Nanas, apa yang terjadi di KPU Kota, ya?

1848. SAKSI TERMOHON: NANAS NASIHUDIN [03:49:27]

Siap Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr.wb.

Rekapitulasi dilakukan ... yang dilaksanakan oleh KPU Kota Serang itu mulai sejak tanggal 3 sampai 5, kemudian dalam prosesnya ada di tiga kecamatan yang terjadi Form D.Keberatan.

Yang pertama adalah Kecamatan Serang, sudah diselesaikan dan disandingkan, dan dikoreksi.

Kemudian yang kedua adalah di Kecamatan Walantaka, pun demikian sudah dilakukan.

Kemudian yang terakhir adalah di Kecamatan Taktakan karena di forum Form D.Keberatannya adalah salah satu poinnya meminta kepada KPU untuk membuka Plano di beberapa TPS, kemudian kami berunding dengan anggota yang lain, bagaimana untuk menerjemahkan beberapa TPS ini kemudian, itu. Kemudian akhirnya kami bersepakat berlima berkoordinasi kepada Bawaslu Kota Serang untuk meminta saran terkait dengan Form D.Keberatan ini, kemudian Bawaslu menyarankan untuk berikan waktu kepada saksi partai politik waktu itu. Kemudian saksi membawa sembilan TPS, kemudian sudah kami laksanakan, sudah kami sandingkan, dan selesai. Yang ada hanyalah sembilan yang dibawa.

Terima kasih.

1849. KETUA: SUHARTOYO [03:50:45]

Itu untuk sampling tadi?

1850. SAKSI TERMOHON: NANAS NASIHUDIN [03:50:48]

Itu bukan sampling, tapi atas saran Bawaslu hanya sembilan itu.

1851. KETUA: SUHARTOYO [03:50:51]

Sembilan?

1852. SAKSI TERMOHON: NANAS NASIHUDIN [03:50:51]

Sembilan

1853. KETUA: SUHARTOYO [03:50:52]

Dalam bentuk apa saran itu?

1854. SAKSI TERMOHON: NANAS NASIHUDIN [03:50:53]

Lisan.

1855. KETUA: SUHARTOYO [03:50:54]

Lisan.

1856. SAKSI TERMOHON: NANAS NASIHUDIN [03:50:54]

Hasil koordi ... koordinasi itu, pada saat (...)

1857. KETUA: SUHARTOYO [03:50:57]

Ya, itu dimaknai oleh saksi tadi, kan sampling itu.

1858. SAKSI TERMOHON: NANAS NASIHUDIN [03:51:00]

Ya, buk ... datanya ada.

1859. KETUA: SUHARTOYO [03:51:03]

Ya, oke. Kemudian, berkaitan dengan rekomendasi ini kapan Bapak tau? Yang 01.

1860. SAKSI TERMOHON: NANAS NASIHUDIN [03:51:13]

Kami tidak tahu, Yang Mulia.

1861. KETUA: SUHARTOYO [03:51:14]

Tidak tahu?

1862. SAKSI TERMOHON: NANAS NASIHUDIN [03:51:14]

Ya.

1863. KETUA: SUHARTOYO [03:51:15]

Di 29 Maret.

1864. SAKSI TERMOHON: NANAS NASIHUDIN [03:51:16]

Ya.

1865. KETUA: SUHARTOYO [03:51:18]

Tidak dapet salinan atau apa?

1866. SAKSI TERMOHON: NANAS NASIHUDIN [03:51:19]

Tidak dapat.

1867. KETUA: SUHARTOYO [03:51:23]

Kemudian Pak Dede, Divisi Hukum ada yang ditambahkan, Pak?

1868. SAKSI TERMOHON: DEDE ABDUROSYID [03:51:27]

Baik.

1869. KETUA: SUHARTOYO [03:51:28]

Dari yang diceritakan Pak Ketua nya, apa yang ditambahkan?

1870. SAKSI TERMOHON: DEDE ABDUROSYID [03:51:32]

Beda, beda Kabupaten, Pak. Kami Kabupaten Serang.

1871. KETUA: SUHARTOYO [03:51:36]

Bapak ... Bapak Kabupaten, ya?

1872. SAKSI TERMOHON: DEDE ABDUROSYID [03:51:37]

Ya, Kabupaten Serang.

1873. KETUA: SUHARTOYO [03:51:40]

Ini Divisi Hukum tok, saya kirain ini masih bagian dari kota. Kabupaten, ya?

1874. SAKSI TERMOHON: DEDE ABDUROSYID [03:51:44]

Ya.

1875. KETUA: SUHARTOYO [03:51:45]

Apa yang mau dijelaskan, Pak?

1876. SAKSI TERMOHON: DEDE ABDUROSYID [03:51:47]

Anggota KPU Kabupaten Serang.

Baik sebelumnya selamat sore, Yang mulia.

Kami melakukan rapat pleno pada tanggal 28 Februari sampai tanggal 4 Maret, bertempat di Swiss-Belinn Hotel Cikande, yang dihadiri oleh anggota Bawaslu dan saksi-saksi dari par ... parpol. Rapat pleno rekapitulasi, hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Serang berjalan dengan lancar, aman, sesuai dengan PKPU Nomor 5 (...)

1877. KETUA: SUHARTOYO [03:52:25]

Ya.

1878. SAKSI TERMOHON: DEDE ABDUROSYID [03:52:26]

Dan juknis (...)

1879. KETUA: SUHARTOYO [03:52:27]

Semua tanda tangan, Pak?

1880. SAKSI TERMOHON: DEDE ABDUROSYID [03:52:27]

Rekap. Alhamdulillah, dari semua partai yang hadir, tanda tangan semua. Termasuk dengan Demokrat.

1881. KETUA: SUHARTOYO [03:52:37]

Demokrat juga?

1882. SAKSI TERMOHON: DEDE ABDUROSİYID [03:52:38]

Yang ditandatangani oleh Pak Haudi (...)

1883. KETUA: SUHARTOYO [03:52:41]

Oke.

1884. SAKSI TERMOHON: DEDE ABDUROSİYID [03:52:42]

Sebagai saksi mandat.

1885. KETUA: SUHARTOYO [03:52:43]

Ad ... ada persoalan dengan Kecamatan Baros?

1886. SAKSI TERMOHON: DEDE ABDUROSİYID [03:52:47]

Tidak ada.

1887. KETUA: SUHARTOYO [03:52:48]

Tidak ada yang keberatan?

1888. SAKSI TERMOHON: DEDE ABDUROSİYID [03:52:49]

Tidak ada. Selama berjalannya pleno di tingkat Kabupaten Serang, berjalan dengan lancar dan tidak ada yang namanya D.Ha ... keberatan ataupun protes sama sekali.

1889. KETUA: SUHARTOYO [03:53:03]

Ada keberatan setelah itu?

1890. SAKSI TERMOHON: DEDE ABDUROSİYID [03:53:05]

Tidak ada.

1891. KETUA: SUHARTOYO [03:53:06]

Sampai selesai, ya?

1892. SAKSI TERMOHON: DEDE ABDUROSİYID [03:53:08]

Sampai selesai.

1893. KETUA: SUHARTOYO [03:53:09]

Oke. Itu saja, Pak.

1894. SAKSI TERMOHON: DEDE ABDUROSYID [03:53:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

1895. KETUA: SUHARTOYO [03:53:17]

Dari Saksi Mansyur, Pihak Terkait. Apa yang mau dijelaskan, Mansyur? Langsung saja, Pak, pakai mik, ya.
Bapak Saksi Mandat Kecamatan Taktakan, ya?

1896. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MANSYUR [03:53:32]

Ya.

1897. KETUA: SUHARTOYO [03:53:33]

Di PPK ini? Ya? Saksi Mandat?

1898. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MANSYUR [03:53:39]

Saksi Mandat dari (...)

1899. KETUA: SUHARTOYO [03:53:40]

Partai?

1900. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MANSYUR [03:53:41]

Partai PDI Perjuangan.

1901. KETUA: SUHARTOYO [03:53:42]

PDIP di Kecamatan Taktakan, ya?

1902.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MANSYUR [03:53:45]

Kecamatan Taktakan.

1903.KETUA: SUHARTOYO [03:53:46]

Apa yang mau dikatakan, disampaikan?

1904.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MANSYUR [03:53:48]

Di Kecamatan Taktakan, waktu rapat tidak ada tanda masalah sama sekali.

1905.KETUA: SUHARTOYO [03:53:56]

Tidak ada keberat ... keberatan?

1906.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MANSYUR [03:53:57]

Tidak ada keberatan, Yang Mulia.

1907.KETUA: SUHARTOYO [03:53:59]

Tidak ada atau tidak tahu? Bapak sepanjang Pleno di situ terus, sepanjang penghitungan?

1908.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MANSYUR [03:54:04]

Sema ... sepanjang penghitungan, Yang Mulia.

1909.KETUA: SUHARTOYO [03:54:06]

Baik.
Pak Agil?

1910.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGIL SAPUTRA [03:54:10]

Siap.

1911.KETUA: SUHARTOYO [03:54:11]

Saksi Mandat Walantaka?

1912.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGIL SAPUTRA [03:54:13]

Ya, baik.

1913.KETUA: SUHARTOYO [03:54:14]

Dari PDIP juga?

1914.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGIL SAPUTRA [03:54:15]

Betul, Yang Mulia.

1915.KETUA: SUHARTOYO [03:54:17]

Apa yang terjadi di Kecamatan Walantaka?

1916.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGIL SAPUTRA [03:54:21]

Sebelumnya, izinkan saya, Yang Mulia, memperkenalkan saya Agil Saputra, selaku Saksi PPK Kecamatan Walantaka yang mendapatkan mandat dari PDI Perjuangan. Rapat Pleno Rekapitulasi Walantaka yang dimulai tanggal 17 Februari 2024 berjalan dengan lancar. Tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan Saksi sesuai dengan yang tercatat dalam Formulir Model D.

Jadi, saya menghadiri dari awal sampai akhir (...)

1917.KETUA: SUHARTOYO [03:54:52]

Ya.

1918.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGIL SAPUTRA [03:54:53]

Proses itu.

1919.KETUA: SUHARTOYO [03:54:53]

Tidak ada keberatan, ya?

1920.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGIL SAPUTRA [03:54:54]

Tidak ada keberatan, Yang Mulia.
Demikian, Yang Mulia.

1921.KETUA: SUHARTOYO [03:54:57]

Baik. Dari Demokrat, keberatan enggak? Atau Bapak enggak perhatikan?

1922.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGIL SAPUTRA [03:55:01]

Saya hadir dari awal sampai akhir itu, saya tidak mendengar ada keberatan dari Demokrat, Yang Mulia. Karena saya koordinator untuk Saksi PDI Perjuangan Kecamatan Walantaka.

1923.KETUA: SUHARTOYO [03:55:14]

Pak Supriyadi?

1924.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUPRIYADI [03:55:17]

Baik, Yang Mulia.

1925.KETUA: SUHARTOYO [03:55:18]

Saksi Mandat di Kecamatan Baros.

1926.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUPRIYADI [03:55:21]

Untuk di Baros, tidak ada satu peristiwa khusus apapun.

1927.KETUA: SUHARTOYO [03:55:26]

Baros itu Kecamatan, Kota atau Kabupaten?

1928.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUPRIYADI [03:55:29]

Kabupaten, kabupaten, Pak ... Yang Mulia.

1929.KETUA: SUHARTOYO [03:55:33]

Kabupaten, kan?

1930.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUPRIYADI [03:55:34]

Ya.

1931.KETUA: SUHARTOYO [03:55:35]

Oke, tidak ada?

1932.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUPRIYADI [03:55:36]

Tidak ada keberatan. Tidak ada.

1933.KETUA: SUHARTOYO [03:55:38]

Dari Pemohon (...)

1934.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUPRIYADI [03:55:38]

Ya.

1935.KETUA: SUHARTOYO [03:55:38]

juga tidak keberatan?

1936.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUPRIYADI [03:55:40]

Tidak, tidak. Semua merata ... menandatangani ini, berita acara.

1937.KETUA: SUHARTOYO [03:55:46]

Oke.

Pak Mufrod, Saksi Mandat di Kota Serang?

1938.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUFROD [03:55:50]

Siap, Yang Mulia.

1939. KETUA: SUHARTOYO [03:55:52]

Pa... direkapitulasi tingkat kota, ya?

1940. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUFROD [03:55:54]

Di tingkat kota.

1941. KETUA: SUHARTOYO [03:55:55]

Ada keberatan atau ada kejadian-kejadian apa ya, Pak? Yang (...)

1942. SAKSI PERKARA NOMOR PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUFROD [03:55:59]

Seingat saya ... apa ... Yang Mulia, di Kota Serang itu, rekapitulasi Kota Serang itu terjadi di Walantaka itu di D.Keberatan yang diajukan oleh Partai Demokrat, itu di 10 TPS dan itu sudah diselesaikan di pleno dan sudah klir.

1943. KETUA: SUHARTOYO [03:56:21]

Pleno kota.

1944. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUFROD [03:56:23]

Sudah disandingkan dan sudah selesai.

Yang kedua di Kecamatan Taktakan, Kecamatan Taktakan itu, apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Kota Serang itu tidak ada locus seperti di Walantaka, Yang Mulia. Kalau di Walantaka itu ada locus TPS-nya disebutkan, kalau di Taktakan itu bahasanya di beberapa akhirnya disepakatilah 9 TPS itu yang disandingkan dan sudah klir, Yang Mulia. Tidak ada masalah lagi.

1945. KETUA: SUHARTOYO [03:56:58]

Itu yang di mana?

1946. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUFROD [03:56:59]

Yang di Walanta ... di Taktakan.

1947. KETUA: SUHARTOYO [03:57:00]

Yang beberapa itu?

1948. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUFROD [03:57:01]

Yang beberapa itu di D.Keberatannya tidak disebutkan locusnya (...)

1949. KETUA: SUHARTOYO [03:57:05]

Maksudnya, di Kecamatan Taktakan.

1950. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUFROD [03:57:07]

Di Kecamatan Taktakan, Yang Mulia.

1951. KETUA: SUHARTOYO [03:57:10]

Apa lagi yang mau dijelaskan?

1952. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUFROD [03:57:13]

Cukup, Yang Mulia.

1953. KETUA: SUHARTOYO [03:57:15]

Pak Dipo, saksi mandat Provinsi Banten ketika di tingkat Provinsi, ya?

1954. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIPO HERU PRAYITNO [03:57:22]

Siap.

1955. KETUA: SUHARTOYO [03:57:23]

Apa yang Bapak ketahui di sana?

1956.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIPO HERU PRAYITNO [03:57:24]

Di tingkat Provinsi untuk rekapitulasi yang dimulai tanggal 7 sampai tanggal 10, ada memang ada keberatan dari saksi Partai Demokrat, yaitu menginginkan untuk penyandingan data (...)

1957.KETUA: SUHARTOYO [03:57:39]

Yang plano itu?

1958.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIPO HERU PRAYITNO [03:57:40]

He em. Tetapi karena memang mekanismenya itu adalah di rekapitulasi di provinsi itu adalah merekap Kabko untuk menjadi rekap Provinsi, di Provinsi maka kemudian KPU meminta pertimbangan Bawaslu yang kebetulan ada di situ. Kemudian pihak Bawaslu menanyakan kepada KPU Kota Serang apakah semua sudah tanda tangan di formulir di Kabko sudah, diperkuat KPU pun menanyakan kembali apakah semua saksi di situ tanda tangan, sudah (...)

1959.KETUA: SUHARTOYO [03:58:22]

Ya, akhirnya keberatan itu diakomodir (...)

1960.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIPO HERU PRAYITNO [03:58:24]

Kemudian keberatan itu diakomodir dengan diminta untuk mengajukan kepada Bawaslu untuk dipertimbangkan. Begitu, Yang Mulia.

1961.KETUA: SUHARTOYO [03:58:36]

Baik.

Untuk Bawaslu bisa menjelaskan ini untuk tiga Kecamatan Walantaka, Taktakan, dan Baros, bagaimana ini?

1962.BAWASLU: ALI FAISAL [03:58:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Tiga Kecamatan di Kota Serang dan satu Kecamatan di Baros. Yang pertama di Kecamatan Taktakan, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa ... apa namanya ... ada keberatan dan kemudian pada saat rekapitulasi pleno di tingkat Kota Serang itu sudah ada pembetulan di sembilan, penyandingan data di 9 TPS, lalu yang berikutnya di Kecamatan Serang di Kecamatan Serang ini bahkan lebih banyak, Yang Mulia, ada 234 TPS yang disandingkan. Lalu kemudian ...di... dan 234 ini hasil rekomendasi administrasi cepat yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Serang. Lalu yang di Kecamatan Walantaka ini ada 9 TPS. Lalu yang berikutnya untuk sampai di Bawaslu Provinsi Banten, kami ingin menegaskan, Yang Mulia, terkait dengan laporan pelanggaran administrasi yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi Banten, kami menilai sudah sesuai dengan mekanisme PerBawaslu 8 Tahun 2022.

1963. KETUA: SUHARTOYO [04:00:06]

Yang 001, itu?

1964. BAWASLU: ALI FAISAL [04:00:07]

Betul. Kemudian (...)

1965. KETUA: SUHARTOYO [04:00:09]

Ya. Pak (...)

1966. BAWASLU: ALI FAISAL [04:00:09]

Kemudian (...)

1967. KETUA: SUHARTOYO [04:00:010]

Sebentar, Pak. Ini tadi Bapak untuk 3 kecamatan itu, sudah ada step-step penyelesaian. Nah, relevansinya dengan masih mengeluarkan rekomendasi ini, apa?

1968. BAWASLU: ALI FAISAL [04:00:22]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami luruskan yang terkait dengan putusan Bawaslu Provinsi Banten yang dilaporkan oleh Pak Syamsudin itu bukan rekomendasi, tapi putusan pelanggaran administrasi. Kami menilai dan melihat dan menilai terkait dengan pelanggaran mekanisme prosedur dan tata cara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dalam hal itu adalah PPK. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya bahwa itu adalah rekomendasi yang terkait dengan hasil.

Bahwa di dalam ... di dalam pembuktian itu, kami menggunakan ... apa ... nomenklatur Pasal 24 ayat (3) itu ada investigasi secara internal dan itu bentuknya untuk keluarnya putusan administrasi. Sama sekali bukan hasil, begitu. Lalu terkait dengan apakah putusan itu ultra petita misalnya, kami ti ... merasa tidak karena dugaan pelanggaran itu disampaikan jauh sebelum adanya pleno di tingkat RI, begitu. Apalagi diperkuat dengan surat Bawaslu RI (...)

1969. KETUA: SUHARTOYO [04:01:38]

Yang mana, yang sebelum tingkat RI?

1970. BAWASLU: ALI FAISAL [04:01:41]

Yang ... yang putusan ... putusan itu memang dikeluarkan setelah Pleno, tapi prosesnya Pemohon menyampaikan ini ke Bawaslu itu, pada tanggal 13 Maret. Jadi sebelum ada Pleno.

1971. KETUA: SUHARTOYO [04:01:55]

Tapi bukan berkaitan dengan hasil yang dipersoalkan?

1972. BAWASLU: ALI FAISAL [04:01:58]

Bukan. Itu administrasi, pelanggaran administrasi, Yang Mulia.

1973. KETUA: SUHARTOYO [04:02:02]

Seperti apa, misalnya?

1974. BAWASLU: ALI FAISAL [04:02:06]

Terjadinya pencatatan yang salah oleh PPK, setelah kami melakukan investigasi secara internal berdasarkan panduan Pasal 24 ayat (3) PerBawaslu 8/2022, kami menyandingkan. Tapi sekali lagi bukan soal hasilnya, tetapi ada mekanisme yang salah yang dilakukan oleh PPK. Makanya putusannya adalah putusan administrasi terkait dengan prosedur mekanisme dan tata cara, bukan hasil. Begitu, Yang Mulia, izin.

1975. KETUA: SUHARTOYO [04:02:41]

Dari Pemohon, ada pertanyaan?

1976. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [04:02:48]

Apakah kami boleh bertanya ke Bawaslu juga, Yang Mulia?

1977. KETUA: SUHARTOYO [04:02:51]

Boleh. Oh, boleh melalui Hakim, Pak. Melalui Hakim. Mau tanya apa?

1978. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [04:02:59]

Tadi, terkait dengan nomenklatur administrasi, itu.

1979. KETUA: SUHARTOYO [04:03:05]

Ya.

1980. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [04:03:06]

Jika kita melihat pada putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu.

1981. KETUA: SUHARTOYO [04:03:11]

Ya.

1982. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [04:03:12]

Ini kan, proses pembuktiannya dengan penyandingan.

1983. KETUA: SUHARTOYO [04:03:15]

Ya.

1984. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [04:03:16]

Data-data setiap TPS.

1985. KETUA: SUHARTOYO [04:03:19]

Artinya, pertanyaannya kenapa kok tidak ada kaitan dengan hasil, begitu?

1986. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [04:03:22]

Ya. Pertanyaannya adalah kesalahan administrasi apa persisnya yang terjadi sehingga menghasilkan putusan ini?

1987. KETUA: SUHARTOYO [04:03:33]

Untuk yang lain ada pertanyaan? Supaya sekaligus.

1988. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [04:03:36]

Untuk saksi dari KPU, Pak Pendi, Pak Tauhid, Pak Nanas, Pak Dede, ini lima-limanya adalah terlapor di dalam putusan ini.

Pertanyaannya adalah apakah semuanya telah mendapatkan teguran ... berdasarkan (...)

1989. KETUA: SUHARTOYO [04:03:51]

Ya.

1990. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [04:03:52]

Amar dari putusan ini, dari Bawaslu?

1991. KETUA: SUHARTOYO [04:03:54]

Oke.

1992. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [04:03:55]

Itu saja.

1993. KETUA: SUHARTOYO [04:04:00]

Bagaimana, Pak, persisnya soal administrasi tadi, meskipun tadi Hakim sudah tanya. Tegaskan kembali.

1994. BAWASLU: ALI FAISAL [04:04:06]

Kami ulangi. Bahwa yang kita proses itu adalah potensi penanga ... pelanggaran administrasinya. Maka di dalam Perbawaslu itu disampaikan bahwa dalam menangani administrasi itu, majelis boleh membentuk tim investigasi secara internal dan dilaporkan kepada Majelis. Maka karena ini terkait dengan ... dengan dugaan prosedur mekanisme dan tata cara, maka terkait dengan bagaimana penempatan angka-angka yang mungkin salah, begitu.

Jadi kami secara internal melakukan itu dan menyangdingkan. Tetapi sekali lagi, tujuan utamanya bukan ... bukan ingin mencari hasilnya, tetapi dimana potensi kesalahan penyelenggara pemilu ini terkait dengan yang dituduhkan adalah PPK. Begitu, Yang Mulia.

1995. KETUA: SUHARTOYO [04:04:54]

Pak, Saksi-Saksinya Termohon sudah kena peringatan itu atas putusan ini? Pak ... Pak Ketua?

1996. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NANAS NASIHUDIN [04:05:08]

Sudah, Yang Mulia.

1997. KETUA: SUHARTOYO [04:05:09]

Sudah. Terus (...)

1998. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NANAS NASIHUDIN [04:05:10]

Oleh divisi hukum.

1999. KETUA: SUHARTOYO [04:05:11]

Dari Kabupaten? Divisi hukum?

2000. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEDE ABDUROSYID [04:05:16]

Tidak, Yang Mulia.

2001. KETUA: SUHARTOYO [04:05:17]

Tidak?

2002. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEDE ABDUROSYID [04:05:18]

Tidak.

2003. KETUA: SUHARTOYO [04:05:19]

Padahal Baros termasuk ini? Yang terlibat.

2004. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEDE ABDUROSYID [04:05:21]

Ya, cuman PPK. Kalau KPU-nya tidak.

2005. KETUA: SUHARTOYO [04:05:24]

Tidak.

2006. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEDE ABDUROSYID [04:05:24]

Tidak, he em.

2007. KETUA: SUHARTOYO [04:05:25]

Kalau di PPK ... maksud Pak Ketua KPU so ... Serang tadi untuk PPK-nya atau?

2008. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NANAS NASIHUDIN [04:05:32]

Kalau ... kalau Kota Serang PPK-nya (...)

2009. KETUA: SUHARTOYO [04:05:34]

PPK-nya.

2010. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NANAS NASIHUDIN [04:05:35]

Divisi hukum.

2011. KETUA: SUHARTOYO [04:05:35]

Yang sekarang pada jadi Saksi ini?

2012. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NANAS NASIHUDIN [04:05:37]

Betul.

2013. KETUA: SUHARTOYO [04:05:38]

Apa bentuk peringatannya?

2014. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NANAS NASIHUDIN [04:05:40]

Teguran keras.

2015. KETUA: SUHARTOYO [04:05:42]

Keras?

2016. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NANAS NASIHUDIN [04:05:43]

Ya.

2017. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEDE ABDUROSYID [04:05:44]

Teguran administrasi, gitu. Izin, Pimpinan Yang Mulia.

2018. KETUA: SUHARTOYO [04:05:49]

Bapak, teguran administrasi atau teguran?

2019. SAKSI TERMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NANAS NASIHUDIN [04:05:52]

Mohon maaf, teguran administrasi.

2020. KETUA: SUHARTOYO [04:05:55]

Di bukti berapa? Pemohon ... Pemohon bisa ada buktinya? Tidak ada?

2021. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDI SYAFRANI [04:06:00]

Kita enggak punya, Yang Mulia. Makanya nanya.

2022. KETUA: SUHARTOYO [04:06:03]

Pihak Terkait ada pe ... pemo ... Termohon ada pertanyaan, Pak? Kuasa hukum? Satu? cukup, ya? Tidak, ya? Dari Pihak Terkait ada pertanyaan?

2023. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARIES SURYA [04:06:12]

Ada. Ke Bawaslu, Yang Mulia.

2024. KETUA: SUHARTOYO [04:06:15]

Lewat Hakim, Pak.

2025. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARIES SURYA [04:06:17]

Baik. Ini ada kaitan juga dengan pertanyaan dari Kuasa Pemohon. Tadi Bawaslu menyampaikan melakukan penyandingan internal, tapi kan sanksinya juga ke eksternal ke Termohon.

Saya pertanyaannya adalah dokumen apa yang disandingkan? Apakah misalkan dokumen itu, misalkan C.Hasil yang berada di KPU, KPU diminta juga untuk menyandingkan. Ini ada kaitan juga dengan fairness yang disampaikan oleh Ahli tadi.

Terima kasih, Yang Mulia.

2026. KETUA: SUHARTOYO [04:06:47]

Langsung dijawab, Pak. Bisa, Pak?

2027. BAWASLU: ALI FAISAL [04:06:48]

Menyandingan C.Hasil dengan D.Hasil, Yang Mulia.

2028. KETUA: SUHARTOYO [04:06:51]

C dengan D, Pak.

2029. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARIES SURYA [04:06:54]

Hasil apa salinan?

2030. BAWASLU: ALI FAISAL [04:06:56]

Salinan.

2031. KETUA: SUHARTOYO [04:06:58]

Cukup, ya? Baik.

Untuk Bukti tidak ada, ya, dari Para Pihak. Kalau begitu untuk Nomor 183 dianggap cukup juga. Terima kasih untuk semua Pihak.

Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, dan kepada Para Saksi juga diucapkan terima kasih. Sudah selesai dan dengan demikian juga karena ini nomor terakhir, persidangan dinyatakan selesai dan nanti Para Pihak supaya tinggal menunggu saja seperti perkara-perkara yang lain, bagaimana sikap Mahkamah setelah nanti perkara ini diplenokan di tingkat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 18.12 WIB

Jakarta, 27 Mei 2024
Plt.Panitera,
Muhidin

